Majalah Bimas Katolik

ISSN 0853-7127

Vol. 26 No. 3, September-Desember 2016

Dirjen Bimas Katolik
Proyek Perubahan Kebijakan Pendidikan Kemandirian pada PTAKS

Ansy Lema
Harapan Kepada DITJENBIMAS Katolik

www.bimaskatolik.kemenag.go.id Ditjen Bimas Katolik

Direktur Jenderal

beserta

Karyawan/wati DITJENBIMAS Katolik

Mengucapkan

SELAMAT HARI RAYA NATAL
25 Desember 2016

&

TAHUN BARU
1 Januari 2017

Semoga Kelahiran-Nya membawa damai

&

Semoga Tahun Baru membawa semangat baru

Majalah Bimas Katolik

Pelindung:
Dirjen Bimas Katolik

Penasihat:
Sekretaris DITJENBIMAS Katolik

Penanggung Jawab:
Yohanes Dwimbo Kamil

Redaktur:
Yohan Koesmantoro

Penyunting/Editor:
Maria Loeknama Masang

Fotografer:
Fransiska Rema Sakeng

Desain Grafis:
Yosephina S. Djeer

Sekretaris:
Sumardiyono

Penulis Artikel:
Alexander J. Kurnianto
Marcus Supriyanto
Pormadi Simbolon
Irmina R. Kurniastuti
Thomas A. E. Bangu

Alamat Redaksi:
Jl. M.H. Thamrin No. 6, Jakarta Pusat

e-Mail:
bimaskatolik@kemenag.go.id
buletinbimaskatolik@kemenag.go.id

Fanpage Facebook:
Ditjen Bimas Katolik

Salam Redaksi

Selamat Natal dan Tahun Baru!

Natal selalu menjadi saat yang dinanti-nantikan. Sukacita Natal menyambut kelahiran Sang Juru Selamat mengisi hati dengan berbagai rasa. Salah satu sukacita yang dirasakan di Ditjen Bimas Katolik adalah adanya proyek perubahan pengembangan pola pendidikan keagamaan pada Perguruan Tinggi Agama Katolik Swasta (PTAKS) dengan membuat kebijakan pendidikan kemandirian. Selain itu, ada juga kebijakan-kebijakan terkait pendidikan keagamaan tingkat menengah serta urusan keagamaan dalam bidang penyuluhan yang menjadi perhatian pada Fokus edisi ini.

Melalui kelahiran Sang Juru Selamat, kiranya dapat menjadi penyemangat, khususnya bagi para Aparatur Sipil Negara Ditjen Bimas Katolik, untuk selalu memerangi korupsi dengan bertindak tegas menolak segala bentuk korupsi seperti Seruan Pastoral Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) 2016 dan himbauan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo, pada Hari Anti Korupsi Internasional 2016.

Melalui kelahiran Sang Juru Selamat, kiranya keberagaman dan perbedaan dapat memupuk persatuan. Seperti melalui kegiatan Gerak Jalan Kerukunan Umat Beragama, Doa Bersama untuk Bangsa, Parade Nusantara Bersatu, Parade Bhinneka Tunggal Ika yang dilaksanakan dalam rangka menjaga kebhinnekaan.

Melalui kelahiran Sang Juru Selamat, kiranya damai selalu menyelimuti Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tuhan memberkati.

Majalah Bimas Katolik menerima tulisan berupa: liputan/opini/artikel lainnya yang sesuai dengan visi dan misi DITJENBIMAS Katolik. Kriteria tulisan: asli (bukan plagiasi), bukan rangkuman pendapat/buku orang lain, tidak menyinggung Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA), belum pernah dimuat di media atau penerbit lain termasuk blog, dan tidak bisa dikirim bersamaan ke media/majalah lain. Setiap tulisan disertai identitas lengkap (nama, pekerjaan, alamat, nomor kontak), foto penulis, dan foto-foto penunjang tulisan. Tulisan diketik dengan spasi satu setengah, font times new roman size 12, maksimal 3 (tiga) halaman, ukuran kertas A4. Tulisan dikirim ke Redaksi Majalah Bimas Katolik melalui e-Mail ***buletinbimaskatolik@kemenag.go.id***

Daftar Isi

Majalah Bimas Katolik

Serambi 1

Fokus:

Program Prioritas Pendidikan

Dan Penyuluhan DITJENBIMAS Katolik 2

Sorotan:

Siaga Menjaga Kebhinnekaan 19

Orbituari 32

Liputan 33

Mimbar

Seruan Pastoral KWI 2016

52

Liputan Daerah 56

Stop Press: HAKI Riau 2016 59

Wawancara: 16

Ansy Lema

Kebijakan: 24

Proyek Perubahan Pendidikan Kemandirian pada PTAKS

DITJENBIMAS Katolik Kementerian Agama RI pernah menyelenggarakan dan mengelola Pendidikan Guru Agama (PGA), yang dalam penyelenggaraannya tidak berjalan mulus karena tidak memiliki payung hukum yang kuat, kemudian beralih fungsi menjadi Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK).

Proses 'pergumulan' yang diemban oleh DITJENBIMAS Katolik demi terlaksananya pelayanan kepada masyarakat Katolik di bidang Pendidikan, menjadi Fokus dalam edisi kali ini. Sampai saat ini, tercatat sudah ada 25 SMAK yang bernaung di bawah DITJENBIMAS Katolik.

Menurut Kasubdit Pendidikan Menengah, model sekolah keagamaan dengan struktur kurikulum inilah yang diharapkan oleh Gereja Katolik yang menghendaki agar para peserta didik tidak hanya menguasai ilmu-ilmu agama melainkan juga menguasai ilmu-ilmu profan lainnya yang dibutuhkan dalam hidup.

Karena itu pihak Gereja Katolik (Keuskupan) sangat antusias untuk mendirikan SMAK di wilayahnya masing-masing, karena lulusan SMAK bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dengan kuliah di perguruan tinggi umum Negeri dan perguruan tinggi umum swasta.

Tidak cuma Penidikan Menengah, upaya meningkatkan Perguruan Tinggi Agama Katolik Swasta (PTAKS) dalam dinamika pendidikan nasional dengan pemberian bantuan untuk sarana dan prasarana, juga melandasi pelayanan DITJENBIMAS Katolik di bidang yang sama. Bantuan lain yang diberikan seperti, bantuan beasiswa untuk mahasiswa dan dosen pada jenjang magister dan doktor, memperkuat keilmuan PTAKS melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, meningkatkan kompetensi dosen melalui sertifikasi dosen, mendorong terwujudnya jabatan akademik dosen, menyediakan anggaran untuk tunjangan profesional dosen. Serta melaksanakan pemantauan penyelenggaraan pendidikan di PTAKS, antara lain melalui event ujian negara.

Yang patut disyukuri lagi adalah, bahwa proses penegerian di tingkat Pendidikan Tinggi, masih tetap berlangsung dan tetap dalam pengawasan tanpa harus merasa bahwa sudah situasi darurat. Menurut Kasubdit Pendidikan Tinggi, sebagai orang beriman, kita diingatkan agar membangun harapan yang positif. Kita selalu berharap bahwa apa yang kita nantikan akan menjadi sebuah kenyataan yang membahagiakan.

Semuanya ini dilakukan dalam rangka menjalankan tanggungjawab negara yang diemban DITJENBIMAS Katolik demi tercapainya masyarakat Katolik yang unggul dan berdayaguna, melalui pelayanan di bidang pendidikan.

Dalam hal pembinaan tenaga Penyuluh Agama Katolik, pembinaan yang diselenggarakan DITJENBIMAS Katolik kepada para penyuluh agama Katolik PNS dan Non PNS berupa pertemuan pembinaan kompetensi (kepribadian, keterampilan, keahlian) seperti pembinaan karya tulis ilmiah, diklat, bantuan honorarium (khusus untuk Non PNS), penyediaan pedoman/petunjuk teknis di bidang pelaksanaan tugas penyuluhan.

Kontribusi Bimas Katolik: memberikan pembinaan yang dapat meningkatkan kompetensi baik dalam kepribadian, keahlian maupun keterampilan para penyuluh dalam mengemban tugas sebagai tenaga penyuluh di tengah masyarakat yang dinamis. (MM)

Program Prioritas Pendidikan dan Penyuluhan DITJENBIMAS Katolik

"Masyarakat Katolik/Gereja Katolik sangat antusias akan hadirnya PAUD Taman Seminari"

FX Rudy Andriyanto
Kasubdit Pendidikan Dasar

Tahun Anggaran 2016, DITJENBIMAS Katolik tengah berkonsentrasi pada pembentukan 5 (lima) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Seminari. Progres saat ini, telah dilakukan supervisi Taman Seminari St. Petrus Madi, Papua dan St. Maria Agustina Rumaat, Maluku Tenggara yang telah mendapat Ijin Operasional. Supervisi yang sama juga telah dilakukan pada dua PAUD Taman Seminari di Provinsi Maluku Utara, yakni St. Yosef Buli, Halmahera Timur dan St. Bosco Jailolo, Halmahera Barat, yang Ijin Operasionalnya belum keluar karena belum melengkapi akte notaris Yayasan sebagai persyaratan administrasi.

Pelayanan ini menuai tanggapan positif dari masyarakat dan Gereja Katolik yang sangat antusias akan hadirnya PAUD Taman Seminari di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Papua, Maluku, Maluku Utara, dan Kalimantan Barat. Maka menurut Kasubdit Pendidikan Dasar, kegiatan selanjutnya adalah melakukan kunjungan atau supervisi calon PAUD Taman Seminari yang sudah mengajukan permohonan ijin operasional pendirian. Diharapkan PAUD Taman Seminari dapat ditingkatkan statusnya menjadi negeri, meskipun prosesnya panjang. Adapun, tujuan dan harapan DITJENBIMAS Katolik terhadap PAUD Taman Seminari adalah bahwa lembaga ini akan cepat berkembang karena banyak dibutuhkan umat Katolik, terutama di daerah terpencil (Kota dan Kabupaten). Untuk itu DITJENBIMAS Katolik membantu memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk PAUD Taman Seminari yang telah mendapat Ijin pendirian, terutama untuk dua Taman Seminari Percontohan di Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Brebes.

Selain pembentukan PAUD, Subdit Pendidikan Dasar ini pun menerapkan program prioritas bimbingan teknis Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Agama Katolik, *Steig* dan *Frederich* (teori dan praktik). Program ini mengandung tiga hal penting, yaitu pelatihan Kurikulum PAK 2013, pembinaan karakter guru yang berkualitas dan pembinaan rohani (spiritualitas) guru Pendidikan Agama Katolik (PAK). Ketiga unsur penting ini diberikan sedemikian rupa dengan sangat memperhatikan "teori dan praktik" yang seimbang (proporsional). Kelemahan suatu pelatihan biasanya terlalu banyak materi yang bersifat teoritis. Selain materi teori dan teknis, juga diberikan waktu yang cukup bagi peserta untuk melakukan praktik seperti menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan menyusun Instrumen Penilaian serta praktik pembinaan karakter dan spiritualitas. Dengan demikian sasaran dari program Bimtek ini adalah para Guru PAK yang memiliki ilmu dan wawasan tentang Kurikulum PAK 2013 secara teoritis dan praktis. Selain itu, mereka juga mendapat pembinaan karakter dan spiritualitas Katolik yang berkualitas. Diharapkan setelah Bimtek, para Guru PAK yang kembali ke tempat tugas akan mampu mengimplementasikan hasil Bimtek kepada siswa-siswi mereka di sekolah masing-masing.

Dengan dinamika yang menggembirakan ini, diharapkan juga diikuti oleh sarana prasana yang memadai. Misalnya, Program Pengadaan Buku Kerohanian Katolik Tingkat Dasar yang diharapkan memenuhi kuota sasaran bagi guru dan siswa-siswi Katolik pada sekolah/pendidikan tingkat dasar. Menanggapi hal ini, Kasubit Pendidikan Dasar menyampaikan bahwa memang terdapat penghematan atau pemotongan anggaran yang cukup besar pada Tahun Anggaran 2016 ini. Karena keterbatasan dana untuk pengiriman buku, maka diambil kebijakan pengiriman buku untuk tahun 2016 ini diprioritaskan untuk lokasi sekolah yang tidak terlalu jauh, seperti provinsi Banten, DKI, Jabar, Jateng, Jatim, Bali dan Lampung. Sedangkan untuk tahun depan, pengiriman buku akan diprioritaskan pada provinsi NTT, Maluku, Papua, Sulawesi, Kalimantan dan Sumatera.

Dengan berpedoman pada penerapan Lima Nilai Budaya Kerja, strategi dan upaya yang dilakukan Kasubdit Pendidikan Dasar dalam melayani kebutuhan umat Katolik di bidang Pendidikan Anak Usia Dini adalah dengan memasukkan Lima Nilai Budaya Kerja tersebut ke dalam kegiatan prioritas Subdit Pendidikan Dasar, seperti Bimtek Kompetensi dan Profesionalitas Guru Pendidikan Agama Katolik Tingkat Dasar, kegiatan supervisi dan monitoring lembaga PAUD Taman Seminari. Sebagai contoh, pada aspek Profesionalitas, Subdit Pendidikan Dasar sangat menekankan pada materi dan praktik peningkatan kompetensi guru (pemahamanan dan penguasaan Kurikulum PAK 2013, pendidikan karakter, spritualitas guru). Tujuannya adalah menciptakan Guru Pendidikan Agama Katolik tingkat dasar yang kompeten dan profesional. Contoh lain adalah pada aspek Tanggung Jawab. Subdit Pendidikan Dasar sangat menekankan lembaga PAUD Taman Seminari yang telah mendapatkan bantuan sarana dan prasarana untuk menggunakan bantuan tersebut secara benar dan bertanggung jawab. Dan dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), dibuat secara benar sesuai dengan Juknis dan peraturan yang berlaku.

Yustina Srini
Kasubdit Pendidikan Menengah

"Harapan Gereja dan masyarakat Katolik tentang Pendidikan Keagamaan terwujud dan terlihat dalam Struktur Kurikulum SMAK"

Pada Era Tahun 1986-an ada Lembaga Pendidikan Katolik Tingkat Menengah yang terkenal di masyarakat dengan sebutan ***Sekolah Pendidikan Guru (SPG)***, yang kemudian berkembang menjadi Lembaga ***Pendidikan Guru Agama (PGA).*** Lembaga pendidikan Tingkat Menengah inilah yang pada saat itu bisa menjadi andalan masyarakat sebagai wadah/tempat yang mampu menyiapkan dan membentuk peserta didik yang secara integral mampu memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama-nya dan/atau menjadi trampil di bidang agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia.

Lembaga Pendidikan tersebut (SPG-PGA) banyak dikelola oleh Yayasan Katolik, dengan tujuan untuk mencetak tenaga Guru/tenaga pendidik, yang lulusannya bisa langsung dimanfaatkan oleh masyarakat, mengajar agama dan bisa menjadi tenaga pastoral di paroki. Lembaga Pendidikan Tingkat Menengah seperti ini pada akhirnya sekitar tahun 1990-an ditutup oleh Pemerintah. Dengan demikian praktis di lingkungan Katolik tidak ada lagi Lembaga Pendidikan yang dapat diharapkan untuk mendidik dan mempersiapkan peserta didik untuk tujuan di atas.

DITJENBIMAS Katolik Kementerian Agama RI pernah menyelenggarakan dan mengelola PGA, yang dalam penyelenggaraannya tidak berjalan mulus karena tidak memiliki payung hukum yang kuat, kemudian beralih fungsi menjadi Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK), dan satu-satunya sekolah yang tetap bertahan adalah SMAK Bhakti Luhur Malang. (Keputusan Dirjen Bimas Katolik Nomor 22 Tahun 1992 Tentang Alih Fungsi Pendidikan Guru Agama (PGA) Katolik menjadi Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK).

Infografis: Potret Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK)

Data per Desember 2016

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 30 ayat (5) yang menyatakan: "Ketentuan mengenai Pendidikan Keagamaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah". Dan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, respon masyarakat Katolik/ Gereja terhadap Peraturan Pemerintah ini sangat positif, masyarakat Katolik sangat antusias. Pihak Gereja Katolik mulai melihat adanya peluang untuk mendirikan sekolah-sekolah keagamaan Katolik. Hal ini terbukti sejak Tahun 2009, mulai muncul permintaan berupa proposal permohonan pendirian sekolah keagamaan dari beberapa Keuskupan di Indonesia (Contoh: Keuskupan Agung Pontianak, Keuskupan Pangkalpinang, dan Keuskupan Agung Ende, dll) yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Bimas Katolik agar memberikan Izin Operasional untuk Sekolah Keagamaan Katolik Tingkat Menengah yang hingga saat ini kita kenal dengan nama Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK).

Dengan diterbitkannya PMA Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Sekolah Menengah Agama Katolik, yang menjadi payung hukum keberadaan Sekolah Menengah Keagamaan di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, maka masyarakat Katolik di Indonesia, dalam hal ini pihak Keuskupan, memberikan respons yang sangat positif. Hingga akhir bulan September tahun 2016, sudah ada 25 SMAK yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Bimas Katolik, dan tahun ini akan bertambah lagi jumlahnya dengan munculnya beberapa proposal dari beberapa Keuskupan yang hendak mendirikan SMAK di wilayah keuskupannya, seperti: Keuskupan Agung Ende (SMAK Santo Joanne Baptista Wolosambi di Kabupaten Nagekeo), Keuskupan Jayapura: (SMAK Seminari Santo Fransiskus Asisi Jayapura, dan SMAK Santo Petrus Paniai). Tiga lokasi SMAK tersebut belum bisa dilakukan supervisi oleh Tim Ditjen Bimas Katolik karena keterbatasan anggaran.

Struktur Kurikulum SMAK

Sejak awal berdirinya, SMAK sudah mengambil model Madrasah Aliyah pada Agama Islam dimana kurikulum yang diterapkan merupakan perpaduan antara ilmu agama dan ilmu umum. Ini merupakan salah satu bentuk nyata pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan sebagaimana tercantum dalam bab III, pasal 10 poin (2) yang berbunyi: "Penyelenggaraan pendidikan ilmu yang bersumber dari ajaran agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memadukan ilmu agama dan ilmu umum/keterampilan terutama bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik pindah pada jenjang yang sama atau melanjutkan ke pendidikan umum yang lainnya pada jenjang berikutnya".

Selain itu, ***pada satuan pendidikan SMAK diterapkan juga beberapa jurusan/peminatan seperti Jurusan/Peminatan IPA, Jurusan/Peminatan IPS, Jurusan/Peminatan Bahasa, dan Jurusan/Peminatan Keagamaan.***

Model sekolah keagamaan dengan struktur kurikulum yang ada peminatan-peminatan seperti inilah ***yang diharapkan oleh Gereja Katolik*** yang menghendaki agar para peserta didik tidak hanya menguasai ilmu-ilmu agama melainkan juga menguasai ilmu-ilmu profan lainnya yang dibutuhkan dalam hidup. Karena itu pihak Gereja Katolik (Keuskupan) sangat antusias untuk mendirikan SMAK di wilayahnya masing-masing, karena lulusan SMAK bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dengan kuliah di perguruan tinggi umum dan perguruan tinggi swasta. Contoh: persebaran lulusan SMAK Bhakti Luhur Malang Tahun Pelajaran 2013/2014 s.d Tahun Pelajaran 2015/2017: Siswa-siswi SMAK melanjutkan ke STIPAR Ende, STIKES Malang, STIKES Bandung, UNMER Malang, STKIP Ruteng, STP IPI Malang, bahkan ada beberapa orang yang lulus di Perguruan Tinggi Negeri. Bagi lulusan SMAK yang tidak dapat melanjutkan ke Perguruan Tinggi, ijazah yang mereka miliki dapat digunakan untuk melamar pekerjaan sehingga mereka bisa bekerja, misalnya: Menjadi tenaga pastoral di Paroki, bekerja sebagai karyawan Bhakti Luhur Malang, karyawan Bhakti Luhur Surabaya, karyawan Bhakti Luhur Kalimantan Barat, Petugas Pastoral di Gunung Sitoli–Nias, Guru SLB Dieng Malang, menjadi pengusaha, dll, bahkan ada lulusan SMAK Maria Mediatrix Langgur yang lokasinya berada di daerah tertinggal dan terpencil, lulusannya menjadi lurah desa.

Bantuan Operasional DITJENBIMAS Katolik Bagi Penguatan SMAK

Untuk kelancaran penyelenggaraan SMAK yang berada di bawah pembinaan Kementerian Agama c.q. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, maka Ditjen Bimas Katolik telah berupaya menyiapkan sejumlah anggaran dalam rangka ***pemenuhan terhadap Delapan Standar Nasional Pendidikan***. Untuk itu berbagai ***perangkat*** telah terbit berupa Pedoman Pendirian dan Pembinaan SMAK, Petunjuk Teknis Pendirian SMAK, Pedoman Pemberian Nomor Statistik Sekolah Menengah Agama Katolik, Struktur Kurikulum SMAK, Pedoman Pengawasan SMAK, dan Pedoman Penyelenggaraan Ujian Nasional SMAK.

Selain itu Ditjen Bimas Katolik juga memberikan ***pembinaan bagi Para Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan*** SMAK, seperti: Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Dana Bantuan SMAK, Bimbingan Teknis Tenaga Operator Data SMAK, Bimbingan Teknis Penyusunan Soal Ujian Nasional SMAK. Penyusunan Silabus Mata Pelajaran Keagamaan SMAK, Penyusunan Bahan Ajar Mata Pelajaran Keagamaan SMAK, Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi SMAK, dll. Dari sekian banyak jenis pembinaan dalam bentuk kegiatan hanya 2 yang terlaksana, karena ada kebijakan terkait dengan penghematan anggaran secara nasional oleh Pemerintah.

Untuk ***penguatan sarana dan prasarana*** DITJENBIMAS Katolik menyiapkan anggaran bantuan untuk pembangunan gedung SMAK yang berada di daerah tertinggal. Bantuan pembangunan gedung ini dilekatkan pada DIPA SATKER Daerah, tujuannya adalah agar pelaksanaan anggaran lebih efektif dan efisien, dan untuk memudahkan proses pelaksanaannya. Tahun anggaran 2016 terdapat dana Rp. 2.650.000.000,- yang di lekatkan pada DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende – Nusa Tenggara Timur, untuk membantu pembangunan gedung SMAK Santo Thomas Morus Ende. Pembangunan sudah dimulai melalui pelelangan umum sejak bulan Maret Tahun 2016 dan rencananya pembangunan gedung selesai akhir September 2016, dan akan diresmikan pada awal bulan November 2016.

DITJENBIMAS Katolik juga memberikan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) SMAK dengan dana Rp. 1.536.049.000,- dana tersebut terbagi untuk 23 SMAK. Jika dilihat dari kebutuhan SMAK, tentu dana yang ada masih sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh SMAK. Anggaran tersebut cair pada bulan Juni tahun 2016. Dengan harapan, dengan bantuan tersebut para SMAK terbantu untuk peningkatan kualitas Tenaga pendidik, tenaga kependidikan, maupun peserta didik, juga untuk biaya operasional SMAK.

Dalam rangka memenuhi Program Nasional terkait dengan peserta didik yang kurang mampu, maka DITJENBIMAS Katolik menyiapkan anggaran untuk Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar, dengan quota 815 anak dengan anggaran Rp. 815.000.000- Sampai dengan awal bulan Oktober dana tersebut sudah cair Rp. 803.000.000,- Sisanya Rp. 12.000.000,- sedang dalam proses, karena permasalahan rekening.

Lembaga Pendidikan SMAK berdirinya belum lama, kurang lebih 3-4 tahun yang lalu, atau sedang dalam rintisan. Jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain, SMAK ini masih sangat muda. Tentu banyak kendala yang dihadapi. Dari 25 SMAK, terdapat 14 SMAK lokasinya berada di daerah 3 - T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar/ Perbatasan).

Kondisi lokasi yang sulit, sehingga membutuhkan waktu, tenaga, dan juga biaya yang tidak sedikit untuk memajukan sekolah-sekolah tersebut. Sesuai dengan Program Pemerintah yang terkenal dengan Nawacita Untuk Rakyat Indonesia, salah satunya adalah Membanguan Indonesia dari Pinggiran Dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan, maka DITJENBIMAS Katolik ***akan hadir*** untuk mewujudkan Program Pemerintah untuk pembangunan infrastruktur akses pendidikan SMAK yang berada di daerah 3 - T. Wujud kehadiran Bimas Katolik adalah dengan merencanakan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana SMAK Tahun 2017. Dengan harapan agar SMAK-SMAK memiliki gedung sendiri, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Ada masyarakat Katolik, Tokoh-tokoh Agama Katolik, Lembaga - Lembaga Katolik yang belum mengenal tentang Pendidikan Keagamaan Katolik. Apa itu SMAK? Dan apa isi didalamnya? Dibutuhkan waktu dan biaya untuk sosialisasi Regulasi terkait dengan Pendidikan Keagamaan, seperti PP 55 Tahun 2007, PMA 54 tahun 2014, dll.

Kendala teknis lainnya ada pada Sumber Daya Manusia terbatas, Sumber belajar/bahan ajar belum lengkap, sarana dan prasarana terbatas, sementara anggaran yang tersedia kadang-kadang ada pemotongan atau efisiensi, sehingga Bimas Katolik belum bisa memberikan pelayanan yang maksimal untuk masyarakat katolik.

Hal pertama yang perlu dibangun dalam melaksanakan tugas adalah ***kepercayaan***. Pemimpin itu harus bisa dipercaya dan harus percaya pada apa yang dilakukan oleh anak buah. Kepercayaan itu mahal harganya. Maka ketika kita diberi kepercayaan untuk mengemban tugas, ya mari kita laksanakan dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, dengan harapan hasilnyapun akan baik untuk organisasi kita. Seorang pemimpin itu harus berintegritas: Disiplin, jujur, tertib, kerja keras, kerja tuntas, kerja ikhlas.

"Hal pertama yang perlu dibangun dalam melaksanakan tugas adalah kepercayaan.
Pemimpin itu harus bisa dipercaya dan harus percaya pada apa yang dilakukan oleh anak buah.
Kepercayaan itu mahal harganya."

~Yustina Srini~

melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan PMA Nomor 42 Tahun 2016 tentang OTK, khususnya pasal 600, 601, 602, dan 603. Subdirektorat pendidikan tinggi tugasnya adalah melaksanakan *penyiapan* perumusan, *koordinasi* dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis *dan evaluasi*, serta evaluasi di bidang pendidikan tinggi *ke*agama*an* atolik (Psl 600). Sementara fungsinya adalah penyiapan semua hal yang berkait dengan pelaksanaan tugas dimaksud. Yakni, 1) penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan tinggi keagamaan katolik, 2) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan tinggi keagamaan katolik, 3) penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dan bidang pendidikan tinggi keagamaan katolik, dan 4) penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang pendidikan tinggi keagamaan katolik (Psl 601).

Strategi kebijakan dalam pemberian **bantuan** dan **pembinaan** terhadap PTAKS.

Kondisi PTAKS, transformasi dari sifat bertahan mempertahankan nilai-nilai tradisional seperti "yg penting aman" ke sikap berani menerima tantangan untuk mencapai cita-cita mulia (visi dan misi PTAKS).

Sejumlah kriteria (sekaligus menjadi referensi) yang digunakan:

a. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
b. PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
c. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
d. PMK Nomor 168 Tahun 2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/ Lembaga
e. PMK Nomor 254 Tahun 2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/ Lembaga.
f. PMA Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama.
g. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
h. Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
i. PMA Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.

Untuk mewujudkan cita-cita dimaksud, maka mengintegrasikan PTAKS dalam dinamika pendidikan nasional menjadi sebuah keharusan, diantaranya pemberian bantuan untuk sarana dan prasarana, bantuan beasiswa untuk mahasiswa dan dosen pada jenjang magister dan doktor, memperkuat keilmuan PTAKS melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, meningkatkan kompetensi dosen melalui sertifikasi dosen, mendorong terwujudnya jabatan akademik dosen, menyediakan anggaran untuk tunjangan profesional dosen. Melaksanakan pemantauan penyelenggaraan pendidikan di PTAKS, antara lain melalui event ujian negara.

Aloma Sarumaha
Kasubdit Pendidikan Tinggi

Tentang Kurikulum

Dewasa ini PTAKS menyelenggarakan 23 Program Studi di 21 PTAKS, tiga diantaranya adalah program magister (teologi di STFK Ledalero Maumere Flores, Keteketik di STP St. Agustinus Pontianak, dan Pastoral di STP IPI Malang). Dari 23 Program studi dua yang berstatus akreditasi B, yaitu Prodi S1 PPAK STP Tahasak Danum Pambelum Palangkaraya dan Prodi S2 teologi STFT Ledalero, lainnya akreditasi C. Peningkatan peringkat akreditasi menjadi salah satu target yang harus dicapai, minimal B di tahun 2020. Untuk memperoleh peringkat B, maka Pemerintah melalui Ditjen Bimas Katolik meningkatkan pendampingan teknis. Seiring dengan usaha untuk meningkatkan peringkat akreditasi prodi, PTAKS juga mempersiapkan diri untuk akreditasi perguruan tinggi (institusi) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, untuk memasuki persaingan kawasan, maka PTAKS sedang dalam proses menyusun kurikulum yang dikenal dengan Kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Kurikulum KKNI diharapkan sudah mulai diterapkan pada tahun akademik 2017/2018. Kurikulum KKNI adalah kurikulum yang berusaha menyesuaikan diri dengan tuntutan dunia kerja.

Pada level PTAKS adaptasi ini tidak selalu mudah, tetapi harus dilaksanakan. Pendidikan kemandirian hidup untuk PTAKS menjadi aspek kajian yang serius, yakni bagaimana sarjana keagamaan Katolik mampu berkontribusi dalam pembangunan nasional. Kurikulum KKNI menjadi ruang bagaimana lulusan PTAKS menemukan eksistensinya (bdk PP 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja).

Dasar hukum yang digunakan adalah:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
b. Perpres Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
d. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
e. Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

Saat ini PTAKS sudah terintegrasi dengan data nasional perguruan tinggi. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pada pasal 56 dikemukakan bahwa pangkalan data pendidikan tinggi merupakan kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional, disingkat PDDikti. Salah satu fungsi PDDikti adalah sumber informasi bagi lembaga akreditasi untuk melakukan akreditasi program studi dan perguruan tinggi. Jadi PTAKS seluruhnya sudah memiliki pangkalan data online. Dengan demikian, PDDikti menjadi kriteria dalam menilai sebuah perguruan tinggi memenuhi syarat atau tidak. Misalnya untuk memantau keadaan PTAKS, informasi mengenai dosen tetap (NIDN) dapat dilihat dalam Forlap Dikti. Semua ikhwal penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan Katolik dapat diakses di PDDikti.

Untuk memperkuat eksistensi data dan informasi dalam PDDikti, maka Ditjen Bimas Katolik menganggap perlu membentuk tim kerja, dikenal dengan nama Tim Pengolah Data PTAKS. Tim tersebut akan kerja sama dengan operator di tiap PTAKS, termasuk verifikasi dan validasi data.

Tenaga Pengajar PTAKS

"Bagaimana dengan SDM dosen pada PTAKS?" karena digantung; butuh waktu tersendiri untuk mengerti hal apa yang hendak diketahui. Namun, saya mengandaikan bahwa ingin diketahui berapa jumlahnya dan seperti apa status mereka dalam konteks penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan.

Saat ini jumlah dosen PTAKS 606 orang, terdiri dari dosen tetap (NIDN) 226 orang dan dosen tidak tetap 380 orang. Dosen tersebut menjadi kekuatan untuk melayani 3.167 mahasiswa (data September 2016). Semua dosen sudah bergelar magister, dan beberapa diantaranya sedang mengikuti pendidikan doktoral di beberapa perguruan tinggi dalam negeri. Selain itu terdapat beberapa calon dosen tetap sedang mengikuti pendidikan magister di STP St. Agustinus Pontianak, STP IPI Malang dan STFK Ledalero Maumere. Pemenuhan tenaga dosen masih jauh dari harapan. Sementara ini PTAKS baru sampai di level pemenuhan dosen minimal 6 orang ber-NIDN, seharusnya lebih dari 6 orang. Untuk itu tiap PTAKS menyusun rencana kerja untuk memenuhi kebutuhan dosen tetap. Di depan sudah dikemukakan bahwa dosen PTAKS mengikuti sertifikasi dosen untuk memenuhi persyaratan kompetensi. Dosen yang mengikuti sertifikasi dosen adalah dosen yang sudah memiliki NIDN, memiliki jabatan akademik dosen minimal asisten ahli setelah inpassing. Pada tahun 2015 23 orang dosen PTAKS lulus sertifikasi dengan perguruan tinggi penyelengara UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan pada tahun 2016 sebanyak 59 orang mengikuti sertifikasi dosen dengan perguruan tinggi penyelenggara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tuntutan utama dosen adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Output PTAKS diwakili oleh program studi. Program studi menjadi leading sektor untuk menghasilkan sarjana keagamaan katolik yang kualified, sesuai dengan standar yang ditetapkan. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dengan tegas mengemukakan bahwa program pendidikan dilaksanakan melalui program studi (Pasal 33). Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi (psl 1 angka 17). Untuk memastikan kualitas program studi, maka wajib diakreditasi secara berkala (pasal 33 ayat [5] dan [6]). Jika tidak maka dapat dipenalti oleh otoritas berwenang sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, dan Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi.

Bicara kesejahteraan serta merta pikiran itu ke hal yang bersifat ekonomi. Padahal kalau dicermati dengan baik, kesejahteraan itu cakupannya luas. Ada yang dinamakan dengan kesejahteraan sosial, artinya kalau dikaitkan kompetensi sosial, maka kesejahteraan sosial ingin menggambarkan bagaimana seseorang individu mampu hidup di tengah masyarakatnya dengan baik, menciptakan kehidupan harmonis, tidak malah suka berkonflik dengan berbagai modus dengan lingkungannya. Dikenal juga kesejahteraan psikologis, yang menggambarkan perilaku seseorang dalam berinteraksi dengan dunianya (makro dan mikro). Bagaimana seseorang mengungkapkan sesuatu juga dapat mewakili situasi psikologisnya. Maka dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang

dosen, disebutkan dosen adalah pendidikan profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Karena itu dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (psl 1 dan 2, jo UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, psl 45). Untuk memperoleh kesejahteraan dimaksud maka dosen dilibatkan dalam rangkaian aktivitas yang mensupport, diantaranya penelitian dosen, bantuan beasiswa, pertemuan-pertemuan pembinaan yang diselenggarakan oleh Ditjen Bimas Katolik.

Terkait dengan kesejahteraan dosen yang bersifat ekonomi, Pemerintah memberikan penguatan melalui sertifikasi dosen PTAKS. Setelah selesai dan lulus sertifikasi dosen, maka dosen mendapat tunjangan profesi dosen. Dalam PMK Nomor 164 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor, dikemukakan bahwa tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada dosen yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya (psl 1 angka 4).

Karena dosen PTAKS adalah bukan pegawai negeri sipil, maka dikemukakan tunjangan profesi dosen bukan pegawai negeri sipil diberikan setiap bulan sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja dan kualifikasi akademik yang berlaku bagi dosen PNS (psl 8 ayat [2]). Pada tahun 2015 dosen PTAKS yang lulus sertifikasi 23 orang, sudah menerima tunjangan profesi dosen tahap I (Juli-Desember 2015). Pelaksanaan tunjangan profesi dosen dilakukan dalam dua tahap sesuai dengan periode semester tahun akademik. Tahap II (Januari-Juni 2016) sedang dalam proses. Diperkirakan bulan November 2016, TPD tahap II sudah terlaksana.

Grand Design Pembinaan PTAKS

Dengan bertitik tolak dari visi dan misi Ditjen Bimas Katolik, Bimas Katolik adalah mitra kerja Gereja Katolik dalam membangun iman dan moral Katolik yang semakin kuat di tengah arus perkembangan iptek dan seni. Kalau bicara grand design, dalam besarannya, Bimas Katolik selalu melibatkan Gereja Katolik dalam hal bagaimana mengembangkan PTAKS. PTAKS adalah milik Gereja Katolik. Maka pelibatan Gereja Katolik yang terwakili dalam (misalnya) Yayasan menjadi penting. Pada tahun 2016 sudah dirancang pertemuan Bimas Katolik, PTAKS dan Yayasan PTAKS, tetapi karena pertimbangan situasi nasional, maka rencana itu ditunda. Hal lain terkait dengan *grand design* adalah pembangunan bertahap, diawali dengan:

"Sebagai orang beriman, kita diingatkan agar membangun harapan yang positif.
Kita selalu berharap bahwa apa yang kita nantikan akan menjadi sebuah kenyataan yang membahagiakan."
~Aloma Sarumaha~

Tujuan Pembangunan Bidang Agama

1. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama dengan sasaran meningkatnya kualitas dan ketersediaan bimbingan dan fasilitas keagamaan.
2. Pengukuhan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis sebagai salah satu pilar kerukunan nasional dengan sasaran meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama

Visi Dirjen BK

Terwujudnya masyarakat Katolik yang seratus persen katolik dan seratus persen pancasilais dalam negara yang berbhinneka tunggal ika

Misi Dirjen BK

Mengajak masyarakat Katolik untuk berperan serta secara aktif dan dinamis dalam mencapai tujuan pembangunan bangsanya

Indikator:

Seratus persen Katolik
Aspek agama : Aktif (teratur) menjalankan kewajiban agama minggu dan hari lain yang ditetapkan oleh lembaga agama, memiliki nama baik.

Seratus persen pancasilais
Aspek sosial : Terlibat dalam kehidupan bermasyarakat (mis. siskamling, kerja bakti, bencana alam), solider, menjadi promotor kebersihan lingkungan, dialog-dialog dalam masyarakat.

Dalam konteks **Subdit Pendidikan Tinggi**.

Dua sasaran (instrumen) pencapaian:

1. **Pendidikan Agama Katolik**, di Perguruan Tinggi Umum. Perguruan Tinggi berorientasi menghasilkan sarjana yang berwawasan luas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni.

   Dalam konteks ini maka yang menjadi fokus pendidikan tinggi adalah:

   a. **Mahasiswa** dan **kelompok mahasiswa** yang tergabung dalam keluarga mahasiswa Katolik (KMK). Hal yang dapat dilakukan adalah memberikan bantuan kegiatan keagamaan agar semakin mampu mempertahankan imannya dan bertumbuh dewasa di tengah pluralistik (agama, budaya, etnik, aliran politik).

   b. **Dosen** pendidikan agama Katolik (status tidak tetap). Hal yang dapat dilakukan adalah pembinaan penguatan proses belajar kuliah agama Katolik di perguruan tinggi. Mengajar matakuliah agama katolik tidak dapat disamakan saja dengan mengajar matakuliah lain.

   c. **Kurikulum** Pendidikan Agama Katolik di Perguruan Tinggi Umum. Hal yang bisa dilakukan adalah revitalisasi atau penyusunan kurikulum pendidikan agama Katolik di perguruan tinggi umum. Perubahan atau perkembangan iptek dan seni mensyaratkan semua elemen mengikutinya dengan arif. Termasuk di dalamnya kurikulum pendidikan agama katolik di perguruan tinggi, perlu memperhatikan gejala sosial mutakhir.

   d. **Sarana** belajar kuliah agama Katolik di perguruan tinggi umum. Hal yang bisa dilakukan adalah penyediaan sarana dalam bentuk buku keagamaan lainnya sebagai rujukan mahasiswa dalam upaya membulatkan pemahamannya mengenai agama Katolik.

2. **Pendidikan Keagamaan Katolik**, tingkat perguruan tinggi: PTAKS. Perguruan Tinggi Agama Katolik Swasta tujuan jauhnya adalah menghasilkan tenaga gerejani yang ahli di bidang keagamaan katolik dengan seperangkat keterampilan tertentu sejalan dengan kemajuan iptek dan seni. Ajaran Agama Katolik harus mampu diterjemahkan dalam dunia yang semakin maju dan mandiri dengan sejuk untuk meningkatkan kohesitas sosial.

   Fokus perhatian adalah:

   1) Lembaga PTAKS.

   Keberadaan PTAKS harus kuat, akuntabel, transparan, dinamis. Di belakang PTAKS ada Yayasan yang kuat. Kerja sama antara Yayasan dan PTAKS menjadi syarat untuk maju dan mandiri. Yayasan dan PTAKS harus memiliki strategi pengembangan yang memadai, termasuk di dalamnya strategi pemasaran program studi. Maka standar penyelenggaraan harus mengikuti ketentuan yang berlaku dan ketat. Mengejar nilai **akreditasi** tinggi (prodi dan institusi) harus menjadi impian setiap insan di PTAKS dan Yayasan.

Aktivitas yang dapat dilakukan adalah penguatan kerja sama antara PTAKS dan Yayasan yang dimediasi oleh Pemerintah cq. Ditjen Bimas Katolik, diantaranya penguatan penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan yang berkualitas dengan peningakatan pengelolaan keuangan yang akuntabel, melakukan pendampingan profesional ke PTAKS.

2) Tenaga dosen dan tenaga kependidikan.

Perguruan tinggi semakin terjamin jika didukung oleh tersedianya dosen yang berkualitas dan memiliki komitmen yang tinggi. Kualitas dosen antara lain diukur dengan kualifikasi minimal magister dan memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan diri melalui peningkatan mutu proses belajar mengajar, riset dan pengabdian kepada masyarakat. Pada tahap awal, pemenuhan dosen berkualifikasi magister minimal 6 orang, sudah tercapai. Tetapi, itu tidak cukup, diharapkan tiap PTAKS memiliki setidaknya 15 orang dosen tetap ber-NIDN, dan pada tahun 2020 diharapkan 5 diantaranya sudah berkualifikasi doktor.

Hal yang bisa dilakukan untuk mencapainya adalah:

a. Menyiapkan bantuan untuk beasiswa S2 dan S3 untuk dosen PTAKS (tahap awal dalam negeri, ke depan akan diper-timbangkan luar negeri).

b. Menyiapkan bantuan untuk penelitian dosen PTAKS dalam rangka menempatkan Agama sebagai landasan etik, moral, dan spiritual bagi pembangunan nasional.

c. Pembinaan kemampuan dosen agar semakin profesional dalam mengelola proses pembelajaran.

d. Memfasilitasi dosen agar semakin mampu membuat karangan ilmiah sampai tingkat jurnal terakreditasi nasional dan internasional.

e. Mengikutsertakan dosen PTAKS dalam sertifikasi dosen nasional.

f. Memfasilitasi proses inpassing untuk memperkuat jabatan akademik dosen sesuai ketentuan yang berlaku.

g. Menyediakan tunjangan profesi dosen sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain dosen, tidak kalah penting adalah tenaga kependidikan. Aturan mengatakan kualifikasi tenaga kependidikan minimal SLTA, tetapi dalam dunia dewasa ini tidak tertutup kemungkinan memiliki tenaga kependidikan berkualifikasi sarjana. Selain itu tenaga kependidikan diharapkan semakin gairah meningkatkan kualitas diri melalui:

a. Mengikutsertakan tenaga kependidikan untuk memperdalam pengetahuan bidang ilmu tertentu, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan.

b. Mengikutsertakan tenaga kependidikan untuk menguasai teknologi informasi dan terampil mengoperasikan perangkat lunak kompurter.

c. Mengikutsertakan tenaga kependidikan dalam pelatihan mengoperasikan teknologi aplikasi yang disyaratkan oleh Pemerintah, seperti PDDikti, Aplikasi Serdos, Aplikasi BKD.

3) Mahasiswa.

Ketika dikatakan PTAKS orientasinya mendidik sarjana yang ahli dalam bidang keagamaan katolik, maka mahasiswa menjadi fokus perhatian serius. Hal ini dimulai semenjak penjaringan calon mahasiswa. PTAKS didorong untuk melaksanakan mekanisme penjaringan yang bermutu, tanpa harus terganggu dengan jargon IQ. Inteligensi manusia secara prinsip tidak statis, dapat berkembang sejalan dengan rangsangan yang diperoleh. Untuk menghormati kekuatan IQ tidak segala-galanya, maka para ahli mengusulkan agar EQ dan SQ menjadi piranti yang ikut menjadi komponen dalam menjaring dan mengembangkan mahasiswa. Hal yang dapat dilakukan untuk mahasiswa:

a. Menyediakan bantuan beasiswa (yang dalam istilah teknis anggaran: bantuan beasiswa miskin) yang diharapkan dapat membantu mahasiswa untuk tenang belajar.

b. Menyediakan bantuan pembinaan keagamaan mahasiswa melalui organisasi kampus sebagai bagian dari pelatihan hidup bersama, mengembangkan kepekaan sosial untuk pembangunan manusia yang utuh.

c. Mendorong keterlibatan mahasiswa dalam event tertentu, seperti pertemuan nasionalyang mendiskusikan soal kepemimpinan, lomba paduan suara gerejani antar PTAKS atau antara Perguruan Tinggi Keagamaan tingkat lokal, regional, dan nasional.

d. Mengikutsertakan mahasiswa dalam pelatihan kemandirian hidup.

4) Sarana

Dua sarana yang dianggap penting mendapat perhatian, yaitu kurikulum dan gedung serta perabotannya.

a. Kurikulum.

Sejalan dengan kemajuan zaman, dewasa ini dikenal term MEA. Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) telah menyepakati kriteria seseorang dapat berpartisipasi dalam pembangunan kawasan. Kriteria tersebut distrukturkan dalam Perpres Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang di Perguruan Tinggi diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 73 tahun 2013.

b. **Gedung dan perabotannya**.

- **Bangunan baru**. Gedung STP sesungguhnya adalah bagian dari urusan penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan. Bangunan baru berarti seluruh aktivitas baru akan dimulai, termasuk penambahan ruang kuliah baru, atau ruang lain yang vital. Dalam hal ini Pemerintah dapat memberikan bantuan dalam bentuk pengadaan gedung baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- **Bangunan belum selesai**. Dalam hal ini ada bagian-bagian tertentu yang belum selesai dikerjakan karena faktor terbatasnya biaya; kalau dilihat dalam keseluruhan bangunan sudah mencapai ≥ 50%. Pemerintah dapat memberikan bantuan dalam bentuk pengadaan gedung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- **Rehab gedung**. Dalam hal ini bangunan sudah selesai dan sudah digunakan kurang lebih 3 tahun. Digunakan masa 3 tahun dengan pertimbangan bangunan gedung kualitasnya sesuai standar, namun misalnya cat tembok sudah mulai pudar atau hancur karena kondisi lingkungan setempat, atau pembetulan pagar, penggantian pintu. Misalnya di daerah pesisir atau kadar garam tinggi, cat tembok akan cepat melepuh, atap seng akan cepat berkarat. Dalam hal ini Pemerintah dapat memberikan bantuan rehab sesuai dengan ketentuan yang belaku.
- **Perabotan STP**. Maksudnya peralatan yang membantu proses pembelajaran, seperti meja ruang kuliah/dosen, kursi, infocus, white board, laptop, komputer PC, genset. Pemerintah dapat memberikan bantuan pengadaan barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- **Buku Penunjang**. Untuk mendukung proses pembelajaran yang semakin tinggi kualitasnya, maka sarana seperti pengadaan buku pustaka dianggap perlu. Maka yang dapat dilakukan adalah pengadaan buku penunjang. Pemerintah dapat memberikan bantuan pengadaan buku sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk memperoleh sarana sebagaimana dimaksud di atas memiliki mekanisme yang harus dipatuhi oleh pihak terkait. Mekanisme tersebut lebih fokus pada penyiapan dokumen permohonan dimana ditemukan kebutuhan dimaksud, dan mekanisme pengadaan barang yang mengacu pada ketentuan yang berlaku, didasari oleh kontrak atau MoU. Setiap PTAKS diharuskan memahami regulasi yang berlaku, terutama terkait dengan isu kebutuhan.

Seputar Proses penegerian

a. Pertama, kita perlu membangun jalan pikir positif bahwa sesuatu yang dimulai dengan niat baik, akan mendapatkan hasil yang baik. Kita berjuang untuk selalu optimis. Ragamnya aktivitas untuk mencapai target tidak jarang membuat individu atau kelompok atau unit kerja tak berdaya dan cenderung menyerah. Kita tidak boleh menyerah. Sikap menyerah terkadang mengemuka dalam serangkaian ucapan, keluhan, dan sebagainya.

b. Kedua, bekerja dengan banyak orang, apalagi kalau posisi *ego* tidak sedominan *alter*, maka yang perlu dibangun dan dirawat adalah komunikasi (tetap-ajeg) yang santun, supportif dan bermartabat. Selama ini kita telah berusaha untuk selalu komunikasi dengan pihak terkait.

Karena itu ketika kita kaitkan dengan pertanyaan di atas, bagaimana dengan proses penegerian yang sedang berjalan, maka dapat dikemukakan bahwa proses itu masih tetap berlangsung dan kita tetap memantau tanpa harus merasa bahwa sudah situasi darurat. Sebagai orang beriman, kita diingatkan agar membangun harapan yang positif. **Kita selalu berharap bahwa apa yang kita nantikan akan menjadi sebuah kenyataan yang membahagiakan.**

Kedepan, PTAKS sebagai lembaga penyelenggara pendidikan tinggi diharapkan mampu bersaing dengan dunia global. Sebagai organisasi tentu PTAKS sudah menetapkan siapa mengerjakan apa dalam konteks pengembangan lembaga pendidikan tinggi keagamaan. Struktur lembaga menjadi kekuatan dasar mau dibawa kemana perguruan tinggi tersebut. PTAKS harus dapat bersanding dengan perguruan tinggi lainnya, entah perguruan tinggi keagamaan dalam lingkup Kementerian Agama, maupun perguruan tinggi lainnya (bukan keagamaan). Saat ini sedang berkembang pendidikan kemandirian atau kewirausahaan. PTAKS didorong untuk secara bijaksana mengintegrasikan diri dengan kebutuhan dunia kerja. Pendidikan keagamaan yang berorientasi pada bagaimana memahami realitas rohani akan semakin kuat bila ditunjang oleh elemen yang menyertainya, yakni realitas jasmani. Maka misalnya Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi harus dijabarkan sesuai dengan kondisi PTAKS.

Catatan Redaksi:

Surat Menpan No. B/3982/M.PAN-RB/12/2016 Tanggal 7 Desember 2016 perihal Pendirian Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak sudah keluar. Selamat!

Secara khusus, PTAKS adalah "jembatan" atau katalisator antara Negara atau Pemerintah dan Gereja. Posisi PTAKS sangat bagus untuk menjadi "jembatan penyeberang" dalam meng-konkretkan visi dan misi Gereja Katolik dan visi dan misi Pemerintah. Misalnya kesejah-teraan yang diimpikan oleh Gereja Katolik dan Pemerintah harus diolah sedemikian rupa oleh PTAKS yang tercermin dalam struktur kurikulum yang adaptif, proses belajar mengajar, penyiapan dosen yang kompeten, sarana prasarana yang memadai, menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di pasar. PTAKS bukan sekolah calon pegawai. PTAKS sama dengan perguruan tinggi lainnya berfungsi menyiap-kan sarjana yang mampu hidup sesuai dengan tantangan zaman.

Strategi dan upaya yang dilakukan Kepala Subdit Pendidikan Tinggi dalam melayani kebutuhan Umat Katolik di bidang pendidikan, dengan berpedoman pada penerapan lima nilai budaya kerja.

Beberapa waktu lalu, Menteri Agama mencanangkan lima nilai budaya kerja di Kementerian Agama. Hal ini berdampak pada subyek layanan Kementerian Agama, termasuk Ditjen Bimas Katolik. Lima nilai budaya kerja INPRINTAK antara lain menjadi inspirasi bagi PTAKS dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi keagamaan Katolik. Lima nilai budaya kerja dimaksud secara umumnya sebagai nilai-nilai yang bekerja dalam pastoral dasar. Menjadi komplementer dalam pembentukan seorang sarjana pastoral atau sarjana kateketik atau magister kateketik/pastoral/teologi. Penanaman nilai diawali melalui masa perkenalan mahasiswa baru, dilanjutkan dengan penguatan kode etik sivitas akademika. Selama masa pendidikan di PTAKS selain lima nilai budaya kerja, juga ditanamkan spiritualitas pendiri atau spiritualitas pelindung lembaga. Selain itu pada saat melakukan pemantauan ke PTAKS, Ditjen Bimas Katolik memberikan motivasi kepada sivitas PTAKS. Salah satu aktivitas PTAKS adalah pelaksanaan praktek kerja lapangan atau yang dahulu dikenal sebagai Kuliah Kerja Nyata (KKN); sekarang disebut dengan istilah magang. Selama melaksanakan KKN atau PKL, tiap mahasiswa nilai-nilai budaya kerja juga disosialisasikan. Akan halnya dengan Subdit Pendidikan Tinggi, nilai budaya kerja dilaksanakan dalam bentuk membangun moral kerja tim, sejauh sensitifitas individu bekerja dengan baik. Memberikan motivasi dan role model dalam memahami pendidikan tinggi keagamaan secara makro. Lima nilai budaya kerja diarahkan ke bagaimana menciptakan persaingan secara sehat dan moderat. Maka setiap pegawai Subdit Pendidikan Tinggi dituntut untuk semakin profesional sesuai dengan latar belakang ilmu. Mencari, menemukan, menganalisis informasi yang relevan menjadi target yang diharapkan dihasilkan oleh setiap pegawai. Terutama, pada titik solusi pengembangan.

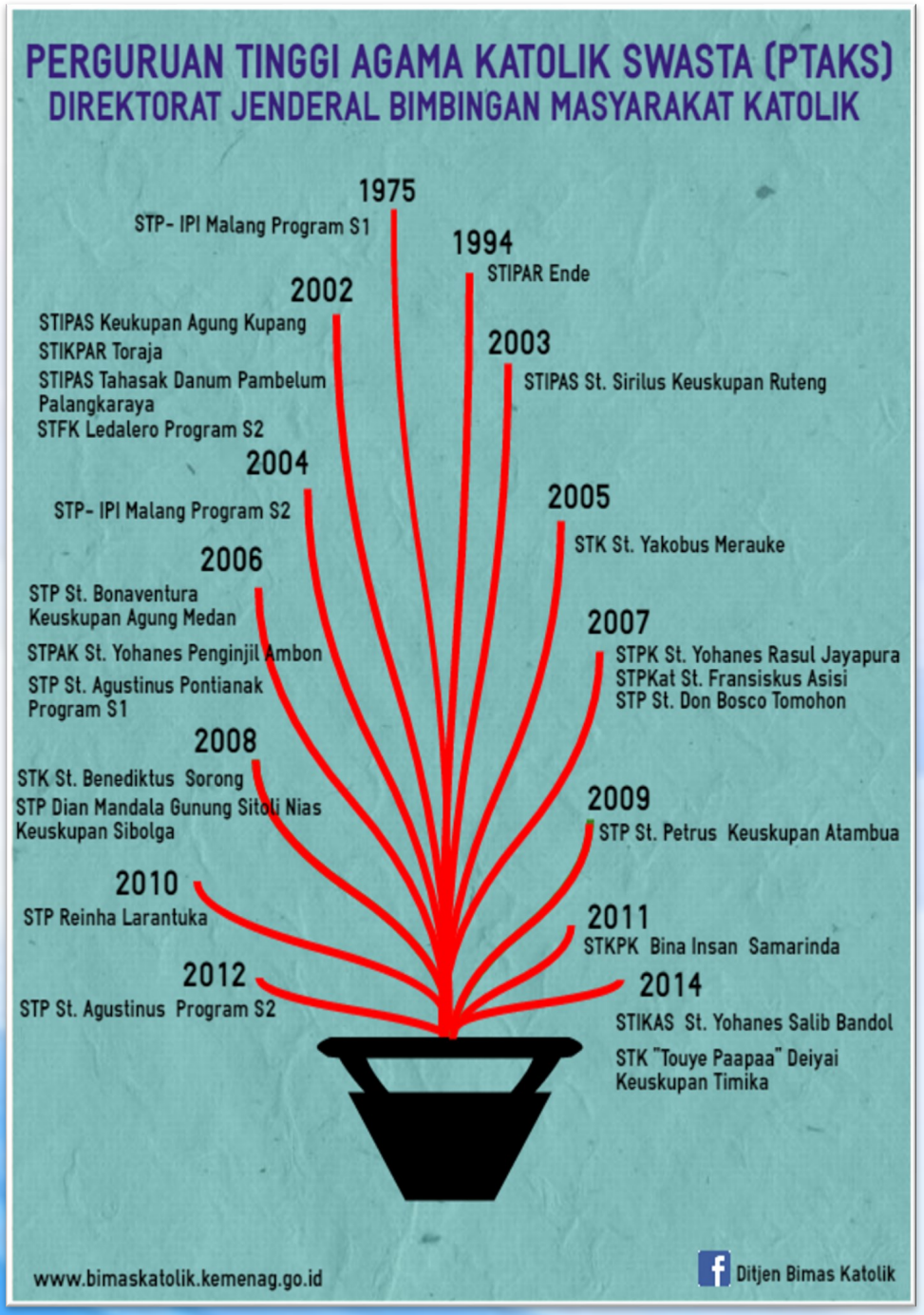

Infografis: Potret Perjalanan PTAKS
Data per Desember 2016

"Kegiatan tahun 2016 berupa pembinaan kompetensi bagi penyuluh PNS dan Non PNS amat bermanfaat bagi penyuluh dalam meningkatkan kualitas penyuluhan"

Basuki Sigit Taruno
Kasubdit Penyuluhan

Penyuluh Agama Katolik PNS dan Non PNS merupakan salah satu unsur penting dalam upaya peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama kepada masyarakat Katolik yang berjumlah kurang lebih 6,9 juta orang (BPS, 2010). Sampai pada Oktober tahun 2016, jumlah Penyuluh Agama Katolik PNS berjumlah 216 orang yang tersebar di seluruh Indonesia dan Penyuluh Agama Katolik Non PNS berjumlah sebanyak 4.800 orang. Peran mereka sangat membantu baik Pemerintah maupun Lembaga Gereja Katolik dalam pembinaan umat.

Penyuluh PNS dan Non PNS yang direkrut Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama berasal dari individu/aktivis keagamaan Katolik dengan latar belakang yang berbeda-beda. Mereka telah melakukan upaya secara mandiri maupun berkelompok dalam meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama yang berisi nilai-nilai ketuhanan dan merupakan kebutuhan dasar setiap umat manusia dan meningkatkan kerukunan antar umat beragama.

Pembinaan yang diselenggarakan Ditjen Bimas Katolik kepada para Penyuluh Agama Katolik PNS dan Non PNS berupa pertemuan pembinaan kompetensi (kepribadian, keterampilan, keahlian) seperti pembinaan karya tulis ilmiah, diklat, bantuan honorarium (khusus untuk Non PNS), penyediaan pedoman/petunjuk teknis di bidang pelaksanaan tugas penyuluhan.

Kontribusi Bimas Katolik: memberikan pembinaan yang dapat meningkatkan kompetensi baik dalam kepribadian, keahlian maupun keterampilan para Penyuluh dalam mengemban tugas sebagai tenaga Penyuluh di tengah masyarakat yang dinamis.

Diklat diadakan dengan bekerjasama dengan Pusdiklat Balitbang Kementerian Agama RI yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi bidang keahlian dan fungsional penyuluhan. Diklat baru pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015 lalu. Direncanakan akan diadakan penyelenggaraan Diklat tiap tahun, namun karena keterbatasan anggaran, maka diklat tidak bisa dilaksanakan setiap tahun.

Yang diberikan kepada Penyuluh Agama Katolik Non PNS adalah bantuan berupa honorarium sebagai bentuk perhatian Pemerintah.

Diharapkan bantuan tersebut dapat memperlancar pelaksanaan tugas penyuluhan. Bantuan tersebut terbatas karena keterbatasan anggaran.

Penyuluh PNS itu merupakan tenaga fungsional di lapangan. Pemberian beasiswa adalah kebijakan pimpinan berdasarkan kebutuhan mendesak organisasi (Bimas Katolik Pusat dan Daerah). Pemberian beasiswa berarti membutuhkan anggaran, sedangkan anggaran Bimas Katolik untuk tugas fungsi agama masih minim

Bantuan honorarium kepada penyuluh Agama Katolik non PNS tahun 2016 sebesar Rp.300.000,- per bulan, diwacanakan (dalam RKA-K/L) bahwa bantuan honorarium penyuluh Non PNS dinaikkan sebesar Rp.200.000,- menjadi Rp.500.000,-. Lumayan dapat membantu memperlancar tugas penyuluhan. Bila dilihat dari UMR, bantuan ini masih jauh dari memadai.

Program yang diadakan tahun 2016

1) Kegiatan Pembinaan kompetensi di bidang Karya Tulis Ilmiah (KTI) bagi Penyuluh PNS dan Non PNS di Yogyakarta dan pembinaan Penyuluh PNS di Kupang.

2) Pengadaan:

A. Kegiatan tahun 2016 berupa pembinaan kompetensi bagi penyuluh PNS dan Non PNS amat bermanfaat bagi penyuluh dalam meningkatkan kualitas penyuluhan dan penyegaran motivasi dalam tugas, sehingga kegiatan pembinaan kompetensi amat baik diteruskan di tahun 2017

B. Pengadaan sarana dan prasarana keagamaan umat Katolik khususnya buku referensi penyuluhan dan buku-buku keagamaan Katolik untuk perpustakaan paroki sangat kurang, maka perlu diadakan di tahun-tahun mendatang.

Bantuan peralatan Misa sangat terbatas untuk para imam yang baru ditahbis, dan peruntukannya selain untuk imam baru, juga didistribusikan kepada paroki/ stasi yang mengajukan permintaan.

Harapan Bimas Katolik: para penyuluh agama Katolik PNS dan Non PNS dapat menjadi barisan terdepan dalam meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama yang berisi nilai-nilai ketuhanan dan merupakan kebutuhan dasar setiap umat manusia dan meningkatkan dialog, sehingga tercipta kerukunan antar umat beragama di seluruh nusantara.

Data Penyuluh PNS valid. Namun data penyuluh non PNS masih belum tertata rapi, karena tiap tahun berubah-ubah. Ditjen Bimas Katolik harus tegas dan jelas dalam memberikan petunjuk teknis perekrutan penyuluh agama Katolik Non PNS agar terukur sesuai dengan tuntutan anggaran berbasis kinerja.

Strategi Kepala Subdit Penyuluhan:

A. Menyiapkan SDM yang inovatif, profesional, bertanggungjawab dan berintegritas dalam melaksanakan tugas baik secara internal maupun dalam melayani kebutuhan umat Katolik secara *maksimal*. Sehingga diharapkan tercipta *"bonum commune"* (kesejahteraan umum) bagi masyarakat.

B. Mengadakan seleksi penyuluh teladan sebagai sebagai aktualisasi lima nilai budaya kerja.

REKAP PENYULUH PNS BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN

GOLONGAN	PENYULUH AGAMA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
II/c	Terampil Pelaksana	0	1	1
II/d	Terampil Pelaksana Lanjutan	1	1	2
III/a	Ahli Pertama	48	5	53
III/b	Ahli Pertama	53	15	68
III/c	Ahli Muda	33	9	42
III/d	Ahli Muda	24	8	32
IV/a	Ahli Madya	13	5	18
JUMLAH		172	44	**216**
JUMLAH PENYULUH NON PNS				**4800**

Data per Oktober 2016

"Menyiapkan SDM yang inovatif, profesional, bertanggungjawab dan berintegritas dalam melaksanakan tugas baik secara internal maupun dalam melayani kebutuhan umat Katolik secara maksimal. Sehingga diharapkan tercipta bonum commune (kesejahteraan umum) bagi masyarakat."

~Basuki Sigit Taruno~

Ansy Lema

*Pengamat Politik
dan Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia-FORMAPPI

Yohanis Fransiskus Lema atau Ansy Lema, lahir di Kupang, NTT 40 tahun silam, yakni 27 Maret 1976. Ansy Lema dikenal sebagai Pengamat Politik Nasional yang kerap tampil di televisi nasional memberikan analisis mengenai reakitas dan dinamika politik nasional. Semasa mahasiswa, Ansy Lema adalah aktivis mahasiswa pendiri Forum Kota (Forkot), sebuah elemen pergerakan mahasiswa yang menumbangkan Soeharto dan rezim Orde Baru kala itu. Sejak tahun 2004 hingga kini, alumnus Program Pascasarjana Departemen Hubungan Internasional FISIP Univeritas Indonesia (UI) ini mengajar di FISIP Universitas Nasional (Unas) Jakarta. Ansy Lema pernah bekerja sebagai presenter (pembaca berita) dan *host* di stasiun televisi milik negara TVRI Nasional, Jakarta sejak 2006-2014. Dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 kali ini, Ansy Lema adalah Juru Bicara Tim pemenangan Ahok-Djarot. Dengan kiprahnya itu, ia termasuk tokoh muda Katolik yang potensial dengan beragam sumbang sarannya lewat media bagi bangsa dan negara.

Bagaimana seorang Pemimpin itu lahir. Apakah perlu dipersiapkan melalui program kaderisasi—kepemimpinan?

Kaderisasi kepemimpinan dibutuhkan untuk melahirkan seorang pemimpin. Kaderisasi yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah sistem pendidikan-pelatihan untuk mendidik, menanamkan nilai-nilai kepemimpinan, sekaligus melatih keterampilan memimpin seorang calon pemimpin. Lewat sistem kaderisasi ini, para calon pemimpin diberikan berbagai materi pendidikan dan pelatihan dengan tujuan membentuk karakter kepribadian seorang pemimpin. Seperti tujuan pendidikan pada umumnya, idealnya silabus pendidikan calon pemimpin menyasar pengembangan aspek kognisi, afeksi dan psikomotorik. Sistem kaderisasi harus mampu melahirkan pemimpin dengan kapasitas-kualitas intelektual yang baik. Kompetensi intelektual dibutuhkan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah berdasarkan pertimbangan nalar. Pemimpin harus visioner, berpikir jauh ke depan, bahkan bisa melampaui jamannya, serta menjadi pemberi arah-orientasi kemajuan. Sejarah transformasi atau perubahan-perubahan besar di dunia dalam konteks apapun senantiasa digerakkan oleh kesadaran kritis. Dalam era modern dewasa ini, kemampuan intelektual diperlukan untuk membantu pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya. Para pendiri Republik, Bung Karno, Bung Hatta, Sjahir, misalnya, adalah para pemimpin dengan kapasitas intelektual hebat. Jika tidak cerdas, mereka tidak mungkin mampu memerdekan Indonesia dan menggagas dasar negara Pancasila. Seorang pemimpin juga perlu diasah aspek afeksinya agar lebih memiliki "hati". Kemampuan kognisi tidak cukup, perlu dilengkapi dengan pengembangan afeksi. Hal ini menyangkut kemampuan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk berdasarkan pertimbangan etika dan moralitas. Selain berpikir logis, pemimpin juga harus bisa bersikap etis. Selanjutnya, pemimpin perlu diajarkan agar memiliki kepekaan dan sikap pro-aktif untuk turun tangan menyelesaikan persoalan kemasyarakatan. Untuk itu, aspek psikomotorik harus dikembangkan. Sekolah kaderisasi ibarat "seminarium" atau wadah pembibitan calon pemimpin.

Pemimpin harus visioner, berpikir jauh ke depan, bahkan bisa melampaui jamannya, serta menjadi pemberi arah-orientasi kemajuan.

Pemimpin wajib memiliki otak dan hati dalam bertindak.

~Ansy Lema~

Pemimpin wajib memiliki otak dan hati dalam bertindak. Otak dan hati sangat diperlukan dalam memimpin. Pemimpin adalah mereka yang memiliki visi jelas, mampu jalankan visi dengan meyakinkan, serta berani mendobrak berbagai halangan dan membuat terobosan bagi kemajuan. Pemimpin adalah pencipta sejarah, arah dan orientasi kemajuan. Pemimpin wajib memiliki kompetensi dan integritas kepemimpinan. Kompetensi menyangkut relasi/hubungan antara pemimpin dengan visi dan kerja/kinerja. Integritas terkait relasi/hubungan pemimpin dengan dirinya sendiri, terutama soal keutamaan nilai-nilai dalam diri pemimpin semisal kejujuran, ketulusan, kepedulian, keberanian dan sebagainya.

Bagaimana peran Gereja Katolik dan DITJENBIMAS Katolik yang turut terlibat dalam mempersiapkan Kepemimpinan Katolik masa depan?

Gereja Katolik dan Ditjen Bimas Katolik bisa berperan dengan cara mendukung berbagai kegiatan kaum muda Katolik yang bertujuan mengembangkan kemampuan memimpin kaum muda. Institusi-institusi ini harus memiliki database mengenai anak muda Katolik, calon pemimpin dari kalangan Katolik agar bisa memberikan perhatian dan dukungan kepada mereka demi mengembangkan kualitas kepemimpinan mereka. Gereja Katolik harus memfasilitasi upaya-upaya melahirkan pemimpin dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Jaringan-jaringan Katolik harus dibuka untuk mendukung kemajuan para calon pemimpin ini. Lebih dari itu, gereja harus terus menyapa mereka, terutama dalam hal memberikan penguatan iman, bahwa memimpin adalah tindakan iman, aktivitas kesaksian yang membutuhkan dasar nilai-nilai kristianitas yang kokoh.

Dengan melihat kondisi bangsa saat itu, yang sedang tumbuh di tengah pergolakan ekonomi—sosial—politik—budaya (agama), bagaimana seharusnya tokoh-tokoh Katolik berperan di dalamnnya? Masih diperlukankah penerapan nilai-nilai kristiani dalam menghadapi kondisi zaman saat ini?

Nilai-nilai kristiani sangat dibutuhkan dalam kehidupan saat ini, bahkan semakin dibutuhkan dalam dunia yang makin modern, namun kerap tanpa hati. Nilai-nilai kristiani adalah dasar, fondasi kepemimpinan kristiani, kepemimpinan yang meniru Sang Guru, Yesus Kristus. Tanpa pegangan iman kristiani, seorang pemimpin mudah diombang-ambingkan, mudah jatuh dan terjerumus ke jalan yang salah. Nilai-nilai kristiani adalah pelindung pemimpin kristiani agar tidak bertindak korup, manipulatif yang menyengsarakan rakyat. Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) adalah contoh pemimpin beragama kristen yang sungguh mencerminkan kepemimpinan kristiani. Hal itu yang membuatnya tidak jatuh dalam sikap pragmatis-oportunis. Kekuasaan adalah media atau sarana untuk melayani, bukan memperkaya diri sendiri dan keluarga. Kita perlu belajar dari Ahok yang menjadikan praktik kepemimpinannya sebagai tindakan iman dan karenanya selalu bertindak sesuai dengan nilai-nilai kristiani, yakni demi keadilan, kemanusiaan dan keaejahteraan. Memimpin adalah melayani. Pemimpin adalah pelayan, bukan tuan yang dilayani. Ahok menampilkan sosoknya sebagai pelayan publik.

Bagaimana idealnya kemitraan yang dibangun antara Pemerintah dan Gereja?

Kemitraan antara gereja dan pemerintah sudah terjalin baik selama ini dan diharapkan bisa terus ditingkatkan dan dikembangkan dalam berbagai aspek. Gereja harus aktif terlibat dalam kerja-kerja kemanusiaan dan keadilan. Gereja Indonesia harus terus memberi pengaruh positif bagi negara dengan cara bekerja sama dengan pemerintah. Kehadiran gereja harus berdampak sosial bagi kemajuan bangsa.

Menurut Anda, apakah kehadiran DITJENBIMAS Katolik, sebagai wakil negara dalam masyarakat Katolik, juga dirasakan manfaatnya oleh umat Katolik? Dalam hal apa?

Tentu Ditjen Bimas Katolik telah banyak melakukan aktivitas mendukung kegiatan kaum muda untuk melahirkan para pemimpin Katolik. Diharapkan dukungan dan perhatian bisa dilakukan secara lebih baik dan merata.

Sebagai mantan aktivis PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia), saya berharap Ditjen Bimas Katolik bisa lebih memperhatikan dan mendukung aktivitas organisasi kepemudaan seperti PMKRI karena di sana para kader Katolik dididik menjadi calon pemimpin.

Di era sekarang, figur kepemimpinan seperti apa yang diperlukan bangsa, sekaligus dapat melindungi warganya dalam menjalankan ibadah keagamaannya?

Teladanilah figur kepemimpinan seperti Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ia adalah figur pemimpin bersih, berani, cerdas, profesional dan berorientasi menghadirkan pelayanan prima bagi warga Jakarta. Banyak pemimpin cerdas atau bersih, namun tidak banyak pemimpin saat ini yang bersih, cerdas, sekaligus berani. Dalam diri Ahok ada tiga karakter itu, bersih, cerdas dan berani. Ahok bahkan berani "pasang badan" untuk melindungi uang rakyat agar bisa digunakan untuk kepentingan rakyat. Kita butuh pemimpin yang bersih, cerdas dan berani untuk melawan para pencuri uang rakyat. Negara hancur karena ulah para koruptor. Dan Ahok berani melawan para koruptor.

Sebagai intelektual Katolik, bagaimana Anda menanggapi kehidupan beragama di Indonesia? Apakah telah berlaku adil dan bagaimana pula peran Negara?

Soal kehidupan beragama masih ada problem. Masih ada warga negara yang belum sepenuhnya bisa menjalankan ibadah agamanya secara bebas dan dilindungi negara, padahal kebebaaan beragama dijamin konstitusi. Negara dibentuk untuk menjamin dan menjaga kebebasan warga negara, termasuk kebebasan menjalankan ajaran agamanya. Namun, dalam menjalankan aktivitas keagaman, sebaiknya umat kristiani tidak perlu terlalu demonstratif. Negara hanya cukup menjalankan amanat konstitusi. Melindungi penganut agama menjalankan ibadahnya dan berani bersikap tegas terhadap para kaum intoleran yang biasa bersikap anarkis dan barbar.

Harapan saya kepada Ditjen Bimas Katolik adalah lebih mendukung aktivitas pengembangan kapasitas kaum muda. Misalnya, dengan menyokong pendidikan kader muda Katolik di paroki-paroki atau yang dilakukan organisasi kepemudaan Katolik. Jangan biarkan kaum muda Katolik berjalan sendiri.

(Maria Masang)

Siaga Menjaga Kebhinnekaan

Indonesian Youth Day (IYD) 2016

Mengusung tema "Orang Muda Katolik Sukacita Injil di tengah Masyarakat Indonesia yang Majemuk", gelaran *Indonesian Youth Day (*IYD) di Manado tanggal 1-6 Oktober 2016 lalu, mengawali parade keberagaman budaya yang dimiliki Indonesia. Dengan semangat merayakan perbedaan ini, momen IYD bertujuan untuk mengajak Orang Muda Katolik untuk semakin menginternalisasi semangat saling menghargai, toleransi, dan kesadaran untuk membangun persaudaraan dalam lingkungan sosial yang inklusif.

Acara berkumpulnya Orang Muda Katolik (OMK) Indonesia yang diadakan selama lima tahun sekali ini, dihadiri oleh 2.386 peserta dari 37 Keuskupan di seluruh Indonesia. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Komisi Kepemudaan KWI (Konferensi Waligereja Indonesia) bersama dengan Keuskupan Manado. Hadir pula, 24 uskup dan duta besar vatikan untuk Indonesia Mgr Antonio Guido Filipazzi, Wali Kota Manado, Wali Kota Sanggau dan beberapa pejabat penting lainnya.

Ketua Komisi Kepemudaan KWI Monsinyur Pius Riana Prapdi, menyatakan *Indonesian Youth Day* merupakan ajang bagi OMK untuk merayakan perbedaan dan mensyukuri kehidupan. Ke depannya, OMK yang mencintai kehidupan maka menjadikan perjumpaan sebagai hal yang penting karena di sana terdapat kerja sama untuk meneruskan kehidupan. Sehingga, terdapat kerelaan untuk saling membantu dan keegoisan diredam. Melalui tema IYD ini pun, semua peserta diajak untuk menjunjung tinggi kebersamaan dengan saling menolong demi kemajuan bersama.

Gerak Jalan Kerukunan Kementerian Agama

Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin membuka kegiatan Gerak Jalan Kerukunan Umat Beragama yang diikuti ribuan peserta, di kawasan *Car Free Day*, Jakarta tanggal 6 November 2016 lalu. Acara tersebut ditujukan untuk dapat merawat kerukujan ummat beragama di Indonesia. Kerukunan adalah sesuatu yang sudah ada di Indonesia sejak dulu. Para perserta pun bersemangat menyusuri jalan MH Thamrin menuju kawasan Patung Kuda, Silang Monas, Jakarta.

Menurut Menteri, adalah hal yang sangat penting bagi seseorang untuk memaknai agamanya.

"Saya sering mengatakan di banyak kesempatan, daripada menggunakan agama untuk menilai tindakan atau perilaku orang lain terhadap kita, lebih baik kita menggunakan agama untuk menjadi dasar bagi kita untuk bersikap kepada orang lain," papar Lukman. Ia pun menambahkan bahwa, Kerukunan sering kali terusik karena seseorang lebih mengedepankan agama untuk menilai perilaku orang lain. "Saya ingin mengajak, agama digunakan sebagai landasan bagi kita untuk bersikap kepada orang lain," ungkap Menteri.

Lukman Hakim ikut berjalan santai bersama anggota organisasi keagamaan. Di antaranya, Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Hikmahbudhi), Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia, dan Pandita Sabha Buddha Dharma Indonesia.

Dalam kegiatan ini, ia pun berharap, gerak jalan ini menjadi upaya yang positif yang bisa memberi dampak untuk membangun suasana kerukunan di bangsa ini. Selain itu, gerak jalan kerukunan umar beragama ini menjadi momentum penting untuk memulihkan dampak psikologis yang muncul akibat beberapa oknum yang tidak bertanggungjawab dalam aksi damai yang sejak awal hingga akhir sudah berlangsung dengan baik dan damai.

Parade Nusantara Bersatu

Apel Nusantara Bersatu di sejumlah daerah, tanggal 30 November 2016, dihadiri dan dimeriahkan ribuan warga dari berbagai kalangan. Selain melakukan upacara bendera, Apel Nusantara Bersatu juga dimeriahkan oleh acara seperti pawai dan pertunjukan musik dan budaya. Tak kurang sejumlah pejabat daerah dan komponen pemerintahan juga turun melaksanakan Apel Nusantara Bersatu.

Di Ibu kota Jakarta, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian menghadiri Apel Nasional Nusantara Bersatu di Monas, Jakarta Pusat. Panglima dan Kapolri menyampaikan orasi kebangsaan di acara apel tersebut, dan beberapa tokoh lain.

Peserta apel sendiri terdiri dari berbagai kalangan. Seperti pelajar, mahasiswa, tokoh lintas agama, budayawan, pejabat publik, musisi, dan artis. Di antara musisi yang hadir ada grup band papan atas Slank meramaikan Apel Nusantara Bersatu. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan Apel Nasional Nusantara Bersatu bertujuan untuk memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa.

Kampanye Toleransi dalam ToleRun 2016

Komunitas *Indo Runners* bekerjasama dengan beragam komunitas lain baru saja mengadakan festival lari bertajuk *ToleRun* di kawasan Senayan, Jakarta, tanggal 20 November 2016. Festival ini digelar untuk mengkampanyekan toleransi di Indonesia. Acara *ToleRun* ini ternyata tak hanya diadakan di Jakarta, namun juga digelar serentak di kota-kota lain oleh cabang-cabang *Indo Runners*. Tercatat, antusiasme peserta sangat besar mencapai ribuan orang.

Menurut pihak penyelenggara, kegiatan berikutnya, tidak menutup kemungkinan acara serupa bakal digelar tiap tahunnya. Itu karena adanya hari toleransi yang jatuh pada 16 November.

Seminar Pendidikan Karakter dan Keragaman Budaya Indonesia

Pendidikan karakter dan pemahaman antar budaya bagi masyarakat, khususnya generasi muda, dalam menyikapi tantangan sosial yang semakin kompleks di Indonesia. Mendukung pernyataan tersebut, diselenggarakan kegiatan Seminar "*Indonesian Education for Prosperity and Peace*" tanggal 19 November 2016 di Jakarta.

Saat ini dunia tengah menghadapi tantangan besar terkait toleransi dan keberagaman – seperti keberagaman budaya, agama, ketimpangan sosial, politik dan krisis ekonomi – di samping tantangan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Asmir Agoes, Ketua Dewan Pengurus Bina Antarbudaya menyampaikan bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin bangsa yang dapat memberikan teladan baik, untuk dapat menjadi contoh bagi generasi muda.

Korupsi yang merajalela, meningkatnya tekanan dan konflik di berbagai daerah merupakan cermin bahwa bangsa ini sedang menghadapi masalah-masalah yang bersumber pada gagalnya pendidikan karakter.

"Untuk menuju bangsa yang cerdas budaya dapat dimulai lewat pendidikan karakter dan interkultural pada kalangan muda, yang merupakan generasi harapan bangsa," ungkapnya.

Generasi ini pun perlu memiliki pemahaman antar budaya dan kemampuan berkomunikasi dengan orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda, sehingga kelak dapat menjadi anggota masyarakat global yang kontributif. Hal ini sejalan dengan fungsi pendidikan nasional di Indonesia, seperti tertulis di Undang Undang no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menadi manusia yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Seminar satu hari ini mengangkat tema-tema diskusi seperti *Diversity* (Keberagaman) dan *Global Citizenship* (Masyarakat Global), dan *Independence* (Kemandirian).

Doa Bersama Untuk Bangsa

Ribuan personel gabungan TNI dan Polri bersama masyarakat mengikuti doa bersama di Monas, Gambir, Jakarta Pusat, tanggal 18 November 2016 pagi pukul 07.00 WIB. Hadir pula dalam acara ini, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian.

Doa bersama di halaman Monas merupakan salah satu titik dari acara serupa yang diadakan TNI-Polri di beberapa lokasi lain seperti Gereja Immanuel Gambir, Gereja Katedral, Gereja HKBP Cililitan, Gereja Kristen Indonesia Kwitang, dan Pura Mustika Dharma Cijantung. Doa bersama ini juga bertujuan untuk meminta pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar perdamaian di seluruh Indonesia terjaga.

"Khusus di halaman Monas yang disiapkan untuk masyarakat beragama Islam akan diadakan Istighosah untuk mewujudkan perdamaian di Indonesia yang wilayahnya sangat luas," demikian keterangan Pusat Penerangan Mabes TNI lewat siaran pers.

Doa bersama TNI-Polri guna terwujudnya keselamatan, kedamaian, persatuan, dan kesatuan bangsa pagi ini dilaksanakan di tujuh lokasi, juga dilaksanakan di Gereja Katedral. Lewat homili saat misa di Gereja Katedral, umat diajak menjaga persatuan dan kedamaian bangsa.
Hal ini disampaikan oleh Romo Christophorus Christiono Puspo S. dalam homili, mengajak umat yang hadir untuk bersyukur atas kesatuan dan persatuan bangsa.

"Kedamaian dan kebersamaan yang masih terus kita rasakan. Pada hari ini kita diajak untuk kembali merasakan syukur dan mohon rahmat atas persatuan dan kesatuan. Sebagai orang seiman, kita menyatakan kembali persatuan bangsa," ucap Christophorus dalam homilinya.

Parade Bhinneka Tunggal Ika

Menjaga ideologi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pemersatu bangsa, menjadi tujuan utamanya diadakannya Parade Bhinneka Tunggal Ika, tanggal 19 November 2016 lalu. Kegiatan yang dibanjiri ribuan peserta tersebut, menampilkan keberagaman budaya, suku, agama serta ras yang dimiliki Indonesia. Antusiasme masyarakat dari berbagai wilayah pun terlihat dengan datangnya warga dari Nias, Kalimantan Barat, Banten, dan Jabodetabek dengan memakai kaus merah-putih dan baju adat.

Adapun sasaran yang dituju dalam aksi damai ini adalah merawat Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan kebinekaan Indonesia, serta mempertahankan pemerintahan yang terpilih secara konstitusional dan menyerukan penegakan hukum yang tidak bisa diintervensi pihak mana pun.

Pihak penyelenggara juga menyampaikan bahwa, parade tersebut merupakan acara yang menggabungkan berbagai elemen masyarakat dengan menyuguhkan aksi damai.

Parade dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB. Kegiatan dimeriahkan acara diantaranya pertunjukan kesenian dari beberapa provinsi di Indonesia, pawai Bhinneka Tunggal Ika, pentas seni, dan doa bersama. Selain itu, pertunjukan kesenian dari beragam etnis dan suku, ada kesenian angklung, reog, tari tor-tor.

Parade Kita Indonesia

Parade Kita Indonesia digelar sepanjang area hari bebas kendaraan bermotor (*car free day*) di sekitar Jalan Sudirman dan M.H. Thamrin, tanggal 4 Desember 2016. Parade ini berpusat di Bundaran Hotel Indonesia. Terdapat 10 panggung kebudayaan yang tersebar di sepanjang jalan Sudirman Thamrin. Tujuan acara ini sendiri adalah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan.

Pagelaran dimeriahkan pula oleh rombongan penampil atraksi dari Provinsi Bali. Mereka berasal dari Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karang Asem. Terdapat delapan puluh bus yang memberangkatkan rombongan dari Bali. Dalam kegiatan ini, para peserta mementaskan kesenian belegajur, khas Bali. Penampilan ini pun untuk menunjukkan kebhinekaan negeri.

Selain parade kesenian warga Bali, ada pula kesenian reog Ponorogo, tarian daerah, serta pembentangan bendera Merah Putih raksasa di tengah massa.

**Maria Masang*

PROYEK PERUBAHAN
PENGEMBANGAN POLA PENDIDIKAN KEAGAMAAN PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN KATOLIK DENGAN MEMBUAT KEBIJAKAN PENDIDIKAN KEMANDIRIAN

Oleh : Eusabius Binsasi
(Dirjen Bimas Katolik)

I. LATAR BELAKANG

Kebutuhan akan tenaga Guru Agama, mendorong Pemerintah dan masyarakat untuk terus memperluas akses Pendidikan Keagamaan dengan mendirikan sekolah-sekolah keagamaan baik Tingkat Dasar, Tingkat Menengah maupun Pendidikan Tinggi.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 (PP 55 tahun 2007) tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan ditetapkan sebagai suatu bentuk perhatian Pemerintah terhadap peningkatan akses Pendidikan Agama dan Keagamaan di seluruh tanah air Indonesia. Menanggapi Peraturan Pemerintah tersebut Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik terus mendorong dan memfasilitasi Lembaga Keagamaan Katolik untuk mendirikan sekolah-sekolah Keagamaan Katolik Tingkat Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.

Bedasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 325 Tahun 2002 dan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 439 Tahun 2003 Lembaga Keagamaan Katolik telah mendirikan 23 Perguruan Tinggi Agama Katolik Swasta (PTAKS) yang semuanya berada di bawah Bimbingan Kementerian Agama dalam hal ini Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik. Semua Lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan Katolik tersebut masih berupa Sekolah Tinggi yang menerapkan Program Studi Pendidikan Agama Katolik. Oleh karena itu, *output* Sekolah Tinggi tersebut pada umumnya bekerja sebagai Guru Agama Katolik di Sekolah baik pada jenjang Pendidikan Dasar maupun pada jenjang Pendidikan Menengah.

Dalam perkembangannya, *output* Sekolah Tinggi Agama Katolik ternyata terserap juga diberbagai bentuk lapangan kerja seperti dunia usaha atau industri dan usaha-usaha kemandirian lainnya seperti berwiraswasta.

Sementara itu, selama mengikuti pendidikan, hampir seluruh mata kuliah yang dipelajarinya adalah yang berkaitan dengan Pendidikan Agama. Selain itu, kenyataan di sekolah-sekolah, bahwa cukup banyak juga *output* Pendidikan Tinggi Keagamaan Katolik yang bekerja sebagai Guru Agama honorer atau sering disebut juga Guru Agama Sukarela yang sangat tidak memadai dengan imbalan yang diterimanya, sehingga disamping mengajar di sekolah mereka juga harus bekerja mandiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Padahal pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki adalah hal-hal yang berkaitan dengan Pendidikan Agama dan hampir tidak mempunyai pengetahuan dan ketrampilan yang berkaitan dengan usaha-usaha mandiri.

Kenyataan ini memberi inspirasi bagi kami untuk membuat suatu Proyek Perubahan dengan suatu Kebijakan Pendidikan Kemandirian di semua Perguruan Tinggi Agama Katolik melalui Pendidikan Ekstra Kurikuler, Magang di Perusahaan atau Industri serta Seminar, *Forum Group Discussion* (FGD), Kajian, Lokakarya, dan lain sebagainya. Hal ini dimaksudkan untuk memberi bekal pengetahuan dan keterampilan serta membuka wawasan berpikirnya akan dunia usaha/industri dan usaha-usaha mandiri lainnya.

Dengan demikian diharapkan akan terbuka lebih banyak peluang untuk memperoleh pekerjaan bagi *output* Pendidikan Tinggi Keagamaan Katolik tanpa menghamabat tujuan utama Pendidikan Tinggi Keagamaan Katolik untuk menyiapkan kebutuhan akan Guru Agama Katolik di Sekolah.

II. GAGASAN PERUBAHAN

Inspirasi sebagaimana kami kemukakan dalam Latar Belakang Proyek Perubahan di atas, didasarkan pada Kondisi riil para *output* Guru Agama Katolik sekarang yakni:

1. Tidak semua *output* Perguruan Tinggi Agama Katolik berprofesi sebagai Guru Agama, baik Guru Agama sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Guru Agama Swasta.
2. Sebagian *output* Perguruan Tinggi Agama Katolik memilih bekerja di dunia usaha / industri dan / atau usaha-usaha kemandirian sebagai wirausahawan.
3. Keterbatasan kesempatan bekerja sebagai Guru Agama di Sekolah baik pada Pendidikan Dasar maupun pada Pendidikan Menengah.
4. Masih banyak Guru Agama honorer atau tenaga sukarela sebagai Guru Agama yang penghasilannya sangat tidak memadai.
5. Semua Perguruan Tinggi Agama Katolik yang ada belum menerapkan Pendidikan Kemandirian.
6. *Output* Perguruan Tinggi Agama Katolik tidak mempunyai pengetahuan dan ketrampilan tentang dunia usaha / industri dan usaha-usaha kemandirian.
7. Wawasan atau *mind-set output* Perguruan Tinggi Agama Katolik masih sangat terbatas hanya pada hal-hal yang bersifat religius dan belum terpadu secara integratif dengan kesejahteraan jasmani yang sangat dibutuhkan manusia.

Dalam Proyek Perubahan ini, kami ingin merubah kondisi atau keadaan sebagaimana disebutkan di atas menuju suatu kondisi baru yang diinginkan atau diharapkan sebagai berikut:

1. *Output* Perguruan Tinggi Agama Katolik mempunyai Pengetahuan dan Ketrampilan berwirausaha dan dunia usaha lainnya.
2. Meningkatnya pendapatan dan penghasilan Guru Agama terutama Guru Agama Honorer
3. Meningkatnya minat menjadi Guru Agama.
4. Meningkatnya penginternalisasian nilai-nilai agama dalam semua aspek kehidupan.
5. Perguruan Tinggi Agama Katolik mempunyai Program Pendidikan Kemandirian.
6. Teratasinya masalah pembiayaan tenaga Guru Agama dari Lembaga Agama atau Yayasan Pendidkan sebagai pengelola.

Untuk membuat suatu Rancangan Perubahan dengan merubah kondisi yang ada sekarang menuju suatu kondisi baru yang diharapkan atau diingginkan, maka dibuat suatu INOVASI dengan membuat suatu Proyek Perubahan tentang Kebijakan dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik tentang Pendidikan Kemandirian pada semua Perguruan Tinggi Agama Katolik. Gagasan Proyek Perubahan tersebut dilaksanakan dalam bentuk:

1. Kegiatan EKSTRA KURIKULER, yakni memprogramkan juga Pendidikan Kemandirian pada kegiatan-kegiatan Ekstra Kurikuler tanpa mengurangi intensitas kurikulum inti pendidikan agama.
2. Melakukan MAGANG di perusahaan-perusahaan baik swasta maupun milik pemerintah maupun pada usaha-usaha mandiri orang atau badan tertentu.
3. Mengadakan atau meengikuti SEMINAR, *FORUM GROUP DISCUSSION* (FGD), LOKAKARYA, dan membuat kajian-kajian tentang usaha-usaha mandiri.

III. TUJUAN PERUBAHAN

Tujuan yang ingin dicapai dalam Proyek Perubahan ini, dirumuskan dalam Tujuan Jangka Pendek yang diperkirakan untuk empat (4) bulan, Tujuan Jangka Menengah untuk jangka waktu satu (1) tahun dan Tujuan Jangka Panjang yakni dalam kurun waktu lebih dari satu (1) tahun.

1. Tujuan Jangka Pendek (4 bulan)
   Terbentuknya kesamaan persepsi antara staf dan *stakeholders* tentang gagasan Proyek Perubahan Pendidikan Kemandirian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Katolik dan dapat melaksanakannya secara bertahap.
2. Tujuan Jangka Menengah (1 tahun)
   Terlaksananya Proyek Perubahan tentang Pendidikan Kemandirian pada sebagian (12) Perguruan Tinggi Keagamaan Katolik
3. Tujuan Jangka Panjang (> 1 tahun)
   Terlaksananya Proyek Perubahan tentang Pendidikan Kemandirian secara nasional pada Perguruan Tinggi Keagamaan Katolik berdasarkan Kebijakan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik

IV. MANFAAT PROYEK PERUBAHAN

Adapun manfaat Proyek Perubahan tentang Pendidikan Kemandirian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Katolik dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. *Output* dari Perguruan Tinggi Keagamaan Katolik mempunyai pengetahuan dan ketrampilan dalam dunia usaha serta usaha usaha kemandirian lainnya.
2. Perguruan Tinggi Keagamaan Katolik dapat memperluas akses dengan mengadakan kemitraan dengan dunia usaha/industri, baik swasta maupun badan usaha pemerintah.
3. Berbekal pengetahuan dan keterampilan kemandirian/ kewirausahaan yang dimiliki, Guru Agama Katolik dapat meningkatkan kesejahteraannya.
4. Terpenuhinya kebutuhan Guru Agama di Sekolah karena tingginya minat memasuki Perguruan Tinggi Keagamaan Katolik.
5. Lembaga Keagamaan Katolik dapat memperluas akses kegiatannya.
6. Tersedianya tenaga-tenaga terampil dalam dunia usaha/kewirausahaan.
7. Masyarakat termotivasi untuk menjaga keseimbangan antara kesejahteraan jasmani dan rohani.
8. Mengurangi Pengangguran.
9. Meningkatnya minat mahasiswa baru ke Perguruan Tinggi Keagamaan Katolik.
10. Teratasinya masalah kesejahteraan hidup Guru Agama honorer.

V. RUANG LINGKUP PROYEK PERUBAHAN

Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Proyek Perubahan ini, diuraikan dalam Ruang Lingkup Proyek Perubahan yang disusun dalam kegiatan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

1. Jangka Pendek

A. Melakukan konsolidasi dengan staf dan tim internal untuk menyamakan persepsi tentang gagasan perubahan Pendidikan Kemandirian

B. Menetapkan atau menunjuk 2 (dua) Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta Katolik sebagai *Pilot Project* Pendidikan Kemandirian yakni Sekolah Tinggi Pastoral Santo Agustinus Pontianak dan Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua di Kefamenanu

C. Membuat *design* gagasan Pendidikan Kemandirian :

- Program Penggemukan Sapi di Sekolah Tinggi Pastoral Keuskupan Atambua
- Program keterampilan menjahit/ *fashion* pada Sekolah Tinggi Santo Agustinus Pontianak

D. Meminta persetujuan mentor dan *stakeholders*

E. Melakukan sosialisasi pada 2 (dua) Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta Katolik tersebut

F. Menyusun dan mengadakan Pedoman Kebijakan Proyek Perubahan tentang Pendidikan Kemandirian

G. Memantau pelaksanaan gagasan Proyek Perubahan pada kedua Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta Katolik tersebut

2. Jangka Menengah

A. Mengevaluasi pelaksanaan Proyek Perubahan pada kedua Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta Katolik pelaksana

B. Melakukan rapat konsolidasi dengan semua pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta Katolik untuk menyamakan persepsi tentang Pendidikan Kemandirian

C. Menetapkan 10 (sepuluh) Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta Katolik sebagai percontohan pelaksanaan Proyek Perubahan tentang Pendidikan Kemandirian sesuai kondisi daerah masing masing

D. Melakukan sosialisasi pelaksanaan gagasan Proyek Perubahan tentang Pendidikan Kemandirian pada 10 (sepuluh Perguruan Tinggi Keagamaan Katolik pelaksana Proyek Perubahan

E. Menetapkan dan menyediakan Kebijakan Dirjen Bimas Katolik tentang Proyek Perubahan Pendidikan Kemandirian

F. Memantau pelaksanaan Proyek Perubahan Pendidikan Kemandirian pada 10 (sepuluh) Perguruan Tinggi Keagamaan tersebut

3. Jangka Panjang

A. Mengevaluasi pelaksanaan Proyek Perubahan pada 10 (sepuluh) Perguruan Tinggi Keagamaan

B. Mengadakan rapat konsolidasi dan sosialisasi kepada staf dan *stakeholders* mengenai Kebijakan Pelaksanaan Proyek Perubahan tentang Pendidikan Kemandirian

C. Menetapkan Kebijakan Dirjen Bimas Katolik tentang Proyek Perubahan Pendidikan Kemandirian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Katolik secara nasional

D. Menetapkan pedoman monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Proyek Perubahan Pendidikan Kemandirian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Katolik

Serba Serbi Pameran Proyek Perubahan

VI. *STAKEHOLDERS*

A. PETA *STAKEHOLDERS*

Stakeholders adalah orang atau kelompok orang yang berpengaruh dalam Proyek Perubahan. Untuk itu dalam Proyek Perubahan ini, dibuat uraian mengenai "*stakeholders*" baik secara internal maupun secara eksternal yang selanjutnya dilengkapi dengan suatu analisa tentang Peta "*stakeholders*" tersebut.

1. Internal

A. Menteri Agama Republik Indonesia.

Potensi dukungan sangat besar khususnya dalam Perencanaan dan Persetujuan kegiatan yang dilaksanakan.

B. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.

Memberi dukungan dalam perencanaan dan pelaksanaan Proyek Perubahan.

C. Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik.

Sangat mendukung dalam penyusunan "*design*" Proyek Perubahan dan penyusunan dokumen-dokumen Proyek Perubahan.

D. Direktur Pendidikan Katolik.

Membantu melakukan sosialisasi dan menyusun pedoman sosialisasi Proyek Perubahan.

E. Kasubdit Pendidikan Tinggi.

Membantu menyusun pedoman dan sosialisasi Proyek perubahan.

F. Kepala Bagian Organisasi. Tatalaksana dan Kepegawain.

Membantu menyusun pedoman kebijakan "*design*" Proyek Perubahan dan pedoman *monitoring*, evaluasi serta pelaporan.

G. Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi.

Membantu menyusun "*design*" Proyek Perubahan dan sosialisasi melalui media.

H. Direktur Urusan Agama Katolik

Membantu melaksanakan sosialisasi.

2. Eksternal

A. Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Katolik

Melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan Proyek Perubahan.

B. Uskup (Pimpinan Gereja Katolik)

Memberi dukungan tentang gagasan perubahan, perencanaan, dan pelaksanaan Proyek Perubahan; tetapi juga bisa menolaknya karena dianggap tidak perlu dan menghambat Pendidikan Agama.

C. Ketua Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE) Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI)

Sangat mendukung gagasan dan pelaksanaan serta sosialisasi Proyek Perubahan.

D. Ketua Komisi Pendidikan KWI

Mendukung gagasan dan pelaksanaan tetapi juga bisa menilai Proyek Perubahan mengganggu Kurikulum Pendidikan di Perguruan Tinggi Keagamaan Katolik.

E. Ketua Komisi Kateketik KWI

Mendukung gagasan dan pelaksanaan Proyek Perubahan tetapi juga bisa menilai Proyek Perubahan menghambat perkembangan pelaksanaan pendidikan katolik.

F. Dunia Usaha/Industri

Memperoleh tenaga kerja yang terampil tetapi juga bisa tidak membutuhkan banyak karyawan di Perusahaannya.

G. Media Massa

Menyebarluaskan informasi tentang Proyek Perubahan dan membantu sosialisasi, tetapi dalam memberi informasi kepada publik bisa terjadi kesalahpahaman tentang Proyek Perubahan.

H. Yayasan Pengelola

Memberi dukungan terhadap Proyek Perubahan dan membantu memfasilitasi pelaksanaannya.

I. Bupati

Memfasilitasi pelaksanaan Proyek Perubahan.

J. Kepala Bappeda

Memfasilitasi pelaksanaan Proyek Perubahan.

K. DPRD

Memberi dukungan positif terhadap Proyek Perubahan.

L. Kepala Balai Latihan Kerja (BLK)

Memfasilitasi pelaksanaan Proyek Perubahan.

B. ANALISIS *STAKEHOLDERS*

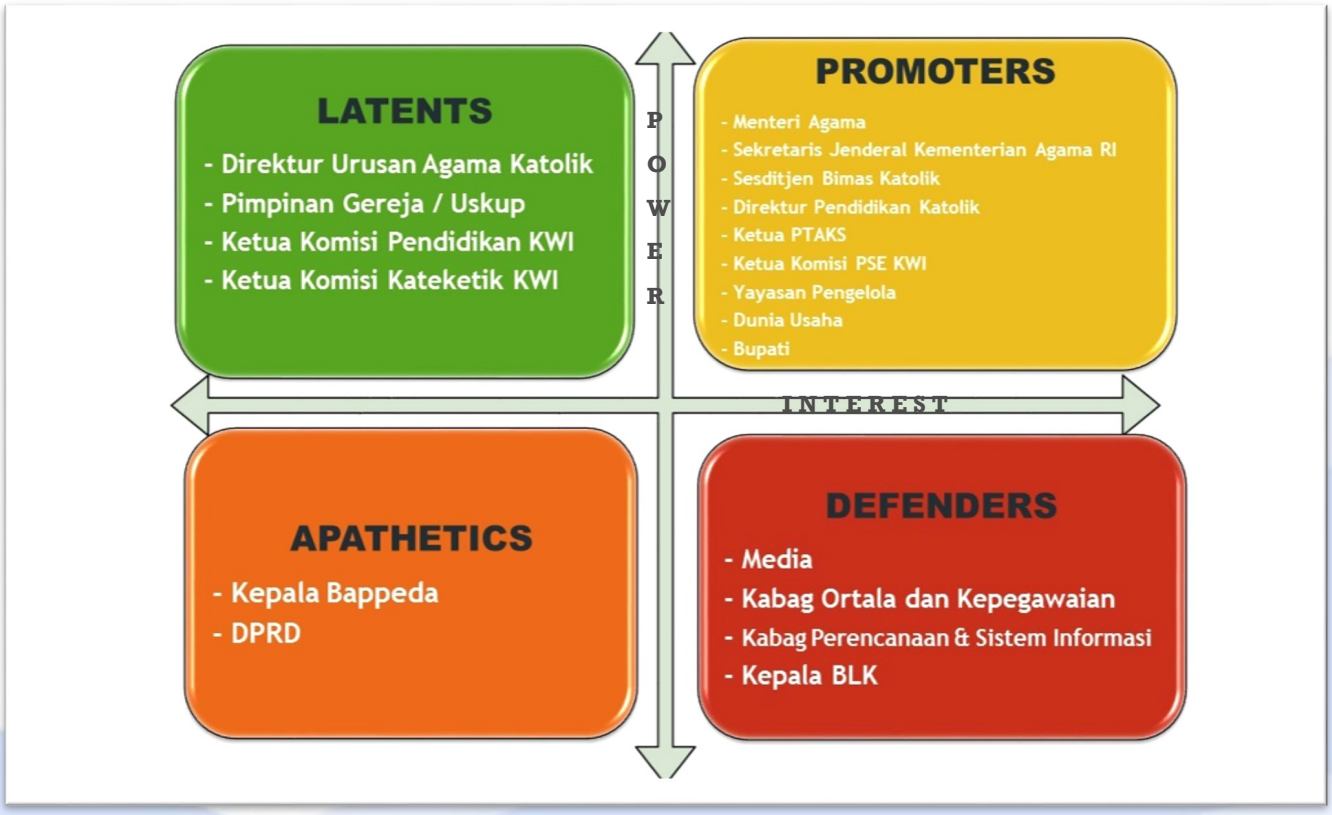

VII. TAHAP-TAHAP PROYEK PERUBAHAN (*MILESTONES*)

VIII. REALISASI PROYEK PERUBAHAN – JANGKA PENDEK

Proyek perubahan ini terdiri dari 3 tahap; yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Saat ini Proyek Perubahan "*Pengembangan Pola Pendidikan Keagamaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Katolik dengan Membuat Kebijakan Kemandirian*" sudah masuk pada pelaksanaan proyek **Jangka Pendek (Agustus – Desember 2016)**, sementara jangka menengah dan jangka panjang akan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam *milestone*.

Pada tahap jangka pendek dipilih 2 PTAKS sebagai *Pilot Project* yaitu STP St. Agustinus Pontianak dan STIPAS Keuskupan Agung Kupang. Alasan dipilihnya 2 PTAKS ini sebagai *Pilot Project* adalah sebagai berikut:

1. Kedua PTAKS tersebut sudah siap melaksanakan dan sudah menjabarkan kurikulum KKNI
2. Sumber Daya Manusia sudah siap, baik dosen maupun mahasiswa
3. STP St. Agustinus Pontianak sudah mulai melaksanakan ekstrakurikuler kewirausahaan namun belum ada pedoman yang tetap

Adapun persyaratan-persyaratan PTAKS sebagai *Pilot Project*, yaitu:

1. Harus memiliki dosen pendamping
2. Harus memiliki kurikulum/pedoman
3. Harus memiliki dukungan gereja, pemerintah, masyarakat setempat
4. Harus memiliki sarana dan prasarana
5. Harus memiliki mitra kerja (dengan perusahaan, yayasan, dll)

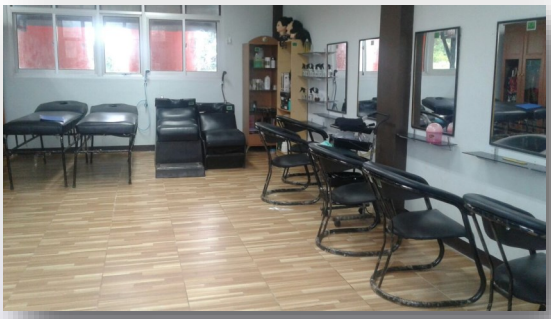

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengembangan Pola Pendidikan Keagamaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Katolik dengan Kebijakan Pendidikan Kemandirian adalah sebuah Proyek Perubahan yang cemerlang. Proyek perubahan ini dapat terlaksana dengan baik serta membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak.

Penulis mengajak semua elemen untuk saling bekerjasama bahu membahu menyukseskan *design* Proyek Perubahan ini agar wajah kualitas *output* pendidikan keagamaan Katolik dapat memberikan sumbangsih positif bagi dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara.

B. Rekomendasi

Setelah menjalani tahap jangka pendek dalam Proyek Perubahan Pengembangan Pola Pendidikan Keagamaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Katolik Dengan Membuat Kebijakan Pendidikan Kemandirian, maka berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan:

1. Kedua Perguruan Tinggi Agama Katolik Swasta (PTAKS) sebagai *Pilot Project* akan terus didampingi agar melaksanakan secara baik
2. Kedua PTAKS *Pilot Project* perlu dievaluasi
3. Hasil evaluasi menjadi pedoman pelaksanaan tahap berikutnya
4. Diharapkan tahun 2017-2018 semua PTAKS sudah melaksanakan atau merealisasikan Proyek Perubahan ini

Demikian Proyek Perubahan ini dicetuskan. Walaupun jauh dari sempurna, tapi saya bersyukur karena sudah memulai untuk membangun sebuah pola pikir dan komitmen untuk pendidikan yang berkualitas bagi Pendidikan Keagamaan Katolik.

Uskup Emeritus Keuskupan Malang Mgr. Herman Joseph Sahadat Pandoyoputro, O. Carm Tutup Usia

Umat Katolik Indonesia berduka. Uskup Emeritus Keuskupan Malang, Mgr. Herman Joseph Sahadat Pandoyoputro, O.Carm tutup usia, Jumat (23 September 2016) pukul 21.10 WIB. Uskup Emeritus yang lahir di Kopeng, Getasan, Semarang, 23 April 1939 ini ditunjuk Paus Yohanes Paulus II menjadi Uskup Keuskupan Malang pada 15 Mei 1989 dan ditahbiskan menjadi Uskup pada 3 September 1989. Masa jabatannya sebagai Uskup Keuskupan Malang berakhir dan digantikan oleh Mgr. Henricus Pidyarto Gunawan O.Carm tanggal 3 September 2016 yang lalu.

Jenazah disemayamkan di Kapel RKZ Malang (Rumah Sakit Panti Waluya) dan akan dipindahkan ke Gereja Katedral Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel (Ijen, Malang). Misa Penutupan Peti dilaksanakan pada Sabtu (24/9) dipimpin oleh Mgr. Henricus Pidyarto, O.Carm dan dimakamkan di Makam Sukun Malang pada Senin (26/9).

Dirjen Bimas Katolik, Eusabius Binsasi, menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas meninggalnya Mgr. Pandoyoputro. Beliau telah berjasa menjadi gembala bagi umatnya di Keuskupan Malang selama 27 tahun dan sebelumnya pernah menjadi Ketua Komisi Hubungan Agama dan Kepercayaan dalam Konferensi Waligereja Indonesia. Mgr. Pandoyoputro adalah seorang karmelit yang peka terhadap isu-isu keagamaan yang terjadi khususnya di lingkup Keuskupan Malang. Beliau juga dikenal sebagai Uskup yang terbuka terhadap media massa. “Saya dan segenap jajaran Bimas Katolik se-Indonesia turut berbelasungkawa, semoga Monsinyur yang kita cintai ini telah hidup bahagia abadi di Surga.” ungkap Dirjen.

**Joice Djeer*

Dirjen Bimas Katolik hadiri Tahbisan Uskup Malang

Dirjen Bimas Katolik, Eusabius Binsasi menghadiri Misa Tahbisan Episkopal Mgr. Henricus Pidyarto Gunawan, O.Carm sebagai Uskup Malang, Sabtu 3 September 2016 di Stadion Gajayana Malang. Pengangkatan Mgr. Henricus Pidyarto Gunawan, O.Carm oleh Paus Fransiskus menggantikan Mgr. Herman Joseph Sahadat Pandoyoputro, O.Carm yang mengajukan pensiun karena usia dan telah disetujui oleh Vatikan. Mgr. Henricus Pidyarto Gunawan, O.Carm yang lahir di Malang, Jawa Timur, 13 Juli 1955 adalah seorang doktor teologi biblis lulusan Universitas St. Thomas, Roma yang sehari-harinya menjadi dosen Kitab Suci di Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi (STFT) Widya Sasana, Malang.

Kehadiran Dirjen Bimas Katolik semakin mempertegas sinergitas Gereja Katolik dan Pemerintah yang saat ini bahu membahu membangun bangsa melalui pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kualitas masyarakat, termasuk didalamnya meningkatkan kualitas iman dan taqwa masyarakat Katolik agar harapan seratus persen Pancasilais dan seratus persen Katolik terwujud.

Dalam Misa Tahbisan ini, Duta Vatikan untuk Indonesia, Nuntio Antonio Guido Filipazzi menegaskan bahwa tugas utama seorang Uskup adalah berdoa, bukan semata-mata sebagai pemimpin yang sukses menyusun Visi - Misi Keuskupan. Karena itu diharapkan agar seluruh umat Katolik juga mendoakan karya penggembalaan Uskupnya. Dirjen Bimas Katolik mengamini pernyataan ini. Dirjen berharap dukungan umat Katolik dengan segenap jiwa untuk tugas pelayanan para gembala, bukan hanya di Keuskupan Malang, tetapi di seluruh wilayah Indonesia. Umat Katolik hendaknya menjadi garam dan terang dunia dalam kehidupannya sehari-hari. Umat Katolik harus selalau menjadi cahaya dan contoh bagi terwujudnya kehidupan toleransi di Negara yang plural ini.

Sedangkan dalam sambutannya, Mgr. Henricus Pidyarto Gunawan O.Carm, antara lain mengemukakan bahwa terpilihnya ia sebagai Uskup adalah suatu misteri diluar rencananya. Banyak rencana yang dirancang untuk dilakukan sebagai dosen Kitab Suci, tetapi Tuhan menuntunnya ke jalan lain yakni sebagai Uskup Malang. Dengan motto *Fideliter Praedicare Evangelium Christi* yang artinya "dengan setia mewartakan Injil Kristus," Mgr. Henricus Pidyarto Gunawan O.Carm sangat mengharapkan dukungan umat dan kerjasama yang sinergis dengan Pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia yang beraneka ragam dalam menciptakan suasana kehidupan beragama yang aman, nyaman dan harmonis. **Joice Djeer*

Dirjen: Sekolah-sekolah itu milik Keuskupan, Kementerian Agama Memfasilitasi

Senin (5/9), Dirjen Bimas Katolik Eusabius Binsasi menerima Pieter, Wartawan dari *katoliknews.com* di ruangan kerjanya. Pertemuan ini sebagai imbas dari pemberitaan media terkait Izin operasional Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK) yang menjadi perbincangan hangat diantara awak media. Penjelasan Dirjen sekaligus klarifikasi atas *pemahaman sepotong* di masyarakat tentang peran Kementerian Agama, dalam hal ini DITJENBIMAS Katolik yang memberikan payung hukum keberadaan sekolah-sekolah tersebut.

"Sesuatu yang baru memang sering jadi pertanyaan. Karena itu, inisiatif Wartawan untuk langsung bertanya ke sumber yang benar sangat bagus, untuk kemudian diteruskan kepada yang lain," ungkap Dirjen.

Sebelum tahun 2007, satu-satunya sekolah dibawah Kementerian Agama hanya Institut Pastoral Indonesia (IPI)-Malang. IPI Malang membuka filial-filial (kelas jauh, yaitu kelas yang dibuka di luar sekolah induk diperuntukkan untuk siswa/siswi yang tidak tertampung di sekolah tersebut baik karena keterbatasan ruang kelas atau jarak tempat tinggal siswa/siswi yang jauh-red) dimana-mana di seluruh Indonesia.

Filial-filial itu bertumbuh dan berkembang menjadi Sekolah Tinggi-Sekolah Tinggi Pastoral. Sampai sekarang, sudah ada 23 Sekolah Tinggi Pastoral di Indonesia. Terbitnya PP No 55/2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan menyebabkan kita mendapat peluang untuk membuka sekolah-sekolah keagamaan. Bimas Katolik mensosialisasikan ini kepada Umat Katolik, terutama kepada Hirarki Gereja Katolik. Awalnya ada pro dan kontra. Namun seiring berjalannya waktu, perkembangannya semakin bagus. Banyak yang kemudian setuju.

Perlu diingat, yang membuka sekolah sekolah keagaamaan itu adalah **Keuskupan**. Sekolah-sekolah itu **tidak** didirikan oleh Bimas Katolik tetapi sekolah-sekolah itu milik Keuskupan. Bimas Katolik -dengan ketentuan yang ada- memfasilitasi dengan memberi perlindungan hukum dalam bentuk Izin Operasional dan memfasilitasi agar sekolah-sekolah tersebut bertumbuh dan berkembang dengan baik, berjalan sesuai dengan ketentuan Pemerintah. Bantuan yang diberikan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Operasional, Sarana Prasarana (Bantuan pembangunan gedung atau rehabilitasi). Perlindungan hukum itu diberikan supaya sekolah-sekolah itu legal untuk kemudian bisa setaraf dengan sekolah menengah yang lain yang sesuai dengan standar pendidikan nasional. Karena itu, tamatan sekolah keagamaan ini bisa masuk di Perguruan Tinggi Umum juga. Sampai dengan saat ini, sudah ada 25 SMAK dan 23 Sekolah Tinggi Pastoral (STP). Dari 25 SMAK yang ada, sudah ada 10 yang mengikuti Ujian Nasional dengan jumlah siswa sebanyak 355 siswa. SMAK memiliki 4 peminatan, yakni Keagamaan, IPS, IPA dan Bahasa. Karena ini sekolah keagamaan, maka kurikulumnya 40:60 (40% pendidikan agama, 60% pendidikan umum).

Ketika ditanyai tentang Penegerian, Dirjen menjelaskan jika sekolah tersebut merasa sudah siap dinegerikan, silakan mereka membuat usulan, asalkan memenuhi persyaratan yang dimintakan. Sejauh ini yang sudah mengajukan/mengusulkan penegerian adalah STP St. Agustinus Pontianak.

Kepada STP St. Agustinus Pontianak kita mengajukan syarat yang diajukan Pemerintah, yakni Kementerian Agama, Kementerian Keuangan dan Kemenpan-RB. Persyaratan-persyaratan tersebut telah dipenuhi STP St. Agustinus. Sekarang sedang dalam proses. Karena itu sekolah Keagamaan, nama Katolik-nya tetap ada, tetapi statusnya negeri.

Menjawab kebingungan terkait perbedaan SMAK dengan Seminari, Dirjen menjelaskan bahwa Seminari adalah lembaga pendidikan calon Imam. Sekolahnya itu berada di bawah Kemendikbud. Jadi kategorinya adalah Sekolah Umum. Seminari tidak memakai kurikulum yang kita buat. Kurikulum yang kita buat adalah kurikulum gereja itu sendiri. Kurikulum yang dibuat oleh Keuskupan, kita mensahkan.

Diterimanya siswi perempuan di SMAK Seminari St. Yohanes Paulus II Labuan Bajo yang baru diresmikan juga menjadi perbincangan Wartawan. Dirjen menyampaikan bahwa siswi perempuan yang bersekolah di SMAK Seminari St. Yohanes Paulus II Labuan Bajo dipersiapkan untuk menjadi perempuan terdidik. Mereka tidak dididik untuk menjadi Imam, tetapi mereka mempunyai hak untuk mendapat pendidikan seperti siswa Seminari dan dididik menurut aturan-aturan Seminari. Mereka tinggal di asrama tersendiri yang dikelola oleh para Suster. Tahun ini sudah mulai dengan kelas X, sedangkan kelas XI dan XII tetap melanjutkan di Ignatius Loyola. Wartawan juga bertanya tentang perbedaan antara kurikulum pendidikan umum dan kurikulum pendidikan keagamaan. Dengan tegas Dirjen menjelaskan bahwa perbedaan khasnya terletak pada tujuan dan fungsinya. Pendidikan Agama pada sekolah umum mempunyai tujuan untuk menyiapkan anak yang cerdas, beriman, dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, membimbing anak untuk menjadi anak yang Pancasilais dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan Pendidikan agama di Sekolah Keagaamaan itu mau menyiapkan ahli agama; orang-orang yang mempunyai pemahaman dan penghayatan khusus tentang agamanya secara luas. Di sekolah keagamaan, peminatan keagamaannya dispesifikasi. Mata pelajaran agamanya ada 5, yakni Kitab Suci, Sejarah Gereja, Moral Kristiani, Liturgi, dan Dogma. Yang lainnya sesuai dengan jurusannya, yakni IPA, IPS dan Bahasa. Sedangkan terkait ujian, Mata pelajaran agama yang jurusan Keagamaan, ada dibawah Kementerian Agama pengawasannya, tetapi dilaksanakan oleh Sekolah. Sedangkan mata pelajaran umum sama dengan Ujian Nasional (Ujian Standar Nasional). Begitu tamat, dia bisa melanjutkan ke Perguruan Tinggi Umum.

Terkait SMAK, Dirjen juga sedang berupaya untuk terus mengakomodir permintaan-permintaan masyarakat. Dirjen juga berjuang untuk bisa mengalokasikan bantuan yang lebih besar agar perkembangan pendidikan melalui SMAK ini bisa lebih maju lagi. **Joice Djeer*

Uskup Agung Medan:
Keluarga Teladan Iman, Kitab Suci Sumber Inspirasi

Menyampaikan sambutan pada pembukaan Sinode ke-VI Gereja Katolik Keuskupan Agung Medan di Pematang Siantar, Sumatera Utara Rabu (7/9), Uskup Agung Medan Mgr. Anicetus B. Sinaga, OFMCap mengatakan bahwa keluarga hendaknya menjadi teladan iman dan menjadikan Kitab Suci sebagai sumber inspirasi. Uskup juga berpesan agar orangtua hendaknya menjadi katekis perdana atau guru iman perdana bagi anak-anaknya. Bagaimana membangun iman pada anak-anak dalam keluarga, *Story Telling* menjadi cara yang tepat.

Sinode yang bertemakan KELUARGA SEBAGAI GEREJA MINI ini membicarakan berbagai pergumulan maupun refleksi kehidupan Gereja yang ada di tengah-tengah keluarga Katolik. Sinode atau Konsili, dalam tradisi Gereja Katolik adalah pertemuan imam-imam kepala satu dioses yang diadakan oleh pimpinan dioses yakni Uskup. Sinode Keuskupan dilaksanakan ketika hendak membuat keputusan penting bagi identitas dan misi keuskupan. Sinode dilaksanakan dalam konteks doa dan mendengarkan Sabda Allah, juga konsultasi dengan Umat Allah, untuk menentukan perjalanan baru bersama dan eklesial bagi masa depan Keuskupan.

Diikuti oleh 298 orang yang terdiri dari pastor, suster, bruder dan tokoh awam, Sinode ini dipimpin oleh Uskup Agung Medan Mgr. Anicetus B. Sinaga OFMCap. Sedangkan pada acara Pembukaan Sinode, hadir Dirjen Bimas Katolik, pejabat yang mewakili Gubernur Sumatera Utara, Bupati Kabupaten Simalungun, para pejabat sipil, TNI dan Polri Kabupaten Simalungun, Ketua dan anggota FKUB Provinsi Sumatera Utara serta pimpinan semua agama.

Dalam sambutannya, Dirjen Bimas Katolik Eusabius Binsasi mengapresiasi pelaksanaan Sinode yang menghadirkan semua pimpinan agama dan Pemerintah sebagai implementasi trikerukunan umat beragama. Dirjen juga mengapresiasi sikap memaafkan dan mengampuni dari Umat Katolik di Provinsi Sumatera Utara atas peristiwa percobaan bom bunuh diri di salah satu Gereja Katolik di Padangbulan. Sikap tersebut dinilai Dirjen sebagai kematangan atau kedewasaan iman. Pengampunan Uskup Agung Medan dan juga Pastor yang menjadi korban kepada pelaku dan orangtuanya yang datang memohon maaf adalah sikap iman yang harus dicontohi *(role model)* oleh semua pihak. Sikap memaafkan dengan tulus menjadi wujud nyata dan buah dari "tahun kerahiman Allah" bagi umat manusia. Sikap mulia seperti ini hendaknya terbentuk sejak dini dalam keluarga yang merupakan fondasi iman dan kerukunan.

Seminar

Intoleransi Merajalela: Rapuhkah Bhinneka Tunggal Ika?

Bekerjasama dengan Sie HAAK (Hubungan Antaragama dan Kemasyarakatan) Paroki St. Anna Duren Sawit-Jakarta Timur, Vox Point Indonesia menyelenggarakan Seminar bertajuk "Intoleransi Merajalela: Rapuhkah Bhinneka Tunggal Ika?" di Aula Paroki St. Anna, Sabtu (10/9). Seminar ini menghadirkan *Keynote Speaker* Ketua Komnas HAM, M. Imdadun Rahmat dan sejumlah narasumber seperti Cendekiawan NU Zuhairi Misrawi, Wakil Ketua Bidang Rekomendasi FKUB DKI Jakarta Rudy Pratikno serta Aktivis PGI dan MADIA Trisno Sutanto. Mereka adalah para tokoh-tokoh yang giat mengadvokasi hak-hak minoritas di negeri ini.

Berangkat dari keprihatinan bersama tentang berbagai situasi kemerosotan nilai-nilai pluralitas belakangan ini, M. Imdadun Rahmat menyatakan bahwa intoleransi tidak boleh kita biarkan, tetapi harus mendapat perhatian dari kita semua untuk bagaimana meminimalisir dan mengatasinya. Hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah hak yang paling tinggi. "Dia (Hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan-red) adalah hak nomor wahid, karena itu, dikumpulkan dalam satu rumpun dengan hak kita untuk tetap bernyawa. Jadi hak itu sederajat dengan hak kita untuk tetap memiliki hidup, memiliki jiwa, bernyawa dan bernafas," ungkapnya. "Oleh karena itu, di dalam konsep Hak Asasi Manusia, kebebasan beragama dan berkeyakinan mendapat proteksi yang teramat serius dan tinggi," lanjutnya.

Lebih jauh, Imdadun menyampaikan kebebasan beragama memiliki dua unsur penting, yaitu: unsur internal (*forum internum*) dan eksternal (*forum eksternum*). *Forum internum* adalah hak beragama terkait aktivitas pikiran, nurani dan hati. Bersifat abstrak karena berada di hati sanubari setiap manusia yang memiliki kepercayaan dan dalam pelaksanaannya tidak boleh dibatasi entitas apapun termasuk oleh undang-undang. Keberadaan hak ini tidak boleh diintervensi, bahkan oleh negara sekalipun. "Kita berhak memilih agama apa, memilih aliran kepercayaan apa, memilih denominasi apa, atau memilih agama lokal apa, karena memilih itu terkait dengan iman," tegas Imdadun.

Iman itu ada di dalam pikiran. Tanpa diaturpun keimanan di dalam hati itu tidak akan mengganggu orang lain. Sedangkan *forum eksternum* adalah kebebasan menjalankan praktik keagamaan dan keyakinan atau sebagai manifestasi dari keyakinan itu –perwujudan dari keimanan yang ada di dalam hati- seperti menjalankan ibadah (salat ke masjid, misa di gereja, dll), mendirikan tempat ibadah, berangkat haji, memakai jilbab atau kopyah, menguburkan jenazah, merayakan hari-hari keagamaan, dan lain sebagainya. Ekspresi keagamaan ini seharusnya mendapat keleluasaaan seleluasa-leluasanya, **kecuali** ucapan, tindakan serta pengamalan agama itu dikhawatirkan mengganggu kebebasan dan kemerdekaan beragama dan berkeyakinan orang lain.

Sementara itu, Cendekiawan NU Zuhairi Misrawi dalam paparannya menyampaikan apa saja yang harus dilakukan untuk membangun republik yang toleran. Misrawi berangkat dari fakta bahwa Inonesia adalah negara yang majemuk. Jika terjadi intoleransi, maka modusnya adalah penolakan atas status dan akses yang sama terhadap kelompok lain (*restriction*), adanya pandangan yang menganggap kelompok lain lebih rendah (*de-humanization*), pengabaian hak-hak sipil, politik dan ekonomi (*oppression*), penyerangan dan melakukan pembunuhan (*act of aggression*), pengorganisasian pembunuhan massal (*mass-violence*) dan pembasmian atas dasar identitas (*genocide*). Adapun kelompok-kelompok yang menjadi sasaran intoleransi adalah Ahmadiyah, Syiah, Kristen, Katolik, dan Buddha. Misrawi menyampaikan data bahwa sejak tahun 1998-2003 terdapat 428 kasus intoleransi bernuansa agama. Dari tahun 1998-2000 terdapat 297 kasus (UNSFIR, 2003). Sepanjang tahun 2008, terdapat 367 tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan (Setara Institute). Sepanjang tahun 2009 terjadi 59 kasus intoleransi dan 81 kasus pada tahun 2010 (Moderate Muslim Society). Pada tahun 2011, terdapat 183 kasus intoleransi (The Wahid Insitute). Di tahun 2013, ada 245 kasus intoleransi (The Wahid Insitute). Tahun 2014 ada 63 peristiwa dan 56 tindakan intoleran, tahun 2015, 197 peristiwa dan 236 intoleran (Setara Institute). Titik problematiknya, menurut Misrawi, terjadi karena adanya benturan peradaban, benturan fundamentalisme, globalisasi ekstremisme atas nama agama, identitas soliter, dan kebangkitan agama-agama.

Narasumber lain, Rudy Pratikno menilai terjadinya intoleransi karena adanya ketidakpatuhan terhadap hukum, adanya kesenjangan sosial-ekonomi, serta pemahaman agama yang masih minim.

Sementara itu, Trisno Sutanto menyampaikan bahwa seharusnya sejak reformasi, konstitusi itu semakin menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan. Bahkan pasal 28E UUD 1945 juga telah menjamin warga negara Indonesia dalam kebebasan beragama. "Tetapi, jika konstitusi hanya konstitusi, tetapi tidak diturunkan menjadi produk hukum, maka konstitusi akan menjadi macan ompong, masih terjadi pembiaran dan diskriminasi" ungkap Trisno. Ia berpendapat bahwa umat beragama perlu bergaul dengan umat yang berbeda agama lainnya. Perlu mempelajari agama lain, sehingga tidak terperangkap dalam pemikiran hanya agamanya saja yang benar. Kegiatan *live in* lintas agama perlu dikembangkan. Di Ambon, lanjut Trisno, orang masih beranggapan bahwa kehidupan toleransinya paling buruk. Tetapi jika kita ke Ambon, disana justru terjadi harmoni yang sangat bagus antarumat beragama. Ada yang mereka sebut sebagai 'provokator' perdamaian. Kerjasama lintas agama mereka kedepankan untuk menjaga daerahnya tetap kondusif.

Di akhir seminar, para narasumber sepakat untuk menjalin kerjasama yang harmonis untuk meminimalisir kasus-kasus intoleransi di Indonesia.

Ketua Panitia Penyelenggara Seminar yang juga Wakil Sekretaris Jenderal Vox Point Indonesia dalam wawancara dengan media mengungkapkan bahwa Vox Point Indonesia mewadahi pendidikan sosial politik kemasyarakatan. Kebanyakan masyarakat belum memahami, masuk dalam dunia politik itu untuk apa. Sebagian beranggapan politik itu kotor. Vox Point Indonesia memberi pemahaman bahwa jika Negara hadir dalam berbagai lini kehidupan masyarakat -yang juga ada umat Katolik didalamnya- maka, umat Katolik juga perlu memberi peran dan kontribusinya untuk negeri ini, salah satunya dalam bidang politik. Politik yang kotor tidaklah sesuai dengan iman Katolik. Maka, Vox Point Indonesia memberi *insight* bagaimana umat Katolik itu berperan dalam kehidupan politik. Vox Point Indonesia menggandeng tokoh-tokoh Nasional yang kompeten di bidang politik. Dari merekalah, ilmu tentang bagaimana berpolitik yang baik itu ditransfer ke umat dalam bentuk penyelenggaraan seminar-seminar.

"Umat Katolik itu ada di birokrasi, ada di eksekutif, legislatif dan bidang kehidupan lainnya. Nilai-nilai kristiani itu perlu menjadi dasar pembuatan kebijakan. Kalau kita hanya berteriak dari luar, lalu apa gunanya Negara memberi kesempatan kepada semua warganya untuk mengambil bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," ungkap Susan. **Joice Djeer*

PAUD Taman Seminari:
Tempat Persemaian Generasi Penerus Bangsa

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik sangat peduli dengan pendidikan di Indonesia. Bentuk kepedulian ini salah satunya memfasilitasi lembaga-lembaga pendidikan (PAUD, SMAK dan STP) milik Keuskupan yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Fasilitasi itu dalam bentuk SK Izin Operasional dan juga bantuan-bantuan.

Banyak orang sudah mengenal Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK) dan Sekolah Tinggi Pastoral (STP), tetapi mungkin banyak orang juga belum tahu bahwa selain SMAK dan STP, Bimas Katolik juga membina PAUD Taman Seminari.

PAUD Taman Seminari adalah tempat persemaian anak-anak Bangsa. Seminari sendiri berasal dari kata Seminarium dari bahasa Latin yang terbentuk dari kata dasar semen, artinya benih. Jadi seminari adalah tempat persemaian benih-benih generasi penerus Bangsa. Anak-anak Bangsa adalah generasi penerus yang sejak dini disemai iman *(fides)*, sikap *(mores)* dan akal budinya *(intellectus)* agar kelak tumbuh menjadi orang yang bisa membawa Bangsa ini ke arah yang lebih baik. Demikian diungkapkan Dirjen Bimas Katolik, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (14/9).

Seperti yang tertuang dalam Petunjuk Teknis Pendirian Taman Seminari di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Taman Seminari adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Katolik bagi anak berusia empat sampai dengan enam tahun. Sampai saat ini, sudah ada lima PAUD Taman Seminari yang SK Izin Operasionalnya sudah ditandatangani Dirjen. Ke-lima PAUD Taman Seminari tersebut adalah:

1. PAUD Taman Seminari Suara Alam Percontohan Kubu Raya dengan SK Izin Operasional Nomor 51 Tahun 2015, tanggal 9 April 2015;
2. PAUD Taman Seminari St. Maria Fatima Percontohan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah dengan SK Izin Operasional Nomor 108 Tahun 2015, tanggal 29 Juni 2015;
3. PAUD Taman Seminari Gonzalo Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara dengan SK Izin Operasional Nomor 42 Tahun 2016, tanggal 22 Februari 2016;
4. PAUD Taman Seminari St. Petrus Madi, Kabupaten Paniai, Papua dengan SK Izin Operasional Nomor 218 Tahun 2016, tanggal 27 Juni 2016;
5. PAUD Taman Seminari St. Maria Agustina Rumaat, Maluku Tenggara, Maluku dengan SK Izin Operasional Nomor 260 Tahun 2016, tanggal 23 Agustus 2016.

Sejauh ini, usulan pendirian PAUD Taman Seminari sangat banyak, seperti yang disampaikan Kasi Kurikulum dan Evaluasi, Barnabas Ola Baba ketika ditemui di ruang kerjanya, Jumat (16/9). Adapun mekanisme pendirian PAUD Taman Seminari dilakukan sesuai dengan Juknis yang sudah ada, yakni:

1. Penyampaian usul pendirian Taman Seminari oleh Penyelenggara/Pemrakarsa kepada Menteri Agama u.p. Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan pendirian;
2. Penelitian/penelaahan berkas pendirian dan verifikasi data lapangan oleh Tim atau Satuan Kerja yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal;
3. Atas dasar hasil penelitian/penelaahan, Direktur Jenderal memberikan Izin Pendirian yang berlaku selama tiga tahun, atau menolak memberikan izin pendirian;
4. Taman Seminari yang telah melakukan proses pembelajaran menyesuaikan dengan persyaratan pendirian.

Kehadiran PAUD Taman Seminari ini, menurut Dirjen, adalah bentuk kepedulian Pemerintah, dalam hal ini Ditjen Bimas Katolik yang tugasnya melayani umat Katolik, termasuk dalam bidang pendidikan. “Banyak orangtua yang punya kerinduan untuk menyekolahkan anaknya di sekolah keagamaan Katolik sejak usia dini,” ungkap Dirjen. Kerinduan itu kian terbuka sejak Pemerintah mengeluarkan PP 55/2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan yang memberikan peluang bagi Kementerian Agama untuk mendirikan sekolah-sekolah keagamaan. Ditjen Bimas Katolik memfasilitasi dengan memberikan Izin Operasionalnya. “Tetapi, perlu juga diingat bahwa bukan berarti setiap orang Katolik bisa sertamerta mendirikan PAUD, mereka harus mendapat izin rekomendasi dari Keuskupan dimana mereka berada. Karena itu kita minta yang dirikan PAUD Taman Seminari itu adalah Paroki; bisa tarekat, biara, atau yayasan,” tegas Dirjen. **Joice Djeer*

Dirjen Bimas Katolik Prihatin atas Peristiwa di Gereja St. Paulus, Kleca - Surakarta

Pada hari Minggu (18/9) pukul 01.30 WIB telah terjadi peristiwa ketidaknyamanan yang terjadi di Gereja St. Paulus Kleca, Surakarta-Solo. Pembimas Katolik Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah, Paulinus Sulardi membenarkan peristiwa tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Gereja St. Paulus Kleca kemasukan orang tak dikenal dan melakukan beberapa aksi vandalistik. Orang tak dikenal ini membuat tulisan-tulisan dalam bahasa Inggris di dinding Tabernakel (tempat penyimpanan sakramen Mahakudus-red) dan dinding tembok di sekitar Tabernakel dengan spidol warna hitam.

Orang tak dikenal tersebut mengeluarkan satu Sibori (wadah untuk roti-roti kecil yang akan dibagikan dalam Komuni kepada umat Katolik-red) dan satu Sibori 'Piksis' (sebuah wadah kecil berbentuk bundar yang dipergunakan untuk menyimpan Sakramen Mahakudus-red) dari ruang dalam Tabernakel dan kemudian meletakkannya di meja di depan Tabernakel.

Dalam salinan pernyataan resmi Gereja St. Paulus Kleca, Surakarta yang ditandatangani oleh Romo Agustinus Suwartana Susilo, MSF pada tanggal 18 September 2016, membenarkan bahwa Gereja St. Paulus Kleca, Surakarta telah mengalami kejadian yang membuat umat terkejut. Dalam peristiwa itu, kunci Tabernakel hilang. Pelaku juga menuliskan beberapa kalimat dalam bahasa Inggris, tetapi intinya tidak menyerang kepercayaan dan Liturgis.

Atas peristiwa tidak menyenangkan terhadap Gereja St. Paulus Kleca, Surakarta, Pastor Paroki tetap menghimbau umat agar tetap tenang, tidak resah dan tetap melakukan aktivitas seperti biasa serta tetap menjaga situasi ketenangan, kedamaian dan kondusifitas di paroki masing-masing.

Kejadian ini, menurut Sdri. Aan (Karyawati Sekretariat Paroki) yang kami hubungi via telepon pada Senin (19/9) pagi di nomor Sekretariat Paroki telah dilaporkan ke Polresta Surakarta dan sudah dilakukan olah TKP. Pelakunya juga sudah ditangkap. Gereja menyerahkan kasus ini kepada pihak berwajib untuk diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Dirjen Bimas Katolik, Eusabius Binsasi menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa ini. Sebagaimana diketahui, dalam dua bulan terakhir, telah terjadi aksi vandalistik di beberapa Gereja Katolik. Pada Selasa (9/8) terjadi pengrusakan patung Yesus dan Maria di Gereja Paroki St. Yusup Gondang, Kabupaten Klaten, dan sekarang terjadi lagi di Gereja St. Paulus Kleca, Surakarta. Atas peristiwa ini, Dirjen menghimbau Umat Katolik untuk tetap tenang menyikapi setiap peristiwa intoleransi yang terjadi. Pengampunan tetap diberikan kepada pelaku sebagaimana hukum Kasih yang diajarkan Gereja Katolik. Namun, Dirjen juga berpesan untuk selalu waspada terhadap upaya untuk menodai kerukunan di Negara yang heterogen ini. Percikan konflik yang terjadi dalam bentuk aksi intoleransi tidak sesuai dengan karakter Bangsa, karena itu Pancasila hendaknya selalu menjadi alat pemersatu Bangsa dan perkuat kebhinnekaan dengan terus mengupayakan dialog antaragama. **Joice Djeer*

Pemanfaatan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dalam pelaksanaan UN 2017

Bertempat di Ruang Sidang B3, Gedung E Lantai 2 Balitbang Kemdikbud, Kamis (22/9), diselenggarakan pertemuan terkait pemanfaatan data DAPODIK dalam pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2016/2017. Turut hadir pada pertemuan tersebut, Kasubdit Pendidikan Menengah Direktorat Pendidikan Katolik DITJENBIMAS Katolik, Yustina Srini.

Untuk Tahun Pelajaran 2016/2017, data Ujian Nasional diambil dari DAPODIK. DAPODIK adalah sistem pendataan skala nasional yang terpadu, dan merupakan sumber data utama pendidikan nasional, yang merupakan bagian dari program perancanaan pendidikan nasional dalam mewujudkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif. DAPODIK berbasis teknologi informasi dan komunikasi akan mengintegrasikan sistem informasi pendidikan nasional yang memuat basis data pendidikan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan basis data tunggal.

Pertemuan yang dihadiri juga oleh perwakilan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Dikdasmen, Puspendik, Puslitjakdikbud, PDSP dan Balitbang Kemdikbud ini membahas secara komprehensif pemakaian DAPODIK sebagai pendataan satu pintu.

Setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan, maka DAPODIK menjadi dasar diterbitkannya data statistik pendidikan. DAPODIK merupakan satu-satunya acuan dalam pelaksanaan kegiatan, kajian, dan pengambilan keputusan terkait entitas pendidikan yang didata. Entitas data yang ada di aplikasi DAPODIK memuat variabel yang sangat lengkap, yakni data satuan pendidikan, data peserta didik, data pendidik dan tenaga kependidikan, dan data substansi pendidikan.

Beberapa Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK) binaan DITJENBIMAS Katolik, sudah ikut serta dalam pelaksanaan Ujian Nasional. Kasubdit Pendidikan Menengah dalam pertemuan ini melaporkan proses pendataan yang selama ini terjadi, yakni masih secara manual. Ke depan, Kasubdit menegaskan akan memakai DAPODIK dan akan terus berkoordinasi dengan Kemdikbud. Di lapangan, masing-masing SMAK mulai mempersiapkan operatornya. Sejauh ini proses telah berjalan lancar, semua data dan informasi termasuk surat resmi telah disampaikan kepada Kemdikbud dan tinggal menunggu *approval*.

Laporan ini sekaligus sosialisasi penggunaan DAPODIK, karena dalam waktu dekat, SMAK akan mendapatkan hak akses DAPODIK untuk sesegera mungkin mengentri datanya.

**Joice Djeer*

Dirjen Bimas Katolik
Rapat Konsiyering dengan Komisi VIII DPR RI

Bertempat di Ruang Rapat Gedung Nusantara II DPR-RI Senayan, Dirjen Bimas Katolik Eusabius Binsasi didampingi bebrapa Pejabat Eselon III dan IV mengikuti Rapat Konsinyering dengan Komisi VIII DPR-RI pada Selasa (27/9). Pada kesempatan ini, Dirjen menjawab pertanyaan yang diajukan anggota Komisi VIII terkait RKA-K/L Tahun 2017 Program Bimas Katolik Kementerian Agama RI. Rapat ini merupakan kelanjutan dari Rapat sebelumnya yang diselenggarakan di Griya Sabha DPR RI Cikopo Bogor, Jumat (23/9).

Dirjen memaparkan, Pagu Anggaran Penyesuaian Tahun 2017 berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-635/MK.02/2016 diterima sebesar Rp996.909.194.000,- (sembilan ratus sembilan puluh enam milyar sembilan ratus sembilan juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah). Pagu Anggaran ini baru 63,38% dari total usulan kebutuhan tahun 2017 sebesar Rp1.525.631.190.000,- (satu trilyun lima ratus dua puluh lima milyar enam ratus tiga puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah). Kekurangan sebesar Rp558.721.996.000,- (lima ratus lima puluh delapan milyar tujuh ratus dua puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) tetap diajukan sesuai permohonan awal untuk mendukung pelayanan maksimal dalam Program Bimas Katolik.

Pagu Anggaran Penyesuaian Tahun 2017 mengalokasikan Rp 742.101.559.000,- (tujuh ratus empat puluh dua milyar seratus satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) atau sebesar 76,75 % untuk Fungsi Pendidikan, sedangkan untuk Fungsi Agama sebesar Rp224.807.635.000,- (dua ratus dua puluh empat milyar delapan ratus tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) atau sebesar 23,25%.

Lebih lanjut Dirjen menjelaskan, "sebagian besar Pagu Anggaran Penyesuaian Tahun 2017 dialokasikan untuk memenuhi Belanja Operasional: Belanja Pegawai (Pembayaran Gaji Struktural, Fungsional dan Tunjangan Profesi Guru) sebesar Rp700.898.696.000,- (tujuh ratus milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) atau 72,48%, Belanja Barang Operasional (Pemenuhan kebutuhan sehari-hari perkantoran untuk 350 Satker Pusat-Daerah) sebesar Rp31.669.824.000,- (tiga puluh satu milyar enam ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) atau sebesar 3,28%. Sedangkan untuk Belanja Non Operasional (Belanja Barang, Belanja Modal dan Belanja Bantuan Sosial) sebesar Rp234.340.674.000,- (dua ratus tiga puluh empat milyar tiga ratus empat puluh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) atau sebesar 24,24%.

Dirjen juga menjelaskan dalam Pagu Anggaran Penyesuaian Tahun 2017 ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebesar Rp181.156.700.000,- (seratus delapan puluh satu milyar seratus lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah). RKP merupakan kesepakatan dalam *Trilateral Meeting* antara Kementerian Agama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS. Pengalokasian Pagu ini untuk Fungsi Pendidikan sebesar Rp106.253.000.000,- (seratus enam milyar dua ratus lima puluh tiga juta rupiah), untuk mendukung output prioritas, yaitu: Siswa SMAK Penerima KIP sejumlah 600 orang, Siswa SMAK Penerima BOS sejumlah 2000 orang, Mahasiswa Miskin Penerima Beasiswa sejumlah 2000 orang, dan lain-lain. Fungsi Agama mendapat alokasi Rp74.903.700.000,- (tujuh puluh empat milyar sembilan ratus tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk *Pertama*, Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik Rp61.491.000.000,- (enam puluh satu milyar empat ratus sembilan puluh satu juta rupiah)

dengan output prioritas, yaitu : Keluaraga Katolik yang memperoleh Bimbingan Keluarga Bahagia sejumlah 1000 orang, Penyuluh Non PNS Penerima Tunjangan sejumlah 4800 orang, dan lain-lain. *Kedua*, Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik Rp13.412.700.000,-(tiga belas milyar empat ratus dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk output prioritas, yaitu: Penyusunan Rencana Program, Penyusunan Rencana Anggaran, Pengelolaan Data dan Informasi, dan Layanan Dukungan Manajemen Lainnya.

Dalam kesempatan ini Dirjen mengucapkan terima kasih atas kenaikan Pagu Anggaran Penyesuaian Tahun 2017 dan kerja sama yang baik dengan Komisi VIII DPR RI. Rapat ini berakhir pada pukul 23.30 WIB.

**Seven Simbolon*

Rekoleksi Siswa-Siswi Agama Katolik Tingkat SMP se-Provinsi DKI Jakarta

Pembimas Katolik Kanwil Kemenag DKI Jakarta menyelenggarakan Rekoleksi Siswa-Siswi Agama Katolik Tingkat SMP se-Provinsi DKI Jakarta dengan tema "Allah Mengasihi Aku, Aku Mengasihi Mereka." Acara yang diikuti 60 Siswa-Siswi dari tiga sekolah di Jakarta, yakni SMPN 179, SMPN 103, dan SMPN 188 ini berlangsung selama tiga hari, 23-25 September 2016 di Hotel Griya Astoeti Cisarua Bogor.

Hadir dalam kesempatan ini, Dirjen Bimas Katolik Eusabius Binsasi yang memberikan pengarahannya dengan menyampaikan beberapa poin penting, sebagai berikut:

Anak muda adalah harapan Gereja dan Tanah Air (*Pro Ecclesia et Patria*), mereka hidup di era globalisasi dengan beragam kondisi sosial didalamnya. Karena itu sejak dini harus dididik untuk bebas dari perilaku korupsi, bebas dari pengaruh narkoba, dan dari pengaruh negatif media sosial. Untuk membentengi hal tersebut, anak muda perlu:

RAJIN BERDOA,

RAJIN MENGIKUTI PERAYAAN EKARISTI DI GEREJA,

RAJIN MEMBACA KITAB SUCI, dan

SELALU DEKAT DENGAN KELUARGA.

**Dian/Alfa*

Dirjen Hadiri Ulang Tahun ke-21 Gereja Katolik St. Bartolomeus Paroki Taman Galaxi-Bekasi

Gereja Katolik St. Bartolomeus Paroki Taman Galaxi Bekasi berulangtahun ke-21. Perayaan sukacita ini diawali dengan misa syukur. Hadir pada kesempatan berbahagia ini, Dirjen Bimas Katolik, Eusabius Binsasi. Dalam sambutannya, Eusabius menyampaikan *proficiat* kepada umat Paroki setempat. Perayaan ini, kata Dirjen, hendaknya dimaknai sebagai kesempatan untuk semakin membangun komitmen meningkatkan kualitas hidup beragama.

"Semoga kita semakin meningkatkan kualitas kehidupan intern umat beragama. Kita juga bergandengan tangan sebagai mitra untuk meningkatkan kualitas hidup beragama," ungkap Dirjen.

Romo Thomas Bani, SVD dalam sambutannya menegaskan supaya kita mampu meningkatkan pelayanan kepada umat. "Kita tingkatkan kerukunan intern maupun antarumat beragama. Kita hendaknya jadi terang di tengah Bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika dengan semangat Pancasila," ungkap Romo Thomas.

Dalam Suara Gembala yang diambil dari situs bartolomeus.or.id, Romo Thomas Bani, SVD menyampaikan pesannya, sebagai berikut:

Hari Minggu ini adalah hari yang istimewa bagi kita semua, dimana kita merayakan Hari Ulang Tahun Paroki Taman Galaxi yang ke-21 dan sekaligus melantik pengurus Dewan Paroki Pleno yang baru periode 2016-2019. Banyak hal, karya dan pelayanan yang telah kita lakukan bagi dan bersama umat serta masyarakat sekitar. Semuanya dengan satu tujuan utama, yaitu mewartakan kasih dan kebangkitan Kristus dan telah terangkum dalam buku "Meniti Jejak – 20 Tahun Perjalanan Penuh Syukur" yang dibagikan kepada setiap keluarga. Semoga di usia yang ke-21 ini, kita tetap dapat melanjutkan karya pelayanan gereja dan mempererat hubungan kasih yang terjalin dengan masyarakat sekitar.

Bukan kebetulan apabila bacaan Injil hari Minggu ini mengisahkan Lazarus yang miskin dan orang kaya yang tidak peduli. Kita semua diingatkan betapa Tuhan tidak menyukai sikap tidak peduli terhadap sesama yang menderita dan terpinggirkan. Gereja hadir dan ikut serta dalam perjuangan memerangi kemiskinan dan penderitaan di muka bumi ini. Apabila kita sungguh mencintai Allah, maka seharusnya kita memiliki sikap belarasa kepada sesama. Dan secara khusus dalam Tahun Suci Luar Biasa Kerahiman Allah ini, kita dapat mewujudnyatakan belarasa kita melalui Berkhat Santo Yusup (BKSY).

Maka, kita tidak perlu takut menjadi kaya, namun takutlah apabila kita terkena virus sikap tidak peduli.

Hadir pada kesempatan berbahagia ini Lurah, para Ketua RT, Ketua RW setempat, serta tokoh-tokoh agama lain. **Alfa/Joice*

Pesta Perak (25 Tahun) Seminari Tinggi St. Mikhael

Dirjen Bimas Katolik, Eusabius Binsasi menghadiri perayaan Pesta Perak (25 Tahun) Seminari Tinggi St. Mikhael dan Tahbisan 13 Imam Baru di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kamis (29/9).

Dalam sambutannya mewakili Pemerintah, Dirjen menyampaikan profisiat kepada Seminari Tinggi St. Mikhael atas jasa dan pengabdiannya menghasilkan para Imam yang menjadi pemimpin umat Katolik dan tokoh awam Katolik yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri.

"Kita tahu, bahwa membangun kehidupan umat beragama yang berkualitas bukan pekerjaan mudah. Butuh peran serta semua lapisan masyarakat terutama para pimpinan agama dan lembaga agama. Para Imam baru yang ditahbiskan hari ini, merupakan pemimpin umat yang mempunyai tugas dan tanggung jawab khusus untuk memimpin umat Katolik," ungkap Dirjen.

"Atas nama Pemerintah, saya menyampaikan profisiat kepada Seminari Tinggi atas sumbangsihnya bagi pembangunan umat beragama di NTT, khususnya pembangunan masyarakat Katolik di NTT dan di Indonesia umumnya," lanjut Dirjen.

Khusus kepada Imam baru yang ditahbiskan, Dirjen berpesan untuk melayani seperti Kristus, sang Guru Ilahi dalam menjalankan tugas imamat dan perutusan di tengah dunia. Imam-Imam harus bisa menjadi pekerja keras dalam menjalankan tugas perutusan, sehingga tidak cepat puas dengan situasi normal atau biasa-biasa saja.

"Imam harus berani melakukan terobosan, berbuat lebih, dan kuat menghadapi situasi sesulit apapun. Dengan berani melakukan terobosan, kita akan berhasil menjadi semakin dewasa dan mantap dalam menunaikan tugas perutusan," tegas Dirjen.

**JB Kleden*

Rapat Koordinasi IMB rumah ibadat Paroki Santa Bernadet

Belajar dari kekalahan setelah peninjauan kembali IMB rumah ibadat, Umat Katolik Paroki Santa Bernadet Kecamatan Pinang Kota Tangerang dapat mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah ibadat baru dengan menyempurnakan persyaratan yang diperlukan sesuai peraturan berlaku.

Demikian salah satu kesimpulan rapat koordinasi yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia di Kantor Kesbangpol Pemerintah Kota Tangerang, Jumat (30/9). Rapat dihadiri perwakilan Pemerintah Pusat dan Daerah, yakni Kemenkopolhukam, Direktorat Urusan Agama Katolik DITJENBIMAS Katolik Kementerian Agama RI dan Kesbangpol Kota Tangerang. Hadir juga perwakilan MUI Kota Tangerang, Polresta, Kankemenag Kota Tangerang, perwakilan Camat Pinang, dan FKUB Tangerang.

Sebelumnya, IMB rumah ibadat Paroki Santa Bernadet pernah diterbitkan oleh Pemerintah Kota Tangerang, namun digugat oleh kelompok masyarakat yang tidak setuju adanya bangunan gereja di daerah Pinang, dan gugatan tersebut dikabulkan oleh PTUN Serang pada Desember 2014. Karena ada novum (ditemukannya bukti baru-red), umat Paroki Santa Bernadet mengajukan Peninjauan Kembali (Kasasi) di PTUN Jakarta, namun kalah pada Mei 2015 sebagaima dilansir website Mahkamah Agung beberapa waktu lalu. Asisten Deputi Menko Polhukam, Yanto Tarah mengharapkan agar masalah pendirian rumah ibadat tidak

berlarut-larut. Ini sesuai harapan Nawacita Jokowi-JK, antara lain, Negara hadir melindungi warganya. "Hasil rapat ini akan kami sampaikan kepada Menkopolhukam. Pada intinya, masalah ini jangan berlarut-larut," tegas Yanto.

Sementara itu, Pimpinan Rapat, Kepala Kesbangpol Kota Tangerang Temmy Mulyadi menyampaikan catatan bahwa sampai saat ini umat Paroki Santa Bernadet beribadah di bawah tenda bukan permanen dalam suasana aman, sambil menunggu proses selanjutnya.

Direktur Urusan Agama Katolik, Sihar Petrus Simbolon, mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya rapat koordinasi ini. "Atas nama Dirjen Bimas Katolik, kami ucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Tangerang, Kesbangpol, FKUB, Aparat Keamanan (Polres Tangerang) dan semua pihak, teristimewa Kemenkopolhukam, sehingga rapat ini terlaksana dengan baik. Semoga segera ada solusi atas masalah IMB rumah ibadat Paroki Santa Bernadet ini," ungkap Direktur.

**Pormadi Simbolon*

Seminar Nasional Dharma Wanita Persatuan
"Peran DWP Mendukung Sukses MEA"

Era MEA yang telah disepakati para pemimpin Negara-negara ASEAN tahun 2003 lalu, membutuhkan insan-insan kompetitif dalam arena persaingan global. Tanpa terkecuali, kaum perempuan pun, harus tampil dengan kualitas unggulan sesuai kebutuhan 'pasar'. Adalah realitas saat ini, bahwa pelaku usaha perempuan memiliki potensi menggerakkan ekonomi kerakyatan dalam kancah MEA. Data yang dikeluarkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menguatkan fakta tersebut, bahwa 60 persen pelaku UKM di Indonesia adalah perempuan, melalui *home industry* yang dikelolanya.

Keunggulan ini mendorong dilaksanakannya Seminar Nasional DWP di Gedung Manggala Wanabakti, tanggal 4-5 Oktober 2016. Kaum perempuan yang hadir sebanyak 1.800, dibekali pemahaman tentang tantangan dan kesiapannya menjalani MEA. Ini pun wujud implementasi *Roadmap* Renstra DWP yang telah dihasilkan oleh MUNAS DWP 2014 dengan tujuan utamanya adalah menciptakan kaum perempuan yang tidak hanya tampil sebagai ibu rumahtangga yang berhasil membina keluarganya, namun dapat secara aktif berperan di area *public excellence.*

Menurut Ketua Umum Dharma Wanita Wien Ritola Tasmaya, Dharma Wanita Persatuan sebagai organisasi istri pegawai ASN, yang dalam sejarahnya turut berkiprah dalam pembangunan bangsa, bertekad mengembangkan organisasi menjadi organisasi yang modern dan profesional untuk memperkuat peran serta perempuan dalam pembangunan bangsa. dwp berperan aktif membantu pemerintah dalam pelaksanaan program kemasyarakatan dilapangan.

Rencana strategi DWP yang dihasilkan oleh MUNAS III DWP tahun 2014, yang mengacu kepada RPJMN 2015-1019 dari pemerintah Bapak JKW, goalsnya adalah DWP sebagai *Center Of Excellence* yang merupakan pusat pelatihan dan pelayanan anggota DWP dalam meningkatan kapasitas sebagai perempuan yang berhasil membina keluarga dan berkiprah secara aktif dalam peran publik. "Hal ini pun menunjukan peran strategis Dharma Wanita Persatuan sebagai *pressure group* yang turut mendukung kebijakan Pemerintah," tegas Wien Ritola Tasmaya.

Dalam upaya mendukung mutu dan kualitas itu, maka seminar ini pun menghadirkan tokoh dan pejabat Negara yang memiliki kapabilitas dalam mengarahkan masyarakatnya di alam MEA ini. Para istri ASN, yang berkecimpung dalam organisasi Dharma Wanita dimotivasi oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo dengan tema "DWP menjadi motor penggerak perempuan sebaga sebagai pelaku Ekonomi untuk Sukses MEA". Anies Baswedan pun, memberikan arahan bagaimana menciptakan karakter kinerja sebagai moral kunci di era MEA. Dalam hal moral, Budi Waseso selaku Kepala Badan Narkotika Nasional, menghantarkan topik tentang ketahanan keluarga mendukung sukses MEA.

Kehadiran para tokoh dan Pejabat Negara ini, sebagai dukungan Negara terhadap aspirasi dan peran serta perempuan, khususnya anggota Dharma Wanita Persatuan, dalam pembangunan bangsa. Kinerja organisasi ini pun, turut mendukung kebijakan Pemerintah dalam menjalankan RPJMP (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah-Panjang), sebagai acuan proses pembangunan nasional, demi kesejahteraan hidup bangsa Indonesia. Kaum ibu memiliki fungsi yang penting dalam memikul tanggung jawab ini. Karena perempuan disamping melaksanakan tugas domestiknya sebagai Ibu dan manajer rumah tangga, mereka pun ditunut siap menjalani kehidupan modern dengan segala kebutuhannya. Keseimbangan antara pengabdian seorang ibu dan peran membantu perekonomian keluarga, makin banyak dijalani oleh kaum perempuan abad ini.

Maka dengan terlaksananya Seminar Nasional 2016, yang mengangkat tema Peran DWP mendukung sukses MEA, diharapkan tumbuh dan berkembang, pelaku usaha perempuan yang handal yang mampu bersaing di era MEA.

**Merry & Joice*

Pentas Seni SMAK se-NTT

Dunia pendidikan Katolik di NTT boleh berbangga hati, Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK) sudah mulai memikirkan langkah positif pengembangan kreativitas siswa dalam bidang seni, yakni kegiatan Pentas Seni. Sebagaimana diketahui, keterampilan (dalam semua bidang) menjadi bagian tak terpisahkan dari sebuah proses pembelajaran. Proses pembelajaran tidak semata memajukan prestasi akademik tetapi juga prestasi dalam bidang seni, karena seni pun bisa menghaluskan budi. Inilah yang menjadikan dunia pendidikan semakin berwarna indah, saling melengkapi.

Pentas Seni yang diselenggarakan Bidang Pendidikan Katolik Kanwil Kemenag NTT, ini, berlangsung di Kota Ende, dan mengusung tema "Dengan Pentas Seni dan Lomba Antar Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK) se-Provinsi NTT Kita Tingkatkan Kualitas Kaderisasi Awam Katolik." Kegitan ini diikuti peserta dari SMAK se Provinsi NTT. Pentas Seni diawali dengan pawai di sepanjang Jalan Wirajaya, Ende pada hari Sabtu (22/10) dan dimeriahkan Drumband dari MTsN dan MAN Ende.

Uskup Agung Ende, Mgr. Vicentius Sensi Potokota, Pr dalam sambutannya menegaskan SMAK harus menghasilkan *buah* berlimpah dan menjadi berkat bagi masyarakat dan dunia. Sementara itu, Sekretaris DITJENBIMAS Katolik, Agustinus Tungga Gempa menyampaikan harapannya kepada SMAK untuk membenahi input dan proses manajemen. "Ukuran SMAK bermanfaat dan menjadi berkat bagi masyarakat adalah jika SMAK diakui dan dipercaya masyarakat. Kepercayaan timbul dari output yang dihasilkan. Output yang berkualitas ditentukan oleh input dan proses. Jadi tugas kita bersama adalah membenahi input dan proses manajemen SMAK," ungkap Sekretaris.

Selain Uskup Agung Ende dan Sekretaris DITJENBIMAS Katolik, hadir juga Bupati Ende, Marsel Petu yang menyampaikan pentingnya pendidikan karakter bagi pembangunan bangsa. "Pendidikan karakter penting bagi pembangunan bangsa. Hanya orang berkarakter baik yang akan menjadi pemimpin yang baik," ungkapnya. Seni, lanjut Bupati Marsel, adalah salah satu unsur penting dalam upaya pembangunan karakter. Pentas Seni SMAK penting untuk membangun karakter para siswa SMAK yang adalah kader-kader Katolik pemimpin Gereja dan masyarakat. Karakter Katolik inilah yang harus dikedepankan dan dipertahankan SMAK.

Kegiatan Pentas Seni yang melombakan Paduan Suara, Tarian Daerah, dan Pidato ini mendapat sambutan positif dari berbagai pihak. Bahkan, ke depan, harapan untuk pengembangan kreativitas ini terus ditingkatkan; tidak hanya seni, tetapi juga iptek, bahasa dan lain sebagainya. Semoga. **JB Kleden/Joice*

Rapat Kerja Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bimas Katolik Raih Penghargaan

Bertempat di Merlynn Park Hotel, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin membuka secara resmi Rapat Kerja Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kementerian Agama Tahun 2016. Rapat Kerja yang berlangsung dua hari, 27-28 Oktober 2016 ini mengusung tema Kerja Nyata Mengembalikan Opini WTP pada LKKA Tahun 2016 dan me-nampilkan Paduan Suara Bimas Katolik yang membawakan dengan baik lagu Indonesia Raya dan Bagimu Negeri.

Dalam sambutannya, Menteri Agama memandang penyelenggaraan Rapat Kerja Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ini merupakan momentum yang tepat dan strategis dalam upaya penuntasan capaian kinerja Kementerian Agama sesuai yang diharapkan. Seiring dengan itu Menteri Agama memberikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh Satker Pusat dan Daerah yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan tugas sejak awal tahun 2016 dan akan menuntaskan program hingga akhir tahun ini.

"Saya meminta seluruh Kuasa Pengguna Anggaran dan jajarannya di pusat dan daerah, agar betul-betul memperhatikan penggunaan anggaran dengan mengoptimalkan penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan negara, meningkatkan transparansi, serta *compliance* (kepatuhan) terhadap peraturan perundang-undangan untuk mengembalikan status Opini WTP tahun 2016," tegas Menteri.

Dilanjutkan Menteri, realisasi anggaran Kementerian Agama sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016 sebesar Rp 37.330.616.076.420,00. Jumlah ini setara dengan 66,42% dari pagu anggaran sebesar Rp 56.444.735.570.000,00. Masih ada sisa pagu anggaran sebesar Rp 19.114.119.493.580,00. Sementara target serapan anggaran pada bulan Oktober sebesar 75,92% dan target akhir tahun sebesar 98,46%.

Peta anggaran negara tahun ini mengalami beberapa kali perubahan pagu melalui *self blocking* sehubungan dengan kebijakan fiskal pemerintah, sehingga kondisi tersebut langsung dan tidak langsung menghambat penyerapan anggaran secara keseluruhan. Namun hal tersebut menurut Menteri tidak boleh menjadi alasan kita untuk berhenti melangkah. Justru harus memacu kita untuk tetap menjaga keberlangsungan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program skala prioritas kementerian, serta program-program lain yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

"Khusus untuk anggaran belanja pegawai yang terkait dengan pembayaran tunjangan profesi guru Non PNS saya minta tidak boleh terhutang dan segera dituntaskan. Seluruh KPA yang terkait dengan ini harus memiliki komitmen dan kesungguhan untuk menuntaskan melalui *affirmative action*."

Menteri melanjutkan, berdasarkan Surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor 41/S/VII-XVIII/5/2016 tanggal 16 Mei 2016 perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2015, bahwa BPK RI telah memeriksa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2015 dan memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

"Inspektorat Jenderal saya minta memperkuat pengawasan secara terus menerus dan menyeluruh serta memberikan *early warning system* sebelum terjadinya penyimpangan, merubah paradigma pengawas intern yang semula sebagai *watch dog*, sekarang menjadi *partner* manajemen yang berfungsi memberikan *assurance* (penjaminan mutu) dan *consulting* (konsultasi) yang independen dan objektif. Fungsi pengawasan Itjen pada Kementerian Agama seharusnya lebih pada penajaman tidak hanya pada proses auditnya, melainkan ketika *business process* sedang berjalan dan harus memahami substansinya," tegas Menteri Agama.

Untuk meningkatkan opini keuangan, selain kebijakan tata kelola keuangan juga perlu langkah-langkah strategis, yaitu: Menyelesaikan seluruh temuan pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat Jenderal, Memperbaiki manajemen aset Barang Milik Negara, Meningkatkan kualitas Sistem Pengendalian Internal (SPI), seluruh Sakter agar tidak menyumbangkan LK yang buruk atau tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). "Terkait dengan hal tersebut, pada kesempatan kali ini saya meminta kepada seluruh KPA agar menandatangani bukti komitmen untuk Kerja Nyata mengembalikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada LK Tahun 2016 tanpa ada DPP."

Pada kesempatan yang berharga ini, Menteri Agama juga memberikan penghargaan kepada Bimas Katolik, atas capaiannya sebagai TERBAIK KEDUA dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan tingkat UAPPA-E1. Atas capaian ini, Dirjen Bimas Katolik menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja sama semua pihak dan berharap ke depan lebih baik lagi. **Joice Djeer*

Persiapan PESPARANI

Direktur Urusan Agama Katolik Bertemu Ketua LP3K dan Perwakilan Keuskupan Amboina

Direktur Urusan Agama Katolik, Sihar Petrus Simbolon didampingi Kasi Pembinaan Umat Subdit Pemberdayaan Umat, Toni F. Pardosi menerima Ketua LP3K, Angky Renyaan dan perwakilan Keuskupan Amboina untuk membahas Pesparani di ruang kerja Direktur Urusan Agama Katolik Kantor Kementerian Agama, Jl. MH Thamrin, Kamis (10/11).

Dalam kesempatan ini, Ketua LP3K menyampaikan terima kasih karena kehadiran mereka diterima dengan senang hati oleh Direktur. "Ini menjadi berkat bagi kami, bagi kita semua, terutama bagi Bimas Katolik tidak saja di Maluku, tetapi mudah-mudahan bisa menjangkau umat Katolik se-Indonesia melalui kegiatan ini," ungkapnya.

Lebih lanjut, Ketua LP3K menyampaikan maksud kedatangan mereka yakni melaporkan apa-apa saja yang sudah dilakukan terkait Pesparani. Langkah serius yang telah dilakukan adalah melaksanakan Musyawarah Daerah Luar Biasa (MUSDALUB) untuk meninjau kembali

seluruh program yang sudah ditetapkan pada musyawarah terdahulu, kemudian bagaimana menyesuaikan dengan kehadiran PMA Nomor 35 Tahun 2016.

Sebelum melanjutkan paparannya, Ketua LP3K mengucapkan terima kasih kepada Direktur yang telah memperjuangkan payung hukum Pesparani ini. "Atas nama LP3K maupun masyarakat Katolik di Maluku, kami menyampaikan selamat dan ucapan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik: Dirjen dan seluruh perangkatnya, khususnya Bapak Direktur atas perjuangan kerasnya sampai kita boleh mendapatkan landasan hukum yang jelas, yaitu PMA Nomor 35 Tahun 2016. Bagi kami, dan bagi kita semua ini adalah Rahmat dari Tuhan untuk kita umat Katolik."

Selanjutnya, Ketua LP3K membacakan hasil MUSDALUB, yakni 1) Sosialisasi hasil MUSDALUB dan PMA Nomor 35 Tahun 2016 ke berbagai Kabupaten/Kota maupun stakeholder yang ada, 2) Pesparani Tingkat Provinsi di Maluku akan dilakukan 2 tahun setelah Pesparani Nasional, 3) Tuan rumah Pesparani Tingkat Provinsi adalah Kota Tual, 4) Pengaturan penataan keterwakilan Maluku dalam Pesparani, dan 5) Penyesuaian tata kelola sesuai dengan PMA.

Sedangkan Rekomendasi MUSDALUB adalah, 1) Bimas Katolik agar memfasilitasi sosialisasi ke Keuskupan dan *stakeholder* terkait, 2) Bimas Katolik mempersiapkan persiapan Pra-MUNAS, terkait pembentukan kelembagaannya, 3) LP3K memberikan asistensi kepada beberapa Kabupaten/Kota terutama daerah yang belum mendapat perhatian cukup dari Pemerintah Daerah, 4) LP3K Tingkat Provinsi juga agar membuat Juknis untuk Audisi dan mata lomba yang diusulkan untuk Pesparani, dan 5) Setelah PMA, diharapkan ada aturan-aturan teknis yang diatur dengan Keputusan Dirjen.

Direktur Urusan Agama Katolik menyambut baik hasil MUSDALUB dan Rekomendasi yang disampaikan. "Itulah yang kami harapkan. Kami masih belum ada pengalaman. Dengan masukan-masukan ini kami menjadi semakin bersemangat dan lebih percaya diri. Akan kami perhatikan, dan akan kami laporkan kepada Bapak Dirjen terkait asistensi itu. Terima kasih karena kami merasa terbantu. Dari kita untuk kita," tegas Direktur.

**Joice Djeer*

Dirjen Bimas Katolik:

Perlu Tahu Motivasi Seseorang Menjadi Pemimpin

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Eusabius Binsasi, tampil sebagai *keynote speaker* dalam Seminar bertema Menuju DKI 1; Pilihan Rasional Umat Kepada Siapa, Sabtu, 10 Desember 2016 di Jakarta. Kegiatan yang diprakarsai oleh Vox Point Indonesia dan Seksi Hubungan Antar Agama Paroki St. Yakobus ini, juga menghadirkan para pembicara RD. Eddy Purwanto, Yuniarto Wijaya (Direktur Politika Charta Politika Indonesia), dan Jhonny G. Plate (Anggota DPR-RI), dengan Moderator Handoyo Budhisejati (Ketua Umum Vox Point Indonesia).

Berbicara di hadapan puluhan umat Katolik Paroki St. Yakobus, Dirjen menekankan pentingnya partisipasi politik umat Katolik dalam pesta Demokrasi di Pilkada DKI Februari 2017 mendatang. Seperti diketahui, ada tiga figur pasangan calon yang bertarung di arena pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI. Dirjen mencatat, nantinya sekitar 300.000 umat Katolik Provinsi DKI bakal menjalankan hak pilihnya. Untuk peristiwa besar ini, Dirjen mengingatkan agar umat Katolik memahami hak dan kewajiban politiknya tersebut dan dapat menjatuhkan pilihannya secara tepat sesuai hati nurani.

Disampaikan Dirjen, saat ini dinamika masyarakat ditandai dengan tiga trend yang mengemuka. Yakni, trend Sosiologis, Psikologis, dan Rasional. "Trend Sosiologis menyangkut isu-isu SARA yang belakangan terjadi," ungkap Dirjen. Secara kasat mata, isu SARA memang demikian mengental menjelang Pilkada. Bahkan isu ini dimanfaatkan sebagai senjata *black campaign* di arena kampaye. Isu ini pun ditengarai sangat potensial menciptakan konflik. Belum lagi situasi regional dan global yang kerap bersinggungan dengan persoalan SARA, turut meninggalkan suhu politik jelang pemilihan. Situasi yang berkembang saat ini, tambah Dirjen, berkembangnya kelompok-kelompok masyarakat yang mengedepankan ideologi yang mereka yakini ketimbang paham kebhinekaan sebagai khasanah bangsa. "Banyak orang menganggap isu lokal kelompok tertentu lebih berpengaruh, daripada isu nasional," sambung Dirjen. Patriotisme lokal inilah, yang menyebabkan perasaan curiga, cemas, bahkan kekhawatiran antara satu dengan yang lain.

Trend berikutnya adalah Psikologis, yang terkait dengan figur dan *track record* seseorang. "Umat Katolik harus sungguh-sungguh memahami betul pribadi maupun komitmen pasangan calon yang dipilihnya," tegas Dirjen. Ketiga, trend Rasional. "Perlu dipahami pula, apa yang memotivasi seseorang untuk maju menjadi pasangan calon dalam Pilkada nanti dan pengetahuan yang dimiliki," papar Dirjen.

Di sesi berikutnya, Rm. Eddy Purwanto membawakan materi seputar Panggilan dan tanggung jawab umat Katolik dalam menghadirkan Pilkada yang berkualitas. Dilanjutkan pengamat politik Yunarto yang membeberkan beragam *poling* terkait Pilkada serentak dan Pilkada DKI. Pembicara selanjutnya, Jhonny-politisi Nasdem, pendukung salah satu pasangan calon.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Vox Point Indonesia, Susan Binsasi Sarumaha, dalam sambutannya menyampaikan bahwa forum semacam ini juga dapat dimanfaatkan sebagai pencerahan umat Katolik DKI, dalam menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur periode lima tahun mendatang. "Kita harus cerdas mencerna beragam media yang kerap memberitakan ketiga pasangan calon. Dengan berpikir rasional, diharapkan kita dapat dengan tepat memilih paslon terbaik, dengan mengedepankan suara hati," ungkap Susan. (Maria Masang)

Pandangan Gereja Katolik Tentang Kematian Tidak Wajar atau Mencurigakan

Disampaikan oleh Dirjen Bimas Katolik
Pada Seminar di RSCM, 26 November 2016

Prinsip Umum

- Kehidupan manusia berasal dari Allah (*Kej 1:26-27*) dan sejak awal semua orang dipanggil untul melindungi dan mempertahankannya (*Gaudium et Spes, n. 51. Cf. Katekismus Gereja katolik n. 2270*).
- Luhurnya nilai kehidupan mendorong semua orang, untuk membela dan mempromosikan hak hidup manusia (*Cf. Evangelium Vitae n. 79*).
- Paus Yohanes Paulus II dalam *Evangelium Vitae*, menyatakan: pembunuhan seorang manusia yang tak bersalah selalu merupakan perbuatan immoral/tidak bermoral.
- Instruksi *Donum Vitae* juga menegaskan: "Penghormatan terhadap nilai kehidupan sejak dari saat pembuahan sampai mati adalah hal yang tidak dapat diganggu gugat oleh apapun dan siapapun (*Donum Vitae Int., n. 4. Cf. GIOVANNI PAOLO II, Discorso ai partecipanti alla 35° assemblea generale, 390*).
- Luhurnya nilai kehidupan mendorong semua orang, terutama Gereja dengan misi utamanya untuk membela dan mempromosikan hak hidup manusia (*Cf. Evangelium Vitae n. 79*).

Alasan Gereja Katolik Menolak Aborsi

- Kitab Suci

  Kitab Suci perjanjian Lama dengan keras melarang orang melakukan pembunuhan: **"Jangan membunuh"** (*Kel. 20:13; Ul. 5:17*), (*Kej. 9:6b*): Pembunuhan janin adalah pembunuhan manusia yang adalah Gambar Allah sendiri.

- **Dokumen Konsili Vatikan II: Gaudium Et Spes**

  Dalam Gaudium Et spes ditegaskan bahwa dalam situasi apapun aborsi adalah kejahatan yang mengerikan. Pembunuhan anak melanggar hukum ilahi.

- **Kitab Hukum Kanonik 1983**

  "Barang siapa melakukan pengguguran kandungan dan berhasil, terkena ekskomunikasi yang bersifat otomatis" (*Kan. 1398*).

- **Paus Yohanes Paulus II: Evangelium Vitae**

  Menjelaskan bahwa perbuatan yang paling jahat adalah aborsi karena melanggar kehidupan.

Prinsip- prinsip Moral Gereja Katolik terhadap Euthanasia

- Martabat setiap individu dan anugerah hidup adalah kudus.
- Setiap orang terikat untuk melewatkan hidupnya sesuai rencana Allah dan dengan keterbukaan terhadap kehendak-Nya.
- Yohanes Paulus II juga menegaskan bahwa euthanasia merupakan tindakan belas kasihan yang keliru, belas kasihan yang semu: Sebab itu, bahwa euthanasia itu pelanggaran berat hukum Allah (*Evangelium Vitae, No. 65*); walaupun dalam kondisi kritis sekalipun, manusia tetap mempunyai martabat yang utuh, dan karenanya harus diperlakukan sebagai manusia
- *The Charter for Health Care Workers* (yang dikeluarkan oleh *Pontifical Council for Pastoral Assistance for Health Care Workers, 1995*) mengatakan bahwa perlakuan yang layak tersebut termasuk perawatan, kebersihan, pengurangan rasa sakit, pemberian makanan, dan air, baik melalui mulut atau dengan infus, jika ini dapat mendukung kehidupan pasien tanpa menimbulkan beban yang serius kepada pasien.
- Maka persyaratan umum adalah menghindari kematian pasien yang disebabkan oleh kelaparan dan kehausan. Namun, jika kasus yang terjadi malah sebaliknya, yaitu jika pasien telah menjelang ajal, di mana pemberian makanan dan air malah menimbulkan kesulitan yang lebih besar daripada kegunaannya, maka mereka yang bertugas menjaga dan merawat pasien tersebut, dapat memberhentikan pemberian tersebut (lih. *National Conference of Catholic Bishops, Ethical and Religious Directives for Catholic Health Care Services, no. 58*).

Gereja Katolik Menolak Hukuman Mati

- **Kitab Suci**

"Jangan Membunuh" (*Ul 5:17*)

- Paus Fransiskus kepada Komisi Internasional Penghapusan Hukuman Mati, pada tanggal 20 Maret 2015 menyatakan:

1. Hukuman mati tidak bisa diterima, seperti apapun kejahatan orang yang dijatuhi hukuman.
2. Hukuman mati melawan rencana Allah terhadap manusia.
3. Bagi negara hukum, hukuman mati mencerminkan kegagalan, karena keadilan tidak pernah tercapai dengan membunuh manusia.
4. Hukuman mati bertentangan dengan kemanusiaan dan kerahiman Allah.
5. Hukuman mati menyengsarakan manusia yang diperlakukan secara kejam (perasaan ketika menunggu eksekusi, dst)
6. Hukuman mati secara langsung melawan perintah "Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri"

SERUAN PASTORAL KWI 2016
STOP KORUPSI:
Membedah dan Mencegah Mentalitas serta Perilaku Koruptif

Segenap Umat Katolik terkasih,

Sidang KWI 2016 yang diawali dengan Hari Studi para Uskup yang juga diikuti oleh peserta Sidang KWI (31 Oktober – 2 November 2016) mengambil topik "Membedah dan Mencegah Mentalitas serta Perilaku Koruptif."

Hari studi ini digunakan oleh para Uskup untuk mendengarkan kesaksian para penggerak anti korupsi serta berbagai langkah pencegahan yang mereka lakukan. Bahan dari berbagai narasumber itu didalami melalui diskusi-diskusi bersama untuk menemukan benang merah dari persoalan korupsi.

Perilaku koruptif telah begitu merusak dan menggerogoti kehidupan masyarakat, terjadi di mana-mana, baik di dunia bisnis, pemerintahan, lembaga negara, bahkan di institusi agama, termasuk Gereja. Korupsi dalam segala bentuknya telah menjadi kejahatan yang sistemik, terstruktur, dinamis, dan meluas dari pusat sampai ke daerah.

Melalui media massa, setiap hari kita saksikan persoalan korupsi diangkat ke permukaan, pelakunya ditangkap, diadili, dan dijatuhi hukuman. Sangat memprihatinkan karena banyak dari mereka yang dihukum adalah pejabat negara dan tokoh masyarakat. Usaha pemberantasan korupsi bagaikan mengurai benang kusut, saling terkait, bahkan membentuk tali-temali yang tidak jelas ujungnya.

Pemidanaan dan pemiskinan para koruptor tidak mengurangi perilaku koruptif. Hari ini satu orang ditangkap, hari berikutnya muncul orang lain melakukan korupsi yang sama, bahkan lebih dahsyat, di tempat yang berbeda, seakan korupsi memang tidak akan ada habisnya.

Saudara-saudari terkasih,

Dorongan berperilaku koruptif bisa muncul dari dalam diri tiap individu maupun masyarakat di sekeliling kita. Dorongan dari dalam diri sendiri bisa disebabkan karena gaya hidup yang tidak seimbang dengan penghasilan, yaitu manakala gaji atau penghasilan tidak cukup untuk membiayai berbagai kebutuhan hidup. Penyebab lainnya adalah sifat tamak (serakah, rakus) yang membuat seseorang selalu tidak pernah puas dengan apa yang sudah dimiliki. Di samping itu, sikap moral kurang kuat dan iman lemah sehingga orang mudah tergoda untuk melakukan korupsi.

Dorongan yang berasal dari luar (masyarakat) disebabkan oleh lunturnya nilai-nilai luhur budaya jujur, terjadinya pembenaran atas perilaku koruptif, serta lemah dan kurang berfungsinya penegakan hukum. Apalagi kalau ditambah faktor budaya setempat, yang sejatinya luhur tetapi pemahamannya dibelokkan secara tidak tepat, seperti sungkan, gotong-royong, solidaritas, dan kekeluargaan.

Perilaku koruptif yang disebabkan oleh adanya dorongan-dorongan tadi akan bermuara pada korupsi, baik yang dilakukan secara pribadi maupun bersama-sama, yang ingin mengambil keuntungan secara tidak adil.

Perilaku koruptif meniadakan keadilan yang sejati. Alam, bumi dan segala isinya, diciptakan dan dianugerahkan Tuhan bagi semua orang. Bukan untuk diperebutkan, di mana yang kuat memperoleh banyak, yang lemah mendapat sedikit, bahkan mungkin tidak mendapat sama sekali. Bukan juga untuk kepentingan salah satu golongan, melainkan demi harkat kemanusiaan, martabat, keselamatan dan kesejahteraan bangsa kita.

"Nepotisme, korupsi, dan pemerasan tidak boleh kita biarkan, apalagi kalau didorong oleh keserakahan, atau didukung oleh suatu jabatan dan kekuatan politik" (*Surat Gembala Prapaskah KWI 1993*).

"Korupsi membuat banyak orang semakin tidak tahu malu dalam memanfaatkan jabatan, kedudukan, dan kesempatan untuk memperkaya diri, keluarga, sanak-saudara, teman dekat, atau kelompoknya sendiri" (*Surat Gembala Prapaskah KWI 1997*).

(Foto: Konferensi Pers saat menyampaikan hasil-hasil Sidang Tahunan KWI/ dokpen KWI)

Saudara-saudari terkasih,

Para Uskup menyerukan perubahan mental untuk mencegah perilaku koruptif, baik dalam diri sendiri maupun di lingkungan masing-masing: jujur dalam tindakan, tidak menyalah-gunakan kekuasaan demi keuntungan pribadi atau golongan, dan tidak melayani orang-orang yang mengajak kita untuk berbuat korupsi (**lih**. *Pedoman Kerja Umat Katolik Indonesia*, Desember 1970).

Di samping itu, iman harus kita kuatkan, gaya hidup kita perhatikan, dan kepekaan terhadap kebutuhan sesama harus kita tingkatkan hingga kita takut akan Tuhan, malu pada sesama, dan merasa bersalah pada masyarakat seandainya melakukan korupsi.

Kami para Uskup menyadari betapa perilaku koruptif juga menjangkiti sendi-sendi kehidupan menggereja. Pola korupsi yang ada dalam ling-kungan Gereja biasanya mengikuti pola korupsi yang ada di lembaga-lembaga lain, misalnya penggunaan anggaran yang tidak jelas, penggelembungan anggaran saat membuat proposal kepanitiaan, menggunakan bon pengeluaran fiktif, meminta komisi atas pembelian barang, dan pengeluaran biaya yang dipas-paskan dengan anggaran pendapatan.

Umat Katolik harus berani berubah: Stop korupsi.

Korupsi adalah kejahatan yang merusak martabat manusia. Sulit diberantas karena sudah sedemikian mengguritanya. Pemberantasannya harus dilakukan melalui gerakan bersama dalam sebuah sistem yang transparan, akuntabel, dan kredibel. Tumbuhkan kepekaan dan kepedulian individu terhadap masalah-masalah korupsi. Berkatalah tegas dan jelas: “Stop korupsi.“

Libatkan diri dalam pemberantasan korupsi, mulai dari diri sendiri untuk tidak korupsi. Jangan memberikan uang suap untuk mengurus apa pun, tempuhlah cara yang baik dan benar. Jangan meminta upah melebihi apa yang seharusnya diterima sebagai balas jasa atas pekerjaan yang kita lakukan. “Jangan merampas, jangan memeras dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. (Luk 3:14)”.

Jangan biarkan diri kita dibujuk oleh roh jahat yang menampilkan dirinya sebagai malaikat penolong bagi hidup kita (**bdk**. *Surat KWI "Marilah Terlibat dalam Menata Hidup Bangsa,* 12 Nov 2010). Cermati perilaku koruptif dengan hati jernih agar kita tidak mudah goyah oleh bujukan roh jahat. Sebagai orang beriman, sekaligus sebagai warga negara sejati, kita harus berani menghapus dan menghentikan korupsi sekarang juga.

Stop korupsi mulai dari diri kita sendiri, keluarga, lingkungan kerja kita, lalu kita tularkan kepada masyarakat di sekeliling kita. Jadikan sikap dan gerakan anti korupsi sebagai habitus baru dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah yang menciptakan alam semesta begitu baik dan sempurna, menugaskan kita untuk menjaganya agar tetap baik dan sempurna, tentu akan memberi kekuatan kepada kita saat secara nyata mewujudkan hidup yang baik dan sempurna tanpa korupsi.

SERUAN PASTORAL KWI MENYAMBUT PILKADA SERENTAK 2017
PILKADA YANG BERMARTABAT
SEBAGAI PERWUJUDAN KEBAIKAN BERSAMA

Saudara-saudari yang terkasih.

BANGSA kita akan menyelenggarakan Pilkada serentak untuk kedua kalinya. Jumlah daerah yang akan melaksanakan Pilkada adalah 7 (tujuh) provinsi, 18 (delapan belas) kota, dan 76 (tujuh puluh enam) kabupaten yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Tahapan penting yang harus kita ketahui adalah masa kampanye tanggal 26 Oktober – 11 Februari 2017, masa tenang tanggal 12-14 Februari. Waktu pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan tanggal 15 Februari. Masa rekapitulasi suara adalah tanggal 16-27 Februari dan saat penetapan calon terpilih tanpa sengketa adalah 8-10 Maret.

Melalui Pilkada, kita memilih pemimpin daerah yang akan menduduki jabatan hingga lima tahun ke depan. Marilah kita jadikan Pilkada sebagai sarana dan kesempatan untuk memperkokoh bangunan demokrasi dan upaya nyata mewujudkan kebaikan bersama.

Sikap ini dianjurkan oleh ajaran Gereja: "Hendaknya semua warga negara menyadari hak maupun kewajibannya untuk secara bebas menggunakan hak suara mereka guna meningkatkan kesejahteraan umum" (*Gaudium et Spes* 75).

Oleh karena itu, kita harus berpartisipasi dalam Pilkada dengan penuh tanggung jawab berpegang pada nilai-nilai kristiani dan suara hati.

Saudara-saudari yang terkasih, Selain berharap, kita juga terpanggil untuk ikut bertanggung jawab agar Pilkada berjalan dengan bermartabat dan berkualitas.

Sebagai bentuk dukungan dan partisipasi yang optimal terhadap Pilkada, kita perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Ikutlah mengawal proses Pilkada.

Bersama warga masyarakat, kita mengawal Pilkada agar berjalan dengan damai dan sesuai dengan amanat Undang-Undang. Hal penting dalam proses Pilkada yang perlu dikawal adalah tersedianya fasilitas yang memadai bagi berlangsungnya hubungan pengenalan secara timbal balik antara calon dengan pemilih dan kepastian bagi setiap warga negara untuk menggunakan hak memilih secara luber (langsung, umum, bebas, rahasia) dan jurdil (jujur, adil).

Proses Pilkada yang damai menjadi syarat penting yang harus dikawal semua pihak. Jangan sampai terjadi kekerasan dalam bentuk apa pun, baik secara terbuka maupun terselubung. Apabila kekerasan terjadi, damai dan rasa aman tidak akan mudah dipulihkan.

Kita perlu waspada terhadap berbagai upaya untuk memecah belah dalam proses Pilkada. Kedamaian dan persatuan tidak boleh dikorbankan demi target politik tertentu dalam Pilkada.

Mengantisipasi munculnya masalah dan ancaman.

Hal-hal yang berpontensi menimbulkan masalah dan harus diantisipasi adalah:

- *Pertama,* siasat politik yang tidak sehat atau menghalalkan segala cara demi meraih kekuasaan.
- *Kedua,* kemampuan dan integritas penyelenggara Pilkada (KPU dan BAWASLU).

(Foto: Ketua KWI Mgr. Ignatius Suharyo saat menyampaikan keterangan pers kepada para wartawan/MM)

Proses pemilu terdahulu memberi bukti ada penyelenggara pemilu yang tersangkut masalah dan membuat masalah karena tidak netral bahkan ikut memanipulasi suara. Pelanggaran yang berpotensi menimbulkan masalah harus diantisipasi bersama dan harus ada penegakan hukum yang adil dan efektif untuk memberi jaminan terselenggaranya Pilkada yang berkualitas dan bermartabat. Apabila Pilkada telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan undang-undang, hendaknya kita rela menerima hasilnya dan siap memberikan dukungan untuk menjadi pemimpin bagi seluruh warga masyarakat. Segala perbedaan pendapat dan pilihan politik, hendaknya berhenti saat kepala daerah hasil Pilkada dilantik.

Pilihlah dengan cerdas dan bertanggung jawab.

Gereja harus mendorong umat untuk menggunakan hak dengan berpartisipasi dalam Pilkada dan memastikan tidak membawa lembaga Gereja masuk ke dalam politik praktis. Setiap warga negara yang telah memiliki hak suara harus ikut terlibat menentukan dan memilih siapa yang akan menjadi pemimpin daerah melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh peraturan dan undang undang yang berlaku. Ikut memilih dalam Pilkada merupakan hak dan panggilan sebagai warga negara.

Dengan ikut memilih berarti kita ambil bagian dalam menentukan arah perjalanan dan kelangsungan kehidupan daerahnya. Oleh karena itu, penting disadari bahwa pemilih tidak saja memberikan suara, melainkan menentukan pilihan dengan cerdas, bertanggung jawab, dan sesuai dengan suara hati. Kita yang punya hak suara janganlah Golput.

Pahamilah kriteria pilihan dan kiat dalam memilih dengan tepat.

Para calon pemimpin daerah yang akan kita pilih harus dipastikan orang bijak, yang menghayati nilai-nilai agamanya dengan baik dan benar, peduli terhadap sesama, berpihak kepada rakyat kecil, cinta damai dan anti kekerasan serta peduli pada pelestarian lingkungan hidup. Calon pemimpin daerah yang jelas-jelas berwawasan sempit, cenderung mementingkan kelompok, terindikasi bermental koruptif dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kedudukan, jangan dipilih.

Hati-hatilah supaya kita tidak terjebak dan ikut dalam politik uang yang dilakukan calon untuk mendapatkan dukungan suara. Penting untuk kita ingat bahwa politik uang bertentangan dengan ajaran Kristiani dan merusak asas-asas demokrasi.

Berdoalah untuk pelaksanaan Pilkada.

Marilah kita mengiringi proses pelaksanaan Pilkada dengan doa. Kita memohon berkat Tuhan agar Pilkada berlangsung dengan damai dan menghasilkan pemimpin daerah yang berintegritas serta mau berjuang keras memperhatikan rakyat demi terwujudnya kesejahteraan umum.

Jakarta, November 2016

KONFERENSI WALIGEREJA INDONESIA
Mgr. Ignatius Suharyo (Ketua)
Mgr. Antonius S. Bunjamin OSC (Sekjen)

Bimas Katolik Kankemenag Kabupaten Sumba Timur Mendapat Seorang Pemimpin Baru

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 8519/KW.2.1/2/KP.07.6/10/216, Blasius Ndadjang,S.Fil, yang selama ini menjalankan tugas sebagai Pengawas Pendidikan Agama Katolik Tingkat Dasar pada Kantor Kementerian Agama Kab. Sumba Timur, mengangkat sumpah jabatan dan dilantik oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Sumba Timur, Maxy Lak'apu menjadi Kepala Seksi Bimas Katolik Kementerian Agama Kantor Kabupaten Sumba Timur. Blasius dilantik untuk mengisi kekosongan setelah terjadi rotasi Pejabat Eselon IV di lingkungan Kementerian Agama Provinsi NTT di akhir September yang lalu.

Acara pelantikan dilakukan di aula utama Kantor Kementerian Agama Kab. Sumba Timur, Selasa (8/11) pukul 10.00 Wita, dan dihadiri oleh seluruh Pejabat Eselon IV dan segenap pegawai Kantor Kementerian Agama Kab. Sumba Timur. Hadir sebagai pendamping rohani Rm. Eduardus Umbu Jora Sabatudung, Pr dari Paroki Maria Bunda Selalu Menolong Kabajawa.

Blasius dilantik menjadi Kepala Seksi Bimas Katolik setelah melewati proses seleksi asesmen kompetensi yang dilewatinya. Sebagaimana diketahui, saat ini jabatan yang lowong terbuka untuk siapa saja, yang terpenting memenuhi persyaratan administrasi sesuai UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan KMA No. 207 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Asesmen Kompetensi di Lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Blasius memenuhi ketetapan regulasi, dan karena itu dianggap layak dan dikukuhkan untuk memangku jabatan yang telah dilamarnya.

Maxy Lak'apu dalam sambutan mengatakan bahwa peristiwa pengangkatan sumpah dan pelantikan ini harus disyukuri. Karena menurutnya banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. "Jabatan adalah panggilan yang harus diterima dengan syukur untuk melayani dan bukan untuk membanggakan diri," ungkapnya. Lebih lanjut ia menegaskan bahwa karena sumpah jabatan untuk menjalankan tugas dilakukan di hadapan Tuhan, maka tugas yang hendak dijalankan harus berlandaskan ajaran iman. Dan juga karena disaksikan banyak orang maka dituntut kedisiplinan dalam berbagai aspek agar kepemimpinan itu dapat dipertanggungjawabkan.

Demi menunjang pelaksanaan tugas secara bertanggungjawab, maka Kepala Kantor mengimbau agar selain menerapkan lima nilai budaya kerja, Kepala Seksi Bimas Katolik yang baru mampu menunjukkan perilaku kerja sebagai pelayan dan diharapkan mampu bersikap adil, cermat, santun dan tegas, andal dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut, profesional, tidak mempersulit, patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar, menunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara, tidak membocorkan informasi, terbuka dan mengambil langkah-langkah yang tepat, tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas, tidak memberikan informasi yang salah, tidak menyalahgunakan informasi, dan tidak menyimpang dari prosedur sesuai amanat Undang-Undang.

**Apol*

Dirjen Hadiri Pekan Misi Sedunia ke-90

Dirjen Bimas Katolik, Eusabius Binsasi hadiri Pekan Misi Sedunia Ke 90 di Paroki Sang Penebus Wara-Waingapu, sabtu (22/10).

Tiba di Bandara Umbu Mehang Kunda Waingapu hari Sabtu yang lalu tepat pukul 11.38 WITA dijemput oleh Kakankemenag Kabupaten Sumba Timur, Maxy Lak'apu bersama Kasubag TU, Hau Tanggumara dan Plh. Kasi Bimas Katolik Kankemenag Sumba Timur, Blasius Ndadjang dengan didampingi Direktur Pusat Pastoral dan Sosial (PUSPAS) Katikuloku, Keuskupan Weetabula P. Simon Tenda, CSsR yang juga menjadi Ketua Panitia dalam perayaan Pekan Misi tahun ini.

Perjalanan kemudian berlanjut ke Paroki Sang Penebus-Wara, tempat pekan Misi dilaksanakan. Dirjen Bimas Katolik disambut di pintu gerbang gereja oleh ratusan anak-anak temu minggu dan sekami yang sedang mengikuti perlombaan Lagu dan Gerak tingkat Keuskupan Weetebula bersama seluruh umat Katolik yang juga hadir pada saat itu.

Beliau juga turut hadir menyaksikan dan memberikan dukungannya bagi seluruh peserta Perlombaan Lagu dan Gerak, Pidato, serta Lomba Cerdas Cermat Alkitab untuk Temu Minggu dan Sekami se-Keuskupan Weetabula Sumba yang diselenggarakan untuk menyambut Pekan Misi Tahun ini.

DIRJEN BIMAS KATOLIK AJAK MASYARAKAT SUMBA JAGA KERUKUNAN

Pekan Misi Sedunia Ke-90 yang mengangkat tema "Gereja Misionaris, Saksi Kerahiman" dilaksanakan secara megah dan meriah di Paroki Sang Penebus Wara-Waingapu. Serangkaian kegiatan telah dilaksanakan kurang lebih 2 (dua) bulan sebelum acara puncaknya. Sejumlah kegiatan yang dilaksanakan lebih melibatkan anak-anak Temu Minggu dan Sekami yang akan menjadi penerus gereja di masa yang akan datang.

Setelah kegiatan Lomba Lagu dan Gerak, Pidato, serta Cerdas Cermat Alkitab dilaksanakan, malam harinya, sabtu (22/10) ditutup dengan Pegelaran Budaya NTT yang diikuti oleh beberapa paguyuban NTT yang ada di Kabupaten Sumba Timur. Dirjen Bimas Katolik juga hadir dalam pegelaran tersebut dan diberikan kesempatan untuk menyampaikan sambutannya.

"Saya telah menerima begitu banyak proposal pengajuan dana untuk pembangunan gereja, jumlahnya mencapai ratusan proposal. Namun melihat apa yang terjadi pada rangkaian perayaan Pekan Misi ini, saya merasa bahwa hal yang terpenting yang perlu dilakukan saat ini adalah membangun gereja sebagai persekutuan umat daripada membangun gereja sebagai gedung," ungkapnya di awal sambutan.

Eusabius yang dulunya pernah menjabat sebagai Kakankemenag Kabupaten Sikka ini juga menyampaikan ucapan selamat dan terima kasih bisa berada di tengah Umat Katolik di Sumba Timur untuk perayaan Pekan Misi ini. "Kekayaan budaya sama dengan kekayaan Iman, mari tetap bergandengan tangan menjaga kerukunan umat beragama di Nusa Tenggara Timur umumnya, dan secara khusus di pulau Sumba ini," lanjut beliau.

Dalam pagelaran tersebut, Dirjen juga diajak untuk menari Danding bersama penguyuban Manggarai sebagai bentuk sukacita bersama pada malam itu.

Seratus Persen KATOLIK, Seratus Persen WNI

Puncak dari seluruh rangkaian kegiatan Pekan Misi Sedunia ke-90 ini adalah perayaan Ekaristi yang juga dilaksanakan di Paroki Sang Penebus Wara-Waingapu, Minggu (23/10). Perayaan Ekaristi dilaksanakan meriah, dengan tarian dan paduan suara yang megah. Seluruh umat juga turut hadir memenuhi gereja. Dirjen berkenan memberikan sambutannya didampingi Kakankemenag Kabupaten Sumba Timur, Maxy Lakapu dan Kasubag TU, Hau Tanggumara.

Sejalan dengan tema bulan misi "Gereja Misioner, Saksi Kerahiman Allah" Dirjen mengajak umat Katolik Sumba untuk menjadi saksi kerahiman Allah di tengah situasi dunia yang kacau. Jalan menuju kesaksian adalah menghayati eksistensi diri kita sebagai umat Katolik, seratus persen Katolik tetapi juga seratus persen Warga Negara Indonesia. Kita adalah orang Katolik dalam wadah NKRI. Selain itu, untuk menjadi saksi kerahiman, kita sebagai umat Katolik perlu saling "memberi dan meminta" pengampunan.

"Memberi dan meminta adalah dua kata kunci untuk menghayati kerahiman Allah dalam hidup kita," tegas Dirjen.

**Dion-Inmas Waingapu*

*dari **HAKI, Pekanbaru**

Pungli... ke laut aja...

BERANI JUJUR! HEBAT!

Foto: Ketua KPK, Agus Rahardo dan Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman saat mengunjungi Stand Kemenag RI

Peringatan HAKI 2016: Menumbuhkan Inisiatif Masyarakat Ikut Lawan Korupsi

Masyarakat harus dilibatkan dalam pemberantasan Korupsi dengan ikut melakukan kontrol dan memberikan masukan. Demikian harapan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Agus Rahardjo ketika membuka secara resmi Pameran Integritas Peringatan Hari Anti Korupsi (HAKI) 2016 yang digelar di Provinsi Riau. Pembukaan pameran ditandai dengan pemukulan rebana oleh Ketua KPK, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan Gubernur Riau dilanjutkan dengan pengguntingan pita di lokasi pameran area Gedung Daerah Provinsi Riau, Kamis (8/12/2016).

Ketua KPK dalam sambutannya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bertekad mewujudkan nilai-nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari.

"Mari kita serukan komitmen bahwa integritas di Indonesia harus ditegakkan termasuk di pemerintahan," ajak Agus.

"Kita ingin semua layanan publik transparan dan masyarakat bisa mengontrol dan memberikan masukan atau saran," lanjut Agus.

Pada peringatan HAKI 2016 yang berlangsung mulai 8 s.d. 10 Desember 2016 ini, Kementerian Agama kembali berpartisipasi aktif dengan menggelar stan pameran bersama sejumlah peserta lain yang berasal dari kementerian/lembaga, media, LSM, dan elemen masyarakat lainnya. Sejumlah stan di arena pameran dirancang dengan ragam konsep yang ditampilkan.

Pameran Integritas Peringatan HAKI 2016 ini, melibatkan seluruh unit eselon I Kementerian Agama, termasuk Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik (Ditjen Bimas Katolik). Di stan Kemenag, pengunjung pameran bisa memperoleh informasi dan layanan yang menjadi tugas fungsi Kemenag diantaranya konsultasi haji dan umrah, konsultasi nikah, pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) khusus untuk ASN Kemenag, dan sejumlah informasi lain dalam bentuk buku, brosur, tayangan audio visual.

Sebagai partisipasi dalam mensosialisasikan pemberantasan korupsi kepada masyarakat Katolik, Ditjen Bimas Katolik menyediakan dan memberikan Alkitab Katolik dan buku ibadah lainnya secara gratis kepada pengunjung beragama Katolik.

Penghargaan

Pada peringatan Hari Anti Korupsi Internasional 2016 di Provinsi Riau, Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan penghargaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2016 di Hotel Aryaduta Pekanbaru, Jumat (9/12/2016).

Para penerima penghargaan adalah instansi yang telah memenuhi kriteria, yaitu tingkat kepatuhan LHKPN di atas 90 persen, tingkat keaktifan pengelola atau koordinator LHKPN yang tinggi dan tersedianya peraturan internal instansi mengenai LHKPN.

Dari kriteria tersebut, terpilih tiga instansi terbaik yang terbagi di masing-masing lingkungan Kementerian atau Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN/BUMD, sebagai berikut: Kategori Kementrian atau lembaga: Bank Indonesia, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kesehatan. Kategori Pemerintah Daerah: Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Pemerintah Kota Denpasar dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kategori BUMN/BUMD : PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten.

LHKPN adalah salah satu alat yang digunakan untuk pencegahan korupsi sehingga tujuan pemberian penghargaan ini adalah sebagai bentuk apresiasi dari KPK kepada instansi yang telah melakukan pengelolaan LHKPN di lingkungan instansinya secara baik. Selain itu untuk mendorong instansi lain untuk meningkatkan pengelolaan LHKPN di lingkungannya agar tujuan LHKPN sebagai salah satu alat pencegahan korupsi dapat tercapai.

Pada kesempatan yang sama juga diberikan penghargaan kepada 7 Kementerian/ Lembaga/BUMN/BUMD/ Pemerintah Daerah yang menerapkan sistem Pengendalian Gratifikasi terbaik, yaitu kepada: Kementerian Kesehatan, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, PT Bank Mandiri (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Jabar Banten, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Kriteria pengelolaan Pengendalian Gratifikasi yang baik meliputi: inovasi dari unit pengendalian gratifikasi, kualitas laporan gratifikasi dan ketersediaan infrastruktur sistem pengendalian gratifikasi instansi.

Peringatan HAKI 2016 secara resmi ditutup pada Sabtu malam (10/12) oleh wakil Ketua KPK Saut Situmorang didampingi Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman dan beberapa pejabat lainnya. Malam penutupan ini diwarnai dengan berbagai macam suguhan pentas seni. Mulai seni musik tradisional hingga modern. Dalam sambutannya, wakil ketua KPK Saut Situmorang mengatakan bahwa KPK saat ini hanya memiliki 1.500 personil. Jumlah itu menurut Saut tidak bisa memberantas tuntas korupsi di Indonesia.

"Cita-citanya kalau bisa jadi 8.000 orang personil KPK, supaya Pemda-nya tidak capek. Tapi, sebelum menuju ke sana, pajaknya harus benar dulu, cukainya bagus. Kemudian penghasilan daerahnya bagus" jelas Saut.

Pameran Integritas ini diikuti oleh 84 peserta yang berasal dari kementerian/lembaga, BUMN, Pemerintah Daerah dan elemen masyarakat lainnya serta 100 UMKM. Salah satu tujuan Pameran berlangsung hingga tanggal, 10 Desember 2016 adalah menumbuhkan inisiatif dari Masyarakat untuk berpatisipasi dalam setiap upaya pemberantasan korupsi

(Pormadi/Joice/Sakeng/Budi)

Serba-serbi Pameran HAKI 2016

BERANI JUJUR! HEBAT!
KAMI TOLAK PUNGLI
PUNGLI ADALAH KORUPSI
AWAS PUNGLI
TOLAK PUNGLI
STOP PUNGLI
LAWAN LAPORKAN
AWAS PUNGLI PUNGLI HARAM
KAMI
TOLAK
PUNGLI